



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
 - b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan nasional, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Sistem Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman, Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusuna Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 10 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 6 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 52).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2005-2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjarnegara Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Banjarnegara untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Banjarnegara untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Banjarnegara untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
- (2) Rincian dari program RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan.

Pasal 4

RPJPD mengacu pada RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional.

Pasal 5

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Bupati.
- (2) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPd.
- (3) RKPd sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2006-2011 Kabupaten Banjarnegara dinyatakan masih tetap berlaku sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal

BUPATI BANJARNEGARA,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

SYAMSUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan juga menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, serta memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka Kabupaten Banjarnegara menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk kurun waktu 20 Tahun (2005-2025).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Banjarnegara yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025. Pelaksanaan RPJP Daerah 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJP Daerah Kabupaten Banjarnegara digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah Kabupaten Banjarnegara pada masing-masing tahapan dan periode RPJM Daerah Kabupaten Banjarnegara sesuai masing tahapan dan periode RPJM Daerah Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan visi,

misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Banjarnegara.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Tahun 2005-2025 adalah untuk (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 LATAR BELAKANG	1
	1.2 PENGERTIAN	2
	1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	2
	1.4 LANDASAN HUKUM	2
	1.5 HUBUNGAN RPJPD KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	5
	1.6 TATA URUT	6
BAB II	KONDISI UMUM DAERAH	7
	2.1 KONDISI PADA SAAT INI	7
	2.1.1 SOSIAL BUDAYANDAN KEHIDUPAN BERAGAMA	8
	2.1.2 EKONOMI	16
	2.1.3 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	29
	2.1.4 SARANA DAN PRASARANA	30
	2.1.5 POLITIK DAN TATA PEMERINTAHAN	35
	2.1.6 KEAMANAN DAN KETERTIBAN	36
	2.1.7 HUKUM DAN APARATUR	37
	2.1.8 WILAYAH, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	40
	2.1.9 SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	46
	2.2 TANTANGAN	47
	2.2.1 SOSIAL BUDAYANDAN KEHIDUPAN BERAGAMA	47
	2.2.2 EKONOMI	49
	2.2.3 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	50
	2.2.4 SARANA DAN PRASARANA	51
	2.2.5 POLITIK DAN TATA PEMERINTAHAN	53
	2.2.6 KEAMANAN DAN KETERTIBAN	54
	2.2.7 HUKUM DAN APARATUR	54
	2.2.8 WILAYAH, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	55
	2.2.9 SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	56
	2.3 MODAL DASAR	57
BAB III	VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2005-2025	59
BAB IV	ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2005-2025	63
	4.1 SASARAN POKOK PEMBANGUNAN	63
	4.1.1 MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI YANG AGAMIS, DENGAN MENCIPTAKAN	

	MASYARAKAT BANJARNEGARA YANG BERKUALITAS, SEHAT, CERDAS, PRODUKTIF, KOMPETITIF, KREATIF, INOVATIF DAN BERAKHLAK MULIA, SERTA MENGHARGAI DAN MENERAPKAN NILAI – NILAI LUHUR BUDAYA MASYARAKAT	63
4.1.2	MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN RAKYAT YANG MAJU DENGAN MENGEMBANGKAN DAN MEMPERKUAT PEREKONOMIAN LOKAL KHUSUSNYA KHUSUSNYA PERTANIAN	64
4.1.3	MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG OPTIMAL DENGAN TETAP MENJAGA KELESTARIAN FUNGSIYA DALAM MENOPANG KEHIDUPAN	64
4.1.4	MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (<i>GOOD GOVERNMENT AND CLEAN GOVERNANCE</i>) DALAM KEHIDUPAN POLITIK YANG DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNG JAWAB	65
4.1.5	MEWUJUDKAN KUANTITAS DAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA DASAR	66
4.1.6	MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, AMAN DAN DAMAI	66
4.2	ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025	67
4.2.1	MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI YANG AGAMIS, DENGAN MENCIPTAKAN MASYARAKAT BANJARNEGARA YANG BERKUALITAS, SEHAT, CERDAS, PRODUKTIF, KOMPETITIF, KREATIF, INOVATIF DAN BERAKHLAK MULIA, SERTA MENGHARGAI DAN MENERAPKAN NILAI – NILAI LUHUR BUDAYA MASYARAKAT	67
4.2.2	MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN RAKYAT YANG MAJU DENGAN MENGEMBANGKAN DAN MEMPERKUAT PEREKONOMIAN LOKAL KHUSUSNYA KHUSUSNYA PERTANIAN	68
4.2.3	MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG OPTIMAL DENGAN TETAP MENJAGA KELESTARIAN FUNGSIYA DALAM MENOPANG KEHIDUPAN	71
4.2.4	MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (<i>GOOD GOVERNMENT AND CLEAN GOVERNANCE</i>) DALAM KEHIDUPAN POLITIK YANG DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNG JAWAB	72
4.2.5	MEWUJUDKAN KUANTITAS DAN	

KUALITAS SARANA DAN PRASARANA DASAR	75
4.2.6 MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, AMAN DAN DAMAI	77
4.3 TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	80
4.3.1 RPJMD I (Tahun 2005 s/d Tahun 2009)	80
4.3.2 RPJMD II (Tahun 2010 s/d Tahun 2014)	81
4.3.3 RPJMD III (Tahun 2015 s/d Tahun 2019)	87
4.3.4 RPJMD IV (Tahun 2020 s/d Tahun 2024)	91
BAB V PENUTUP	95

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

1. Kabupaten Banjarnegara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara beserta segenap komponen masyarakat Banjarnegara telah diupayakan guna peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya serta lingkungan hidup dalam kerangka NKRI.

Selama ini telah dikenal beberapa rencana pembangunan yang disusun untuk memberikan arah pembangunan Daerah. Rencana pembangunan ada yang berdimensi waktu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Semua rencana pembangunan tersebut telah disusun dan diaplikasikan hingga memberikan hasil yang cukup signifikan bagi perkembangan dan kemajuan Daerah.

3. Rencana pembangunan Daerah sangat diperlukan untuk mengantisipasi pengaruh dinamika perubahan terhadap perkembangan pembangunan Daerah. Krisis moneter yang berkembang menjadi krisis multidimensional memberikan pengalaman tentang pentingnya langkah-langkah antisipatif yang tertuang dalam rencana pembangunan Daerah.
4. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode 5 (lima) tahunan menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan Daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kabupaten Banjarnegara menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun (2005-2025).

I.2 PENGERTIAN

Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjarnegara adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Banjarnegara yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Kabupaten Banjarnegara, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2005 hingga tahun 2025.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJPD Kabupaten Banjarnegara sebagai dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam mewujudkan cita-cita sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJPD ini adalah untuk memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi, arah dan program Kepala Daerah terpilih.

I.4. LANDASAN HUKUM

Landasan idiil dari RPJPD ini adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD 1945, sedang landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang – undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Sistem Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pedoman Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusuna Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 10 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 6 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 52).

I.6 HUBUNGAN RPJPD KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

1. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 bahwa RPJP Nasional digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi dan Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
2. Perencanaan pembangunan Kabupaten Banjarnegara tidak terlepas dari hierarki perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam Undang-Undang tersebut pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, diamanatkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan tersebut, penyusunan RPJPD Kabupaten Banjarnegara mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. RPJPD Kabupaten Banjarnegara merupakan perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi, arah, tantangan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah. Dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mempedomani Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta tetap harus memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Banjarnegara;
4. Berkaitan dengan huruf 3 (tiga) tersebut di atas apabila dalam pelaksanaannya muncul kendala yang disebabkan oleh alam, maka untuk mengantisipasi hal tersebut penyusunan RPJPD Kabupaten Banjarnegara harus memperhatikan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Alam, sehingga dapat membuat perencanaan yang lebih komprehensif;

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006-2011, di mana RPJMD tersebut digunakan sebagai acuan penyusunan RKPD dan RAPBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011, secara substansial menjadi bagian dari RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025.

I.7 TATA URUT

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Kondisi Umum
- Bab III : Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025
- Bab IV : Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 – 2025
- Bab V : Penutup.

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

2.1. KONDISI PADA SAAT INI

Pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Di samping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan dan kendala, upaya untuk mengatasi hal tersebut tertuang dalam rencana pembangunan Kabupaten Banjarnegara 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Untuk mengetahui kondisi kehidupan penduduk di Banjarnegara dapat dilihat melalui perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indeks komposit yang terdiri dari elemen-elemen kesehatan, pendidikan dan ekonomi (daya beli). Elemen kesehatan ditentukan oleh indikator Angka Harapan Hidup (AHH), elemen pendidikan ditentukan oleh indikator Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), elemen ekonomi ditentukan oleh daya beli.

IPM Kabupaten Banjarnegara dari tahun ke tahun mengalami kenaikan terus, pada tahun 2001 sebesar 60, dan tahun 2003 menjadi 68,7 pada tahun 2004 naik menjadi 70,2 hingga pada tahun 2005 menjadi 70,6 kenaikan tersebut didukung oleh elemen AHH : 68,2, tahun AMH : 97,63, RLS 5.8 tahun dan Daya beli Masyarakat : Rp. 620.800,- perkapita pertahun, apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah maka IPM Kabupaten Banjarnegara lebih tinggi dari rata-rata IPM Jateng yaitu sebesar 69,8.

Makin meningkatnya IPM Kabupaten Banjarnegara tersebut dikarenakan makin meningkatnya pelayanan akan kesehatan dan pendidikan, keterjangkauan akan fasilitas tersebut, dan pembangunan infrastruktur, dengan demikian akan meningkatkan daya beli masyarakat.

2.1.1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Kependudukan dan Keluarga Berencana

Jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara 10 (sepuluh) tahun terakhir nampak dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Banjarnegara Tahun 1993-2003

Tahun	Jumlah Penduduk			Rate Of Growth	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1995	407.424	403.329	810.753	0,52	101,02
1996	412.793	413.426	826.219	1,91	99,85
1997	417.418	418.331	835.749	1,15	99,78
1998	420.715	421.468	842.183	0,77	99,82
1999	426.084	427.807	853.891	1,39	99,60
2000	430.670	431.813	862.483	1,01	99,74
2001	435.156	436.385	871.541	1,05	99,72
2002	438.575	440.040	878.615	0,81	99,67
2003	442.391	442.825	885.216	0,75	99,90
2004	445.193	445.604	890.707	0,62	99,91
2005	448.240	448.817	897.059	0,71	99,87

Disimak dari table tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi.

Tahun 1995 pertumbuhan penduduk mencapai angka 0,52%, kemudian merangkak naik dan pada tahun 1999 pertumbuhan mencapai tertinggi yakni 1,39%. Selanjutnya menurun hingga mencapai 0,71% pada tahun 2005.

2. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Jumlah pencari kerja yang tercatat di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2005 sebesar 21.943 orang, dari angka tersebut yang belum ditempatkan sebesar 14.452 orang. Ditinjau dari tingkat pendidikan yang dimiliki pencari kerja tercatat yang terbesar adalah SLTA yakni mencapai angka 63,81% pada tahun 2005 disusul tingkat SLTP sebesar 13,52%, sarjana 12,61%, D1/D2 4,76%, Sarjana muda / D3 3,77% da SD 1,53%.

Bila ditinjau dari kelompok usianya, maka penduduk usia produktif (14-55 tahun) sebanyak 516.314 jiwa dan penduduk usia non-produktif (0-15 tahun dan 56 tahun ke atas) sebanyak 380.743 jiwa. Dari keadaan tersebut maka angka *dependency ratio* menunjukkan angka sebanyak 64 yang berarti bahwa setiap 100 jiwa usia produktif harus menanggung 64 jiwa usia non-produktif.

Banyak usaha masyarakat yang mengalami kelesuan akibat adanya krisis yang terjadi, ini berdampak juga terhadap ketenagakerjaan di Kabupaten Banjarnegara. Mengembalikan dunia usaha ke dalam kondisi seperti sebelumnya memerlukan waktu yang tidak singkat dan terutama tergantung pada proses pemulihan perekonomian secara keseluruhan. Karena lapangan kerja formal terbatas, maka lapangan usaha informal dan usaha keluarga merupakan jalan keluar sementara dan menjadikan angkatan kerja sektor informal meningkat.

Dari segi perlindungan tenaga kerja, masalah yang dihadapi berkaitan dengan masih rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan pekerja dalam memahami peraturan dan hak serta kewajiban sebagai pekerja. Tantangan yang dihadapi adalah persaingan yang cukup ketat dalam mendapatkan lapangan pekerjaan. Tantangan lainnya adalah upaya mengejar ketertinggalan dalam pengembangan sumber daya manusia dalam rangka menciptakan manusia yang produktif dan berdaya saing tinggi.

Upaya perluasan kesempatan kerja juga dilakukan melalui program transmigrasi. Program tersebut adalah upaya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk dan mengurangi angka kemiskinan. Jumlah transmigran dari Kabupaten Banjarnegara dalam kurun waktu tahun 2001-2005 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2001 jumlah transmigran asal Kabupaten Banjarnegara sebanyak 442 orang dan dalam tahun 2005 sebanyak 1631 orang. Pelaksanaan program transmigrasi tidak semata-mata ditekankan pada target pemindahan penduduk, tetapi pada pencapaian kesejahteraan transmigran dan perannya dalam rangka pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di daerah penempatan.

3. Pendidikan

Pendidikan memegang peranan penting dalam pembentukan watak pribadi dan mental serta kualitas manusia dalam menganalisa dan memilih alternatif pemecahan masalah serta mengaplikasikannya dalam kehidupan masyarakat.

Namun perkembangan pendidikan tidak terlepas dari ketersediaan dan keberdayaan sarana dan prasarana pendidikan. Oleh sebab itu pada tiap jenjang pendidikan harus disimak komponen per komponen. Dalam hal pendidikan Sekolah Dasar (SD), maka jumlah sekolah SD negeri justru cenderung menurun, sementara itu jumlah muridnya justru meningkat. Hal ini terjadi karena adanya *regrouping*/penggabungan beberapa Sekolah Dasar menjadi satu Sekolah Dasar.

Jumlah SD negeri pada tahun 2005 sebanyak 655 buah sedangkan jumlah muridnya sebanyak 91.877 anak dan jumlah guru sebanyak 4.154 orang. Untuk jumlah SD swasta tidak mengalami perubahan, pada tahun 2005 jumlah SD swasta sebanyak 10 buah dengan jumlah murid sebanyak 1.308 anak dan gurunya sebanyak 75 orang. Sedangkan untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) jumlah sekolahnya sebanyak 211 buah dengan jumlah murid 17.718 anak dan guru 1.578 orang.

Di tingkat SLTP dapat disampaikan kondisi sarana prasarana sebagai berikut :

- Untuk SLTP negeri jumlah sekolah sebanyak 50 buah dengan jumlah murid 26.932 anak dan guru sebanyak 1.399 orang;
- Untuk SLTP swasta jumlah sekolahnya sebanyak 14 buah, dengan jumlah murid 2.101 anak dan guru sebanyak 172 orang;
- MTs negeri jumlah sekolahnya sebanyak 4 buah dengan jumlah murid sebanyak 1.305 anak dan jumlah guru sebanyak 91 orang;
- MTs swasta jumlah sekolah sebanyak 31 buah dengan jumlah murid 5.232 anak dan guru sebanyak 452 orang.

Untuk tingkat SMU kondisi sarana dan prasarana dapat disampaikan sebagai berikut :

- Untuk SMU negeri jumlahnya sebanyak 8 buah dengan jumlah murid 6.045 anak dan guru sebanyak 372 orang;
- SMU swasta jumlah sekolah sebanyak 5 buah, dengan jumlah murid 664 anak dan jumlah guru 79 orang;

- Madrasah Aliyah negeri jumlah sekolahnya sebanyak 2 buah dengan jumlah murid 1.135 anak dan jumlah guru sebanyak 88 orang;
- MA swasta jumlah sekolahnya sebanyak 10 buah dengan jumlah murid 827 anak dan jumlah guru sebanyak 151 orang;
- Untuk SMK Negeri jumlah sekolahnya sebanyak 2 buah dengan jumlah murid 1.283 anak dan jumlah guru sebanyak 58 orang;
- Sedangkan SMK swasta jumlah sekolahnya sebanyak 9 buah dengan jumlah murid 5.083 anak dan jumlah guru sebanyak 264 orang.

4. Perpustakaan

Untuk meningkatkan kecerdasan dan kemampuan masyarakat Kabupaten Banjarnegara dilakukan dengan menyediakan fasilitas perpustakaan dan peningkatan minat baca masyarakat.

Kondisi Perpustakaan Umum Kabupaten Banjarnegara sampai tahun 2005 berjumlah 1 (satu) buah, sedangkan perpustakaan khusus (sekolah) di mana perpustakaan SD/MI sejumlah 359, perpustakaan SMP/MTs sejumlah 58 dan perpustakaan SMA/MAN sejumlah 20. Tingkat koleksi buku yang ada di perpustakaan Kabupaten Banjarnegara sejumlah 28.554 buah, sedangkan tingkat kunjungan di perpustakaan kabupaten berjumlah 35.092 orang.

5. Pemuda dan Olah Raga

Pada tahun 2005 jumlah pemuda Kabupaten Banjarnegara 625.477 orang yang terdiri atas laki-laki sebesar 310.569 dan perempuan sebesar 314.906 di mana terdapat peningkatan yang signifikan dari tahun 2001 dimana jumlah laki-laki sebesar 300.060 dan perempuan sebesar 295.277 (total 595.337). Jumlah pemuda yang sebesar ini merupakan aset sebagai kader pemimpin, pelopor, dan penggerak pembangunan, namun sekaligus membutuhkan keseriusan dalam hal pembinaan dan penyediaan lapangan kerja. Pembinaan kepemudaan, dilakukan melalui berbagai pendekatan institusional seperti Pramuka, KNPI dan Karang Taruna, serta organisasi kepemudaan lainnya.

Dalam hal prestasi olahraga, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk tahun

2008 menempati urutan ketujuh pada Pekan Olahraga Daerah Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut tidak terlepas dari kerja keras para atlet dan pelatih serta dukungan segenap masyarakat Kabupaten Banjarnegara dalam memajukan olahraga. Di samping itu muncul juga para atlet yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Banjarnegara khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya yakni atlet tinju atas nama Chris John dan atlet pencak silat atas nama Lutfan Budi Santoso.

6. Kesehatan

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Banjarnegara dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan, terutama dalam hal pelayanan kesehatan dasar. Hal ini tercermin dalam peningkatan jumlah sarana dan prasarana kesehatan seperti Polindes (Poliklinik Kesehatan Desa), Pusling serta peralatan medis lainnya, serta bertambahnya jumlah dokter dan paramedis.

Beberapa indikator pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) untuk Kabupaten Banjarnegara adalah 65 tahun (2000) meningkat menjadi 68,2 tahun (2005), Angka Kematian Ibu Melahirkan adalah 100,81 per 100.000 (2000) menurun menjadi 96,04 (2005), Angka Kematian Bayi AKB 11,04 per 1000 bayi hidup (2000) menurun menjadi 8,06 per 1000 bayi hidup (2005), proporsi gizi buruk adalah 0,4 % cakupan desa UCI.

Kabupaten Banjarnegara tahun 2005 memiliki Puskesmas sejumlah 16 buah, Puskesmas Pembantu 44 buah, Puskesmas Keliling 34 buah, sedangkan jumlah tenaga kesehatan untuk menunjang kelancaran peningkatan kesehatan masyarakat pada tahun 2005 adalah dokter 67, bidan 213 paramedis lain 227.

Di samping fasilitas kesehatan yang telah disediakan oleh Kabupaten Banjarnegara berupa Puskesmas dan RSUD, terdapat fasilitas kesehatan yang disediakan oleh swasta berupa rumah sakit 3 buah, balai pengobatan 30 buah, dan rumah bersalin 2 buah.

7. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan masyarakat ditandai dengan fenomena permasalahan

kesejahteraan sosial yang masih banyak ditemui di Kabupaten Banjarnegara. Walaupun upaya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terus dilakukan tetapi belum berhasil mengurangi jumlah PMKS secara signifikan. Kondisi ini ditandai dengan masih banyaknya permasalahan sosial yang muncul dan berkembang seperti meningkatnya jumlah penduduk miskin (seperti gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan anak terlantar), tindak kekerasan, korban bencana alam, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

Pada tahun 2005 terdapat anak yatim piatu dan terlantar 6.211 orang, penyandang cacat 2.088 orang, lanjut usia terlantar 4745 orang, tuna susila 48 orang, pengemis dan gelandangan 659 orang, keluarga miskin 41.658, anak terlantar 8.989 orang, anak bermasalah 22 orang, anak bekas narapidana 103 orang.

Sebagai upaya penanganan PMKS di Kabupaten Banjarnegara, terdapat 1 panti milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu panti Pamardi Raharjo untuk menampung PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang-orang terlantar) non-psikotik.

8. Kemiskinan

Secara umum kondisi penduduk miskin ditandai oleh ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam hal: 1) memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan; 2) melakukan kegiatan usaha produktif; 3) menjangkau akses sumber daya sosial dan ekonomi; 4) menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif dan eksploitatif; dan 5) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin.

Keluarga yang dapat digolongkan miskin adalah keluarga pra-sejahtera dan keluarga pra-sejahtera I. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara tahun 2001 terdapat keluarga pra-sejahtera dengan alasan ekonomi 61.566 orang, dan alasan non-ekonomi 31.388 orang jumlah total keluarga pra-sejahtera Kabupaten Banjarnegara 92.954 orang, keluarga pra-sejahtera I dengan alasan ekonomi 28.346 orang dan alasan non-ekonomi 30.903 orang jumlah total keluarga pra-sejahtera I Kabupaten Banjarnegara 59.249 orang .

Pada tahun 2005 terdapat keluarga pra-sejahtera dengan alasan ekonomi 63.311

orang, dan alasan non-ekonomi 32.046 orang total keluarga pra-sejahtera Kabupaten Banjarnegara 95.357 orang, Keluarga pra-sejahtera I dengan alasan ekonomi 32.855 orang dan alasan non-ekonomi 36.052 total keluarga pra-sejahtera I Kabupaten Banjarnegara 68.907 orang.

Berdasarkan hal tersebut dari tahun 2001 sampai dengan 2005 terdapat peningkatan keluarga miskin di Kabupaten Banjarnegara yaitu 12.011 orang. Hal ini disebabkan oleh pengaruh meningkatnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berimbas pada sulitnya mencari pekerjaan.

Penanggulangan kemiskinan telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan serta telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang panjang. Berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan baik yang bersifat langsung (program khusus) maupun yang tidak langsung telah diimplementasikan, namun demikian hasilnya belum optimal, salah satunya ditandai dengan masih banyaknya penduduk miskin di kabupaten banjarnegara. penanggulangan kemiskinan bukanlah hal yang mudah diatasi, mengingat kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensional. di samping itu, kemiskinan juga merupakan masalah sosio-ekonomi yang memiliki kandungan lokalitas yang sangat bervariasi.

9. Kebudayaan

Kebudayaan adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, karena pada hakekatnya kebudayaan itu timbul dari kebiasaan, pola hidup dan perilaku masyarakat itu sendiri. salah satu kebudayaan yang menonjol adalah bahasa di mana kabupaten banjarnegara memiliki dialek bahasa *kulon* yaitu dialek banyumasan. di samping itu di kabupaten banjarnegara telah berkembang berbagai macam jenis kesenian, di antaranya jenis kesenian campursari, rebana dan sholawatan berjumlah 436 kelompok (2005), kesenian kuda lumping/kuda kepang/embeg sebanyak 211 kelompok kesenian (2005). Kesenian wayang kulit, calung, reog, jepin, tari topeng, kentongan, thek-thek, daing, angguk, kethoprak tradisional, lengger, calung sejumlah 123 (2005), sedangkan kesenian karawitan, nyinden sejumlah 27 kelompok (2005), di samping hal-hal tersebut di atas, unsur-unsur kebudayaan yang tidak bisa dipisahkan

adalah petilasan. Di Kabupaten Banjarnegara ada 9 tempat petilasan seperti, Petilasan Kuncen, Petilasan Jaru, Petilasan Bukit Kolopaking, Petilasan Bandaraga, Petilasan Maskumambang, Petilasan Wadas Tumpang, Petilasan Sembawa, Petilasan Kwondogiri, dan Petilasan Minakjinggo.

Semua yang merupakan nilai-nilai budaya luhur dan identitas Daerah harus tetap dipertahankan, dengan jalan dilestarikan, dan diagendakan dalam kegiatan-kegiatan pentas seni untuk terus memupuk jiwa dan mental yang berbudaya khususnya bagi kaum muda, yang notabene kaum penerus generasi masa depan. Pembangunan yang berbasis pada budaya dan kearifan lokal memiliki daya tahan terhadap pengaruh negatif dari budaya asing dan globalisasi yang kontraproduktif dengan nilai-nilai budaya lokal.

10. Agama

Kehidupan beragama di Kabupaten Banjarnegara selama ini berlangsung dalam toleransi yang cukup tinggi, namun masih belum sepenuhnya menjadi perilaku dalam tata hubungan kemasyarakatan. Hal itu disebabkan oleh rasa toleransi yang tinggi di antara pemeluk agama. Keharmonisan tersebut salah satunya dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah yang ada di sekitar warga yang majemuk, seperti masjid, gereja dan vihara . Jumlah tempat ibadah pada tahun 2005 mencapai 4.592 buah yang terdiri atas 99,32 % masjid dan musholla, sebanyak 0,52 % gereja Kristen dan Katholik dan 0,152 % berupa vihara. Jumlah pemeluk agama Islam 912.093 orang , Kristen Katolik 3.319 orang, Kristen Protestan 2.346 orang, Budha 562 orang dan Hindu 90 orang. Jumlah keberangkatan jamaah haji Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2005 memenuhi kuota yaitu sebanyak 628 orang, mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun 2001 yang hanya 300 orang (109,33 %).

Kehidupan beragama diharapkan mampu memberikan kesejukan dan keharmonisan hubungan sesama manusia. Oleh sebab itulah pendidikan keagamaan perlu mendapat perhatian yang serius.

11. Perempuan dan Anak

Keberadaan perempuan di era globalisasi saat ini sangatlah dibutuhkan.

Meskipun demikian, peran perempuan belum optimal, salah satunya karena masih adanya kesenjangan gender antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum dan HAM, lingkungan hidup, media, kekerasan berbasis gender, mekanisme kemajuan perempuan, penanganan konflik dan bencana alam dan persoalan kemiskinan.

Untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) serta perlindungan anak dan remaja, yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara antara lain melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan, seperti Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender, Forum Kajian Gender, dan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA). Sebagai upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dilaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat afirmatif. Selain hal tersebut ditempuh pula langkah strategis yaitu dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen-dokumen perencanaan.

Kondisi anak dan remaja di Kabupaten Banjarnegara masih perlu mendapat perhatian serius. Sehingga ke depan perlu adanya rencana yang jelas dan tepat yang termuat dalam dokumen perencanaan sehingga keberadaan anak-anak dapat menerima dengan baik pelayanan kesehatan dan pendidikan.

2.1.2 Ekonomi

1. Kondisi dan Struktur Ekonomi

Pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjarnegara, dihadapkan pada berbagai permasalahan baik ekonomi, politik maupun sosial budaya yang mengalami kondisi fluktuatif disertai berbagai perubahan sistem.

Pada awal pemerintahan Orde Baru tahun 1966, penataan sistem perekonomian dicanangkan melalui program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Sampai dengan pertengahan tahun 90-an, berbagai kemajuan ekonomi Kabupaten Banjarnegara telah dicapai. Perekonomian tumbuh baik dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabilitas ekonomi dapat terjaga. Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata dapat ditunjukkan antara lain melalui peningkatan pendapatan per kapita. Pada tahun 1995 PDRB per kapita menurut harga berlaku sebesar Rp 1.113.727 sedang tahun

2003 menjadi Rp 3.281.995,-. Dengan melihat angka-angka berdasarkan harga konstan 1993, maka besarnya PDRB per kapita tahun 1995 sebesar Rp 997.965 meningkat menjadi Rp 1.014.494. Melihat angka PDRB per kapita atas dasar harga konstan 1993, dapat diperoleh angka tingkat pertumbuhan PDRB per kapita pada tahun 1998 dan tahun 2001.

Peningkatan kesejahteraan Kabupaten Banjarnegara juga dapat dilihat dari angka PDRB Kabupaten Banjarnegara. PDRB Kabupaten Banjarnegara atas dasar harga berlaku pada tahun 1995 sebesar Rp. 902.865.988.000,- naik menjadi Rp. 2.335.350.087.000,- pada tahun 2003. Jika dilihat berdasarkan konstan 1993, maka juga terdapat kenaikan yaitu sebesar Rp. 809.290.700.000,- pada tahun 1995, naik menjadi sebesar Rp. 895.183.308.000,- pada tahun 2003. Dari angka ini dapat dihitung tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,31%.

Sehubungan masing-masing sektor tahun 1995 dapat disampaikan sebagai berikut :

- Sektor pertanian memberikan sumbangan paling tinggi sebesar 41,93 % untuk tahun 1995, sedangkan dalam tahun 2004 kontribusinya menurun menjadi 36,33%.
- Sektor industri memberikan sumbangan kedua setelah sektor pertanian yakni sebesar 15,33 %, sedangkan dalam tahun 2004 memberikan sumbangan 15,42 % dari dan bergeser pada urutan ketiga.
- Sektor jasa, pada tahun 1995 memberikan kontribusi sebesar 13,53 % dan pada tahun 2004 menyumbang sebesar 18,94 %, naik ke peringkat dua setelah sektor pertanian.
- Sektor perdagangan, pada tahun 1995 memberikan sumbangan sebesar 13,52 % dan pada tahun 2004 turun dan menyumbang 12,04%.
- Sektor Bangunan, pada tahun 1995 memberikan sumbangan sebesar 7,28 % dan pada tahun 2004 memberikan kontribusi 5,51 % atau turun dibandingkan kondisi tahun 1995.
- Sektor bank dan lembaga keuangan tahun 1995 memberikan sumbangan sebesar 4,45 % dan pada tahun 2004 memberikan kontribusi 5,23 % atau naik dibandingkan kondisi tahun 1995.

- Sektor angkutan tahun 1995 memberikan sumbangan sebesar 2,99 % dan tahun 2004 naik menjadi 0,56%.
- Sektor pertambangan dan energi tahun 1995 memberikan sumbangan sebesar 0,51% dan tahun 2004 naik menjadi 0,56 %.
- Sektor listrik, gas dan air minum tahun 1995 memberikan sumbangan sebesar 0,33% dan tahun 2004 naik menjadi 0,56 %.

2. Industri

Di Kabupaten Banjarnegara, sektor industri merupakan sektor penting selain sektor pertanian. Sampai dengan tahun 2003, tercatat jumlah perusahaan yang tergolong industri besar sebanyak 3 perusahaan dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 837 orang, perusahaan yang tergolong industri sedang sebanyak 30 perusahaan dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 985 orang, sedangkan perusahaan yang tergolong industri kecil sebanyak 399 perusahaan dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.113 orang, dan industri rumah tangga/kerajinan sebanyak 23.287 unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 49.490 orang.

Sektor industri merupakan sektor penting selain sektor pertanian di Kabupaten Banjarnegara. Sektor industri dibedakan menjadi industri besar dengan tenaga kerja 100 orang atau lebih, industri sedang dengan tenaga kerja 20-99 orang, dan industri kecil dengan tenaga kerja 5-19 orang dan industri rumah tangga 1-4 orang.

Di Kabupaten Banjarnegara (2005) tercatat untuk industri besar/sedang = 22 perusahaan, industri kecil 422 perusahaan, industri rumah tangga = 23.456 usaha.

Mengingat jumlahnya yang begitu banyak dan pentingnya industri kecil dan kerajinan tersebut maka pemerintah senantiasa mengupayakan pembinaan dan pengembangan melalui berbagai kebijakan pembangunan yang bertujuan agar industri kecil mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dan berkembang ke arah yang lebih maju dan mandiri, bahkan berkembang menjadi industri menengah sehingga semakin berperan dalam mengisi pembangunan.

3. Koperasi

Koperasi memegang peranan penting dalam perekonomian kerakyatan, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jumlah koperasi di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2003 tercatat 336 koperasi yang menyerap jumlah tenaga kerja 800 orang. Terjadi peningkatan tenaga kerja sebesar 26,38% seiring dengan penambahan jumlah koperasi sebanyak 32 dibanding tahun sebelumnya. Jenis koperasi terbanyak adalah koperasi fungsional sebanyak 127 buah, disusul koperasi lainnya 121 buah, koperasi konsumsi 44 buah, KUD 19 buah, koperasi jasa 19 buah dan Pusat koperasi 2 buah, koperasi sekolah 3 buah dan koperasi industri 1 buah.

Jumlah koperasi di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2005 tercatat 333 koperasi dengan jumlah tenaga kerja 811 orang. Apabila dibandingkan dengan tahun 2004 terjadi penambahan jumlah koperasi sebanyak 2 buah. Demikian pula dengan tenaga kerjanya mengalami penambahan, dari 805 orang menjadi 811 orang.

4. Investasi

Untuk mendorong tercapainya pemenuhan kebutuhan investasi swasta dan berkembangnya sektor riil, diperlukan berbagai kebijakan Pemerintah, meliputi penciptaan iklim kondusif bagi dunia usaha, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penyediaan infrastruktur yang memadai. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah mendukung penciptaan kebijakan Pemerintah yang pro-investasi dan dapat mendorong berkembangnya sektor riil. Kebijakan tersebut adalah penciptaan iklim kondusif bagi investor dalam dan luar negeri dalam segala hal, seperti kepastian hukum, promosi terpadu, intermediasi perbankan, ketenagakerjaan, penyediaan infrastruktur yang memadai dan kebijakan tata ruang yang konsisten.

Data Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Banjarnegara

TAHUN	JUMLAH INVESTASI	NILAI INVESTASI	KENAIKAN (%)
2002	570 Perusahaan	Rp. 48.877.405.213,-	122,67
2003	658 Perusahaan 1 PMA	Rp. 53.367.996.960,- \$ 1.550.000,-	37,72
2004	550 Perusahaan	Rp. 70.156.679.337,-	4,21
2005	812 Perusahaan	Rp. 73.821.388.230,-	5,2
2006	728 Perusahaan	Rp. 91.112.078.864,-	23,42

Identifikasi komoditas-komoditas unggulan di Kabupaten Banjarnegara yang dapat menjadi pedoman bagi investor yang akan mengadakan aktifitas investasi di Kabupaten Banjarnegara tertuang dalam beberapa sektor sebagai berikut :

a. Sektor Industri

Sektor ini memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Kabupaten Banjarnegara, jika dilihat dari perannya dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) industri menduduki urutan ke 2 setelah sektor pertanian sebesar 13,54 %. Dengan demikian pembangunan sektor industri diharapkan dapat memacu perkembangan dan pertumbuhan pembangunan selanjutnya.

Pengembangan sektor industri di Kabupaten Banjarnegara dititikberatkan kepada industri kecil yang mampu menciptakan nilai tambah yang cukup besar, industri kecil yang mempunyai daya saing, dan industri kecil yang menghasilkan kebutuhan sehari-hari.

b. Sektor Pertambangan

Kabupaten Banjarnegara mempunyai kekayaan alam galian C yang melimpah seperti batu marmer, feldspar, trass, batu granit, diorit, dan batu gamping.

c. Sektor Pertanian

Produksi pertanian Kabupaten Banjarnegara setiap tahun cenderung mengalami peningkatan, berdasarkan perhitungan PDRB kontribusi produksi pertanian sebesar 41,77 % per tahun, di mana meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

d. Sektor Jasa dan Pariwisata

Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi wisata yang lengkap, baik wisata alam maupun wisata buatan. Jenis-jenis wisata yang telah dikembangkan adalah berupa wisata arung jeram, wisata air terjun Curug Pitu, wisata Gunung Lawe, wisata TRMS Seruling Mas, kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng.

5. Tanaman Pangan

Komoditas pertanian tanaman pangan yang dikembangkan di Kabupaten Banjarnegara meliputi padi dan palawija serta hortikultura. Produksi padi dan palawija nampak dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Produksi Komoditas Pangan Tahun 2001-2005 Kab. Banjarnegara
(Ton)

Komoditas	2001	2002	2003	2004	2005	Kenaikan/ Penurunan
Padi Sawah	135,199	120,322	118,477	120,652.85	121,968.94	(0.02)
Jagung	87,273	65,266	75,146.0	68,318.65	94,507.95	0.05
Ubi Kayu	406,431	368,649	266,277	295,117.55	303,572.91	(0.06)
Ubi Jalar	8,538	5,371	4,066	5,457.60	4,957.56	(0.09)
Kentang	332,667	373,530	326,143	573,428.00	1,011.74	(0.06)
Kacang Tanah	5,658	6,015	5,882	6,134.67	4,729.20	(0.04)
Kacang Hijau	58	80	119	134.50	121.10	0.22
Kedelai	276	154	173	186.10	213.30	(0.02)

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa produksi padi (padi sawah dan gogo) selama 5 (lima) tahun mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,02 %, sedangkan untuk produksi jagung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami kenaikan sebesar 0,05 % keadaan komoditas ubi kayu mengalami penurunan sebesar 0,06 %, ubi jalar mengalami penurunan sebesar 0,09 %, kentang mengalami penurunan sebesar 0,06 %, kacang tanah mengalami penurunan sebesar 0,04 %, kacang hijau mengalami kenaikan 0,22 % dan kedelai mengalami penurunan sebesar 0,02 %.

Selanjutnya produksi tanaman hortikultura selama 5 (lima) tahun terakhir nampak sebagai berikut :

Tabel 2
Produksi Sayur mayur 2001-2005 Kab. Banjarnegara
(ton)

Komoditas	2001	2002	2003	2004	2005	Kenaikan/ Penurunan
Bawang Daun	117,632	30,212	69,707	85,698	111,996	0.28
Tomat	3,305.50	4,002	6,820	8,199	9,926	0.33
Cabe Besar	17,219	23,892.37	22,820	9,156	17,803.5	0.17
Cabe Rawit	0	0	0	2,948	3,450.53	0.04
Wortel	1,350	6,824	24,260	51,065	32,740	1.84
Bayam	1,334	403	750	464	153	(0.22)

Kangkung	1,260	783	5,779	4,491	4,785	1.46
Kol	711,512	291,555	250,730	702,869	671,715	0.26
Sawi	122,323	16,487	21,558	8,095	7,790	(0.30)
Buncis	6,971	14,295	32,243	14,779	10,813	0.37
Kacang Panjang	4,731	2,429	4,524	4,905	4,112.5	0.07
Timun	453	82	3,392	3,943	3,570	9.90
Petai	797,975	1,021,410	1,239,356	542,100	2,228,500	0.76

Dari tabel tersebut di atas produksi sayur-mayur Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 mengalami kenaikan pada komoditas bawang daun sebesar 0,28 %, tomat mengalami kenaikan sebesar 0,33 %, cabe besar mengalami kenaikan sebesar 0,04 %, wortel mengalami kenaikan sebesar 1,84 %, bayam mengalami penurunan sebesar 0,22 %, kangkung mengalami kenaikan sebesar 1,46 %, kol mengalami kenaikan sebesar 0,26 %, sawi mengalami penurunan sebesar 0,30 %, buncis mengalami kenaikan sebesar 0,37 %, kacang panjang mengalami kenaikan sebesar 0,07 %, timun mengalami kenaikan sebesar 9,90 % dan petai mengalami kenaikan sebesar 0,76 %.

6. Perkebunan

Komoditas perkebunan yang berkembang di Kabupaten Banjarnegara meliputi kapulaga, melati/gambir, aren, lada, kapuk randu, pala, kina, kelapa, kopi, cengkeh, the, tembakau, nilam, kemukus, kayu manis, dan glagah.

Produksi komoditas perkebunan nampak dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3
Produksi Perkebunan di Kabupaten Banjarnegara tahun 2001-2005
(Ton)

Komoditas	2001	2002	2003	2004	2005	Kenaikan/ Penurunan
Kapulaga	16.44	80.85	82.59	102.12	66.99	0.96
Melati/Gambir	1,518.00	331.18	423.90	423.18	450.80	(0.11)
Aren	104.10	101.39	102.03	603.72	703.95	1.27
Lada	74.95	73.08	77.40	200.30	122.51	0.31
Kapuk Randu	37.30	7.92	8.14	10.10	9.12	(0.15)
Pala	3.15	4.56	4.96	4.18	4.71	0.13
Kina	6.75	-	-	2.07	2.22	(0.23)
Kelapa	70,050.20	28,019.38	27,847.28	24,317.90	25,773.87	(0.17)
Kopi	82.20	325.84	310.04	510.30	465.93	0.87

Cengkeh	42.81	21.76	36.71	24.86	25.67	(0.02)
Teh	2,381.97	1,987.62	1,993.60	1,823.94	1,656.36	(0.08)
Tembakau	1,691.95	597.80	374.09	368.70	188.88	(0.38)
Nilam	3,800.00	900.00	1,111.54	1,645.97	2,197.37	0.07
Kemukus	10.66	26.52	11.97	9.86	10.68	0.21
Kayu Manis	33.40	-	34.39	11.87	10.68	(0.28)
Glagah Arjuna	1,200.00	85.60	85.00	59.62	44.01	(0.37)

Melihat tabel tersebut menunjukkan bahwa komoditas kapulaga selama 5 tahun mengalami perkembangan rata-rata setiap tahun sebesar 0,96 %, komoditas melati mengalami penurunan sebesar 0,11 %, komoditas aren mengalami peningkatan sebesar 1,27 %, komoditas lada mengalami peningkatan sebesar 0,31 %, komoditas kapuk randu mengalami penurunan sebesar 0,15 %, komoditas pala mengalami peningkatan sebesar 0,13 %, komoditas kina mengalami penurunan sebesar 0,23 %, komoditas kelapa mengalami penurunan sebesar 0,17 %, komoditas kopi mengalami peningkatan sebesar 0,87 %, komoditas cengkeh mengalami penurunan sebesar 0,02 %, komoditas teh mengalami penurunan sebesar 0,08 %, komoditas tembakau mengalami penurunan sebesar 0,38 %, komoditas nilam mengalami kenaikan sebesar 0,07 %, komoditas kemukus mengalami kenaikan sebesar 0,21 %, komoditas kayu manis mengalami penurunan sebesar 0,28 %, dan komoditas glagah arjuna mengalami penurunan sebesar 0,37 %.

Sedangkan untuk komoditas buah-buahan, komoditas pisang mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya selama kurun waktu 2001-2005, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel :

Tabel 4
Produksi Buah-buahan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2001-2005
(Ton)

Komoditas	2001	2002	2003	2004	2005	Kenaikan/ Penurunan
Pisang	15,838	5,640,027	6,454,027	8,833,400	7,322,856	88.86
Salak	275,048,150	293,868,306	293,982,616.4	239,729,400	109,034,994	(0.17)
Nanas	581,485	267,679	28,431	60,400	55,043.0	(0.10)
Jambu	1,743,356	1,720,279	562,235	780,900	176,600.00	(0.27)
Rambutan	3,510,390	6,726,146	6,727,146	5,040,400	5,463,900	0.19
Duku	686,550	1,198,275	4,847,236	261,400	1,242,300	1.65
Pepaya	8,656,959	1,269,136	707,236	614,600	591,688	(0.37)
durian	725,660	2,815,500	2,416,935	410,800	1,494,500	1.14

Jeruk Siam	3,033,800	1,138,960	1,357,745	567,500	722,100	(0.19)
mangga	480,173	3,306,180	497,781	353,800	429,800	1.24

Berdasarkan data tersebut diatas, selain komoditas pisang yang mengalami kenaikan, selama tahun 2001-2005, komoditas rambutan naik 0,19 %, komoditas duku naik 165 %, komoditas durian naik 1,14 % dan komoditas mangga naik sebesar 1,24 %, sedangkan komoditas yang mengalami penurunan adalah salak (0,17 %), nanas (0,10 %) jambu (0,27 %) pepaya (0,37 %) dan jeruk siam (0,19 %).

7. Perikanan

Jenis ikan yang dikembangkan di Kabupaten Banjarnegara meliputi ikan gurami, lele dumbo, tawes, nila, ikan mas, mujahir, udang dan lain-lain. Budidaya yang dikembangkan meliputi kolam pembesaran, kolam pembenihan baik melalui kolam pembenihan rakyat, dan balai benih ikan. Juga dikembangkan budidaya di perairan umum/sungai maupun waduk/jaring keramba apung, perikanan sawah/minapadi dan lain-lain.

Produksi perikanan Kabupaten Banjarnegara selama 5 (lima) tahun nampak dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5
Produksi Perikanan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2001-2005
(Ekor)

Jenis Pemeliharaan	2001	2002	2003	2004	2005	Kenaikan/ Penurunan
Kolam pembenihan ikan	134,071,720	132,640,996	128,800,092	167,135,700	137,261,366	0.02
Kolam balai benih	1,929,400	2,199,050	2,100,000	5,045,000	1,998,200	0.22
Kolam pembesaran ikan	1,823,400	1,819,280	1,674,997	1,755,010	1,773,620	(0.01)
Jaring keramba apung	1,239,100	1,238,950	1,110,000	1,155,791	975,150	(0.05)
Minapadi	5,158,100	5,061,720	5,079,764	5,956,740	5,828,220	0.03

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa produksi kolam pembenihan ikan mengalami kenaikan sebesar 0,02 %, kolam balai benih mengalami peningkatan sebesar 0,22 %, kolam pembesaran ikan mengalami penurunan sebesar 0,01 %, jaring

keramba apung mengalami penurunan sebesar 0,05 % dan minapadi mengalami kenaikan sebesar 0,03 %.

8. Peternakan

Jenis ternak yang diusahakan oleh peternak di Kabupaten Banjarnegara meliputi ternak besar seperti sapi perah, sapi potong, kerbau dan kuda. Di samping itu juga terdapat jenis ternak kecil seperti kambing, domba, babi dan kelinci. Selanjutnya juga berkembang ternak jenis unggas seperti ayam, itik, bebek dan lain-lain.

Populasi ternak Kabupaten Banjarnegara selama 5 (lima) tahun nampak dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6
Produksi Peternakan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2001-2005
(Ekor)

Komoditas	2001	2002	2003	2004	2005	Kenaikan/ Penurunan
A. Ternak Besar						
Sapi Perah	28	31	33	29	45	0.15
Sapi	35,531	36,147	37,158	37,449	37,110	0.01
Kerbau	2,016	2,086	2,009	1,936	1,905	(0.01)
Kuda	282	265	257	261	231	(0.05)
B. Ternak Kecil						-
Kambing	96,239	109,836	109,644	108,274	142,431	0.11
Domba	99,796	87,468	94,348	95,633	90,264	(0.02)
Babi	672	816	791	827	329	(0.09)
Kelinci	16,406	18,907	19,285	18,864	27,831	0.16
C. Unggas						-
Ayam Kampung	838,876	1,228,369	1,296,024	1,147,448	1,040,209	0.08
Ras Layar	700	7,000	7,125	15,000	34,350	2.85
Broiler	222,000	310,900	346,522	777,900	1,389,400	0.64
Biasa	65,406	52,359	50,772	48,591	54,225	(0.04)
Manila	14,054	17,998	214,443	43,634	35,646	2.55

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dari tahun 2001 sampai dengan 2005 populasi ternak sapi perah mengalami peningkatan 0,15 %, sapi meningkat 0.01 %, kerbau mengalami penurunan sebesar 0,01 %, kuda mengalami penurunan sebesar 0.05 %, sedangkan ternak kecil seperti kambing mengalami peningkatan 0,11 %, domba mengalami penurunan sebesar 0,02 %, Babi mengalami penurunan sebesar 0.09 %, kelinci mengalami peningkatan sebesar 0,16 %. Sedangkan untuk unggas seperti ayam

kampung produktifitasnya mengalami peningkatan 0.08 %, ras broiler 2,85 %, broiler, 0,64 %, biasa turun 0,04 % dan manila mengalami peningkatan 2,55 %.

9. Pertambangan

Kabupaten Banjarnegara mempunyai beberapa jenis bahan tambang/galian yang belum tergali secara optimal. Jenis bahan galian yang ada meliputi :

a. Marmer

Sebagian bahan galian batu gamping (CaCO_3) mengalami metamorfosa karena tekanan dan temperatur yang sangat tinggi, di samping mempunyai nilai ekonomi tinggi untuk bahan bangunan dan kerajinan. Lokasi terdapat di Dukuh Kabangpurwa Desa Merden Kecamatan Purwonegoro, Karanggumantung, Kali Bremani, Sikubang, Kembaran Desa Kebutuh Jurang Kecamatan Pagedongan. Depositnya meliputi jumlah sebanyak 18.689.000 M^3 .

b. Feldspar/Pasir Kuarsa

Merupakan endapan dari pelapukan batuan yang banyak mengandung mineral. Feldspar untuk pembuatan kaca dan pembuatan keramik. Lokasinya terdapat di Kebutuh Jurang Kecamatan Pagedongan, Kali Tangah dan Kaliajair Kecamatan Purwonegoro. Potensinya meliputi jumlah sebanyak 145.325.780 ton

c. Asbes

Terdapat bersama dengan batuan Serpentine dan dari jenis Antapylit / Kristal. Dapat digunakan untuk bahan bangunan seperti eternit, genting, dan lainnya. Lokasinya terdapat di Watubelah, Sideres, Karanggumantung, Kali Parakan, Subah, Kali Sapi, dan Kali Lebah. Depositnya meliputi jumlah sebanyak 3.085.250 m^3

d. Trass

Endapan sekunder dari pelapukan Andesit tua, dapat dimanfaatkan untuk pembuatan batako, pengolahannya cukup sederhana. Lokasinya terdapat di Kecamatan Pagedongan, Sigaluh, Wanayasa, dan Kecamatan Punggelan. Potensinya meliputi jumlah sebanyak 36.524.275 ton

e. Batu Gamping

Merupakan bahan galian golongan C yang dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Depositnya meliputi jumlah sebanyak 12.372.000 M³ tersebar di Kecamatan Bawang, Banjarnegara, Punggelan, Wanayasa dan Kecamatan Pejawaran.

f. Lempung

Merupakan bahan galian golongan C untuk pembuatan keramik. Depositnya sebanyak 199.246.000 M³, lokasinya tersebar di Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara, Banjarmangu, Punggelan, Wanayasa, Karangkoobar, Kalibening, Pagentan dan Kecamatan Pejawaran.

g. Oker

Depositnya sebanyak 1.250.000 M³ tersebar di Kecamatan Purwanegara, merupakan bahan galian golongan C untuk bahan bangunan.

h. Lain-lain

Bahan galian yang lain meliputi batu tulis/State, Zeolit, Andesit, Diorite, pasir dan batu kali. Lokasinya tersebar di seluruh kecamatan.

Bahan-bahan galian tersebut merupakan modal dasar pembangunan, yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

10. Perdagangan

Dalam bidang perdagangan, nampak bahwa perkembangannya cukup menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kabupaten Banjarnegara yang semakin meningkat. Memang sejak tahun 1997 jumlah realisasi penerbitan SIUP menurun, dan bahkan pada tahun 1998 menurun drastis dari 291 menjadi 25. Namun demikian pada tahun 2005 dapat diterbitkan SIUP sebanyak 596 dengan rincian 9 perusahaan besar, 29 perusahaan menengah dan 556 perusahaan kecil.

Permasalahan di bidang industri dan perdagangan yaitu menyangkut aspek organisasi, teknologi produksi, keuangan, pemasaran dan sikap mental, sedangkan permasalahan lainnya yang masih dihadapi antara lain :

- Masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan pengusaha kecil dan menengah di bidang pemasaran dan produksi, yang menyebabkan kualitas produk kurang memenuhi syarat.
- Kurangnya informasi di bidang produksi dan pemasaran, utamanya produk agroindustri dan barang kerajinan.
- Masih rendahnya minat investor menanamkan modalnya di Banjarnegara.
- Masih rendahnya daya saing komoditas dan penyesuaian terhadap perubahan pasar dalam negeri maupun global.
- Terbatasnya sarana dan prasarana produksi dan pemasaran.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan masyarakat di bidang industri dan perdagangan yaitu :

- Bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan baku yang berasal dari Kabupaten Banjarnegara utamanya hasil perkebunan, kehutanan, pertanian dan perikanan.
- Bagaimana menemukan inovasi baru dan pengembangan pemasaran, utamanya produk agroindustri dan barang kerajinan rakyat.
- Bagaimana meningkatkan komoditas unggulan yang berorientasi ekspor.
- Bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana transportasi sehingga dapat mendukung kelancaran arus pengangkutan barang.
- Bagaimana upaya meningkatkan daya saing komoditas perdagangan baik ekspor impor maupun domestik dan penyesuaian terhadap perubahan pasar.

Sedangkan tantangan yang dihadapi dalam bidang perdagangan adalah bagaimana memanfaatkan potensi daerah secara optimal. Dengan makin terbukanya sistem perekonomian, maka produk-produk luar daerah maupun produk-produk luar negeri, baik dari segi mutu, harga, jenis maupun pelayanan. Dengan demikian produk-produk Kabupaten Banjarnegara harus memiliki daya saing dalam pemanfaatan potensi pasar yang ada.

Menghadapi persaingan global di bidang industri dan perdagangan yang bertumpu pada mekanisme pasar, maka diperlukan kebijakan pemilihan industri tertentu yang diprioritaskan pada tingkat perusahaan. Dalam hal ini pemerintah dapat

membantu pengembangan produk daerah agar dapat menghasilkan produk unggulan di pasar lokal, nasional maupun pasar global.

Kriteria umum produk yang diprioritaskan harus benar-benar memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, berdampak luas bagi pengembangan sektor lain dan dapat dikembangkan secara ekonomi dan efisien sehingga mampu bertahan.

11. Pariwisata

Obyek wisata yang dikelola di Kabupaten Banjarnegara meliputi Dataran Tinggi Dieng, Paweden, Mrica, dan Seruling Mas. Dilihat dari jumlah pengunjung seluruh obyek wisata yang ada, terdapat peningkatan, yaitu dari 233.353 pengunjung pada tahun 2001 naik menjadi 276.906 pengunjung pada tahun 2005. Akan tetapi apabila dilihat dari pengunjung obyek wisata, maka pengunjung obyek wisata Dataran Tinggi Dieng mengalami penurunan. Misalnya saja, pengunjung obyek wisata Dataran Tinggi Dieng pada tahun 2001 sebanyak 125.049 pengunjung turun menjadi 64.337 pengunjung pada tahun 2005.

Jumlah pengunjung obyek wisata Paweden mengalami peningkatan, yakni dari sebanyak 16.519 pengunjung pada tahun 2001, menjadi 25.624 pada tahun 2005. Pengunjung obyek wisata Mrica sebaliknya, mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yaitu sebanyak 91.785 pengunjung pada tahun 2001, turun menjadi 32.099 pengunjung pada tahun 2005. Untuk obyek wisata Taman Rekreasi Seruling Mas, pengunjungnya juga mengalami penurunan, yaitu sebanyak 301.562 pengunjung pada tahun 2001, turun menjadi 154.846 pengunjung pada tahun 2005.

2.1.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kita sepenuhnya sadar bahwa pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dikatakan masih belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi, serta kehidupan sosial dan budaya. Dunia usaha masih merasakan belum ada manfaat dari hasil berbagai penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan, padahal investasi yang ditanamkan sudah cukup besar. Di sisi lain pasar yang semakin terbuka mendorong persaingan yang semakin ketat di antara pelaku

usaha. Di masa mendatang, pemanfaatan hasil penelitian haruslah ditingkatkan agar menjadi sumber daya pendukung untuk dunia usaha.

Tantangan yang ada dalam bidang pengetahuan dan teknologi adalah memacu pelaksanaan penelitian (riset) untuk pengembangan teknologi, dengan berorientasi pada peningkatan kualitas hasil riset, peluang pemanfaatan dan transfer ke dalam dunia usaha, serta mengutamakan kemitraan dalam pelaksanaannya.

Perlu dipahami bahwa iptek sangat dibutuhkan dalam kehidupan bangsa, maka upaya pembangunan iptek perlu terus diperjelas sasaran dan tujuannya. Sayangnya dari sisi dunia usaha, investasi di bidang penelitian dan pengembangan masih dianggap investasi yang terlalu tinggi dengan hasil yang dianggap belum pasti. Namun demikian hal ini tidak berarti kegiatan ini merupakan tugas pemerintah saja sebagai lembaga riset, peran serta swasta sangat diharapkan keikutsertaannya dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Riset yang dilakukan dalam rangka memecahkan masalah actual dalam dunia usaha biasanya merupakan riset aksi yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung. Jika hal ini dilakukan, maka diharapkan makin mendekatkan antara kebutuhan dunia usaha akan inovasi-inovasi dengan kegiatan riset dan teknologi.

2.1.4 Sarana dan Prasarana

Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya di bidang sosial budaya dan perekonomian pada kurun waktu dua puluh tahun ke depan akan membawa konsekuensi terhadap ketersediaan sarana prasarana wilayah yang memadai. Apabila dilihat kondisi sarana prasarana saat ini, untuk dapat memenuhi cakupan layanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang berkualitas, maka hal tersebut menjadi tantangan yang cukup berat pada masa datang.

Pembangunan di bidang perhubungan, seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat serta perkembangan perekonomian wilayah memiliki banyak tantangan. Tantangan pada tahap awal dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan adalah memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana yang sudah direncanakan sebelumnya yang selanjutnya guna mengembangkan sistem transportasi wilayah yang efisien dan efektif, dapat menjangkau ke seluruh wilayah serta dapat

menghubungkan antara daerah (sentra-sentra) produksi dan daerah pemasaran, serta menghubungkan antar dan intermoda angkutan.

1. Perhubungan

Dilihat dari status jalan yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara terbagi menjadi jalan nasional sepanjang 58,3 KM, jalan propinsi 84,72 KM dan jalan kabupaten sepanjang 772,96 KM. Sedangkan untuk panjang jalan kabupaten yang beraspal sesuai dengan data selalu mengalami penambahan panjang, baik dengan aspal penetrasi maupun hotmix, sehingga untuk kondisi jalan batu maupun tanah dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Kondisi saat ini untuk panjang jalan beraspal sepanjang 623,81 km, kerikil 96,01 KM dan tanah 32 KM.

Untuk mendukung pergerakan atau mobilitas penduduk Kabupaten Banjarnegara didukung oleh perhubungan darat yang dilayani oleh 15 unit terminal, terdiri dari 1 unit terminal kelas A, 5 terminal kelas B dan 9 terminal kelas C. sementara itu jumlah bus antar kota dalam propinsi sebanyak 14 bus.

2. Perumahan dan Permukiman

Pembangunan sarana prasarana perumahan dan permukiman pada kurun waktu dua puluh tahun ke depan ketersediaannya harus mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Memenuhi tuntutan kebutuhan hunian di perkotaan dan perdesaan guna mewujudkan perkotaan dan perdesaan yang bersih dan nyaman sebagai tempat tinggal merupakan tantangan yang dihadapi dalam bidang perumahan. Selain hal tersebut, tantangan dalam penyediaan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan sesuai dengan komitmen *Millenium Development Goal (MDG)* pada tahun 2015 harus mampu memenuhi separo dari kebutuhan cakupan layanan.

Kebutuhan rumah yang merupakan kebutuhan pokok orang hidup, bagi masyarakat Banjarnegara masih cukup banyak. Kebutuhan rumah tersebut sebagian besar dipenuhi oleh masyarakat sendiri, sedangkan perumahan yang dibuat oleh pengembang/ developer masih sangat terbatas jumlahnya.

3. Sumber Daya Air

Tantangan yang berat juga dihadapi dalam pembangunan sarana prasarana sumber daya air dalam rangka menunjang ketahanan pangan dan memenuhi pasokan air baku yang semakin meningkat. Tantangan tersebut meliputi kemampuan menjaga kondisi mantap terhadap prasarana sumber daya air dan pengelolaan jaringan irigasi dengan melibatkan masyarakat, pelestarian, dan mengembangkan sumber-sumber air dan penampungan air, pengendalian daya rusak air, serta terwujudnya kemampuan kelembagaan pengelolaan sarana prasarana sumber daya air.

Keterkaitan yang sangat erat antara pengelolaan irigasi dengan ketersediaan pangan merupakan hal yang tidak bias ditawar lagi. Untuk itu perlu dibangun system irigasi yang baik untuk mendukung struktur pertanian menuju kemandirian pangan di Kabupaten Banjarnegara. Untuk mendukung ketersediaan air pada musim tanam dan perikanan darat maka kebutuhan akan irigasi sangat mutlak diperlukan. Di Kabupaten Banjarnegara saluran irigasi didukung oleh keberadaan Sungai Serayu, Kali Sapi, Gumelem, Kali Piasa, Kali Tulis, Kali Merawu, Kali Pekacangan dan Waduk Mrica.

Data panjang sungai di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005 menunjukkan bahwa Sungai Serayu sepanjang 66 KM, Sungai Piasa sepanjang 49 KM, Sungai Sapi sepanjang 36 KM, Sungai Monda sepanjang 12 KM, Sungai Pager sepanjang 10 KM, Sungai Merawu sepanjang 32 KM, Sungai Pekacangan sepanjang 20 KM, Sungai Gintung sepanjang 30 KM, Sungai Tulis sepanjang 14 KM, Sungai Bojong sepanjang 11 KM, Sungai Penaruban sepanjang 11 KM, Sungai Sibebek sepanjang 13 KM, Sungai Bombong sepanjang 11 KM, dan Sungai Brukoh sepanjang 10 KM.

Sedangkan untuk data panjang dan jumlah saluran irigasi nampak pada tabel berikut

Tabel 7
Data Panjang dan Jumlah Saluran Irigasi di Kabupaten Banjarnegara

No.	Jenis Saluran	Jenis Saluran (m)	
		Primer	Sekunder
1.	Susukan	18.485	10.309

2.	Purwareja Klampok	4.770	400
3.	Mandiraja	16.530	18.500
4.	Purwanegara	14.475	4.834
5.	Bawang	18.058	26.580
6.	Banjarnegara	15.838	20.800
7.	Pagedongan	-	-
8.	Sigaluh	900	19.550
9.	Madukara	13.600	78.640
10.	Banjarmangu	3.760	19.250
11.	Wanadadi	4.420	12.050
12.	Rakit	12.854	1.125
13.	Punggelan	3.600	23.152
14.	Karangkoobar	-	16.240
15.	Pagentan	-	23.450
16.	Pejawaran	3.852	8.700
17.	Batur	-	-
18.	Wanayasa	-	14.850
19.	Kalibening	-	12.744
20.	Pandanarum	-	-

Jumlah bendung didasarkan kepada sumber air yaitu, Serayu, Kali Sapi, Gumelem, Piasa, Tulis, Merawu, Pekacangan dan Waduk Mrica.

4. Telekomunikasi

Untuk menjangkau layanan pos kepada masyarakat di Kabupaten Banjarnegara terdapat 18 kantor pos yang berlokasi di ibu kota kecamatan sehingga diharapkan dapat menjangkau sampai ke pelosok pedesaan dengan cepat, namun seiring dengan perkembangan sektor komunikasi, maka laju perkembangan pos dengan komunikasi berbanding terbalik hal ini ditandai dengan data jumlah pengiriman surat pada tahun 2001 sejumlah 230.252 buah menjadi 96.728 buah pada tahun 2005.

Sarana perhubungan dan komunikasi khususnya jasa pos sangat diperlukan untuk segala kegiatan. Untuk kegiatan surat-menyurat dan paket pos tahun 2003 terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2002. jika dibandingkan dengan tahun 1993 juga terjadi peningkatan, misalnya untuk surat tercatat/terdaftar kirim 18.857 terima 31.514 pada tahun 1993 menjadi kirim 2.138 terima 6.131 pada tahun 1999. terdapat penurunan yang cukup berarti, dan sampai sekarang sudah tidak ada lagi. Untuk surat kilat, kirim 274.040 terima 433.417 pada tahun 1993 menjadi kirim 41.837 terima 69.257 pada tahun 2003. Terdapat penurunan yang cukup signifikan. Penurunan

jumlah pengiriman dan penerimaan surat lewat kantor Pos ini nyata sekali terjadi pada tahun 2002, yaitu ketika jaringan seluler tersedia di beberapa titik di Kabupaten Banjarnegara

Dalam era globalisasi, informasi mempunyai nilai untuk mendorong pertumbuhan serta meningkatnya daya saing. Pengembangan telematika mendatang dihadapkan pada terbatasnya ketersediaan infrastruktur telematika, tidak meratanya penyebaran infrastruktur telematika dengan konsentrasi yang lebih besar di wilayah bawah, terbatasnya kemampuan pembiayaan penyedia infrastruktur telematika dengan belum berkembangnya sumber pembiayaan lain untuk menandai pembangunan infrastruktur telematika seperti kerjasama pemerintah-swasta, pemerintah-masyarakat, serta swasta-masyarakat; dan kurang optimalnya pemanfaatan infrastruktur alternatif lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam mendorong tingkat penetrasi layanan telematika. Rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi pada akhirnya menimbulkan kesenjangan kota besar lainnya.

Sementara itu dalam hal telekomunikasi jumlah pelanggan tahun 2005 sebanyak 4.504 mengalami peningkatan dari tahun 2004 sebanyak 3.912 pelanggan untuk rumah tangga. Seiring dengan perkembangan teknologi maka penggunaan telephone genggam sangat mutlak diperlukan untuk memudahkan akses, komunikasi dan telah menjadi gaya hidup pada sebagian masyarakat Kabupaten Banjarnegara.

Dalam pembangunan telekomunikasi tantangan yang dihadapi adalah :

- mengembangkan jaringan telekomunikasi guna memenuhi cakupan layanan;
- telekomunikasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, baik di perdesaan maupun di perkotaan.

5. Energi

Sumber energi listrik yang ada di Kabupaten Banjarnegara meliputi PLTA Mrica, PLTA Tulis dan 1 PLTU yang terdapat di Dataran Tinggi Dieng. Sumber energi listrik tersebut dapat memberikan jangkauan layanan hingga daerah lain. Dengan demikian seluruh Desa yang ada sebanyak 12 Kelurahan dan 266 Desa dapat dilayani oleh jaringan listrik. Dilihat dari ketersediaan bahan bakar, jumlah SPBU yang ada mengalami peningkatan dari 5 buah menjadi 6 buah pada tahun 2005.

Pada daerah terpencil yang belum atau tidak terjangkau oleh jaringan listrik PLN tetapi memiliki potensi energi terbarukan, dikembangkan listrik pedesaan sebagai sumber energi alternatif untuk pembangkit skala kecil yang berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), di Kabupaten Banjarnegara telah dikembangkan beberapa titik pembangunan PLTMH seperti PLTMH Blimbing, PLTMH Tulis.

Di bidang kelistrikan, permasalahan pokok yang dihadapi antara lain :

- masih besarnya kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan tenaga listrik karena kemampuan investasi dan pengelolaan penyediaan tenaga listrik menurun yang berakibat pada terganggunya kesinambungan penyediaan tenaga listrik termasuk listrik pedesaan;
- lemahnya efektifitas dan efisiensi yang dalam satu dasawarsa terakhir tingkat *losses* masih berada pada kisaran 11-15 persen;
- masih besarnya ketergantungan pembangkit listrik berbahan bakar minyak;
- serta masih dominannya peralatan dan material penunjang yang di impor.

Pemenuhan kebutuhan listrik yang merata dihadapkan pada luasnya wilayah Kabupaten Banjarnegara yang berbukit-bukit menyulitkan pengembangan sistem kelistrikan yang optimal, pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik yang tinggi setiap tahun, serta daya beli masyarakat yang masih rendah.

2.1.5 Politik dan Tata Pemerintahan

Pembangunan politik di Kabupaten Banjarnegara merupakan bagian integral dari pembangunan politik Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Stabilitas politik yang mantap telah menciptakan iklim kondusif bagi perkembangan aspek pembangunan yang lain. Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2005 telah berhasil melaksanakan pemilihan bupati/wakil bupati dengan sukses.

1. Politik

Partai politik (Parpol) peserta pemilu yang memiliki wakil di DPRD Kabupaten Banjarnegara sebanyak 9 Parpol, wakil terbanyak dipegang PDIP dengan 14 anggota, Golkar dengan 10 anggota, disusul berturut-turut PKB dengan 6 anggota, PAN dan PPP

masing-masing 5 anggota, PKS 2 anggota serta PD, PPDK dan PBR masing-masing 1 anggota.

Partisipasi dan kesadaran politik masyarakat Kabupaten Banjarnegara masih perlu mendapatkan perhatian terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik.

Demikian pula terkait dengan pengetahuan dan kesadaran politik bagi masyarakat perdesaan, kaum perempuan dan pemilih pemula. Meskipun pengelolaan tata pemerintahan sudah diupayakan peningkatannya, namun masih dirasakan kualitas pelayanan publik belum optimal.

2. Pemerintahan

Dilihat secara administratif Kabupaten Banjarnegara terdiri atas 20 kecamatan, 266 Desa dan 12 Kelurahan. Pembangunan maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Salah satunya yang berpengaruh pada keberhasilan pembangunan dan pelayanan tersebut adalah tersedianya aparatur yang memadai baik kuantitas maupun kualitas.

2.1.6 Keamanan dan Ketertiban

Pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat telah dapat diwujudkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Keberhasilan pembangunan di bidang tersebut dirasakan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Rasa aman yang dirasakan masyarakat tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan pemerintah melalui berbagai sistem keamanan.

Sebagai aparat tingkat paling bawah dalam pencegahan rawan keamanan dan ketertiban umum, peran Hansip pada masa sekarang sangat dibutuhkan, apalagi mengingat kondisi geografis Kabupaten Banjarnegara yang beragam, terutama dalam mendeteksi secara dini adanya bencana alam, gangguan tramtib di lingkungan masing-masing. Secara keseluruhan jumlah Hansip di Kabupaten Banjarnegara adalah sebanyak 9.287 orang. Terdiri dari 9226 Hansip laki-laki (99,34 %) dan 61 orang (0,66 %) Hansip Wanita.

Jumlah kriminal dalam tahun 2005 tercatat 104 kasus, ini lebih tinggi bila

dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 65 kasus hal ini dimungkinkan karena adanya jumlah pengangguran yang makin meningkat akibat krisis ekonomi. Untuk kejadian bencana dan yang paling memprihatinkan terjadi di Kabupaten Banjarnegara adalah terjadinya tanah longsor di Dusun Gunung Raja Desa Sijeruk Kecamatan Banjarmangu yang menimbulkan korban 76 orang meninggal dunia dan 14 orang dinyatakan hilang.

Meskipun iklim keamanan dan ketertiban masyarakat dirasakan cukup kondusif, namun demikian masih terjadi beberapa gangguan keamanan dan ketertiban di beberapa kecamatan.

2.1.7 Hukum dan Aparatur

Agenda utama reformasi adalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan penegakan hak azasi manusia (HAM). Sampai saat ini pemberantasan KKN dan penegakan HAM tersebut dirasa masih belum seperti yang diharapkan masyarakat seperti tujuan hukum itu sendiri yaitu adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Merubah suatu budaya yang telah mengakar kuat bukanlah pekerjaan mudah yang dapat dilakukan dalam sekejap. Hal tersebut memerlukan waktu dan komitmen yang sungguh-sungguh. Pergantian orde biasanya mengandung suatu resistensi.

Pada masa resistensi perubahan yang dilakukan biasanya baru pada sekumpulan upaya-upaya mikro yang cenderung bersifat sporadik, tidak terjadual dan tanpa terkoordinasi. Meskipun sebenarnya payung untuk upaya makro tersebut telah disediakan yaitu dalam bentuk Tap MPR No. 11/1998 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Agar perubahan yang hendak dilaksanakan efektif, maka perlu dikembangkan suatu rencana menyeluruh, terjadual dan transparan. Publik diperlukan perannya sebagai kontrol yang positif untuk menilai kinerja Pemerintah dalam upaya memberantas KKN, menegakkan HAM, mewujudkan penegakan dan pembaharuan hukum secara demokratis, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai

pihak berpendapat bahwa lemahnya upaya penegakan hukum berdampak negatif terhadap pemulihan ekonomi dan pengembangan demokrasi.

Perubahan masyarakat yang begitu cepat di berbagai bidang berdampak kepada tidak relevannya peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini, seperti peraturan-peraturan tentang bisnis, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu komitmen untuk sebuah perubahan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan perkembangan masyarakat dewasa ini merupakan kebutuhan masyarakat yang perlu mendapat jawaban.

Dewasa ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perlu diberi gerak yang memadai agar memiliki ciri kepribadian yang bebas dan mandiri. Namun harus dihindari pemanfaatan lembaga ini untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang merugikan kepentingan masyarakat luas. Untuk itu perlu meningkatkan profesionalismenya sehingga dapat meningkatkan perannya sebagai salah satu motor penggerak penegakan HAM, demokrasi, hukum dan aparat pemerintah yang bersih (*clean governance*).

Pemerintah yang baik (*clean governance*) sendiri senantiasa harus dilandasi dengan beberapa unsur dasar yaitu : (1) Penghormatan terhadap HAM; (2) Transparansi penyelenggaraan pemerintah; (3). Pemerintahan yang mengembangkan partisipasi masyarakat; (4). Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; (5). Penegakan hukum yang mantap; (6). Pengembangan sikap profesionalitas.

Upaya penegakan hukum dan perwujudan supremasi hukum selama ini selalu menjadi sorotan masyarakat. Kebanyakan orang masih menganggap bahwa aparat yang baik, supremasi hukum, dan peradilan yang bersih masih merupakan slogan saja. Pada prakteknya di lapangan masih menghadapi kendala seperti kurangnya sarana, kualitas SDM yang terbatas, sistem yang kurang memadai, dan kultur yang tidak mendukung.

Apabila aparat yang baik, supremasi hukum, dan peradilan yang bersih tidak pernah terwujud akan berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Selama ini masih sering dijumpai kualitas SDM yang belum memadai, tindakan yang kurang profesional, perilaku sewenang-wenang dan pengabdian nilai-nilai dasar hak azazi manusia. Masih diberlakukannya perayuran

perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat dewasa ini.

1. Hukum

Sebagai tolak ukur dan acuan dalam melaksanakan tertib pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dibutuhkan peraturan daerah untuk pegangan setiap aparatur Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, sampai dengan tahun 2005, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banjarnegara telah berhasil mengesahkan 181 Peraturan Daerah, yang diharapkan dapat memberikan arahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjarnegara.

Dalam rangka implementasi otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) yang dibuat oleh Desa untuk mengatur pemerintahan di masing-masing Desa, serta melakukan pengawasan represif terhadap Peraturan Desa melalui lembaga teknis Daerah yaitu Bawasda Kabupaten Banjarnegara dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Banjarnegara.

Kasus pelanggaran hukum pidana yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2005 tercatat sebanyak 65 kasus, mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2002 sebanyak 144 kasus. Sementara jumlah kasus pidana yang dapat diselesaikan sebanyak 132 perkara, pada tahun 2002 dilihat dari kelembagaan di Kabupaten Banjarnegara terdapat 1 buah Pengadilan Agama, 1 buah Pengadilan Negeri, 1 buah Lembaga Pemasyarakatan dan 1 buah Kejaksaan Negeri.

2. Aparatur

Sehubungan dengan tuntutan perubahan dari sisi regulasi dan perkembangan pemerintahan dan kemasyarakatan, pemerintah kabupaten melakukan langkah-langkah penyesuaian dan penataan terhadap urusan atau fungsi yang menjadi kewenangannya. Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi dan melakukan penataan terhadap organisasi perangkat Daerah, disesuaikan dengan urusan dan fungsi yang sudah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah berusaha menyelenggarakan pemerintahan secara efektif dan efisien, melalui optimalisasi

peningkatan kapasitas pemerintah Daerah.

Peningkatan kapasitas pemerintah Daerah yang sudah dan akan terus dilakukan antara lain terkait dengan peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, profesionalisme aparatur pemerintah serta pengembangan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara didukung oleh 9370 PNS (2005) dengan kualifikasi menurut pendidikan yang ditamatkan berturut-turut adalah tamat/tidak tamat SD sebanyak (249) SLTP (467) SMU (1921) Diploma 1 (3579) Diploma 3 (546) Sarjana (2042) Pasca Sarjana (87). Dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur telah diselenggarakan pendidikan dan pelatihan, baik teknis maupun fungsional.

2.1.8 Wilayah, Tata Ruang dan Pertanahan

Kerjasama sinergitas pengelolaan potensi merupakan tantangan pembangunan perwilayahan ke depan yang secara konsisten terus dilaksanakan. Hal tersebut mengingat semakin terbatasnya sumber daya alam dan adanya arus perdagangan bebas yang semakin kuat sehingga kawasan strategis perlu didorong dan diperkuat eksistensinya.

Meningkatnya dinamika dan aktivitas penduduk sejalan dengan semakin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, pengaruh arus perdagangan bebas, dan penurunan kualitas sumber daya alam. Dalam kondisi seperti ini ruang akan menjadi komoditi yang sangat strategis. Untuk itu, pelaksanaan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan yang diimbangi dengan konsistensi dan komitmen dalam pengendalian serta penegakan hukum merupakan tantangan ke depan yang harus dihadapi dan dipersiapkan bersama dengan seluruh *stakeholders* .

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan ruang, maka kebutuhan akan lahan juga meningkat pula, sehingga tantangan yang dihadapi pada bidang pertanahan adalah peningkatan pelayanan administrasi pertanahan yang berpihak pada kepentingan masyarakat yang telah mulai dirintis saat ini melalui sistem

manajemen pertanahan berbasis masyarakat.

1. Wilayah

Secara geografis Kabupaten Banjarnegara terletak antara 7^o12'-7^o31' Lintang Selatan dan 109^o29'10' - 109^o45'50' Bujur Timur. Berada pada ketinggian yang bervariasi antara 44-1633 M di atas permukaan air laut, beriklim tropis dengan temperatur rata-rata antara 20^o - 26^oC. Dengan temperature terdingin pada musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng mencapai 18^o sampai 3^oC dengan kelembaban berkisar antara 84 %-85%.

Secara administratif Kabupaten Banjarnegara dibatasi oleh :

- Sebelah Utara : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang
- Sebelah Timur : Kabupaten Wonosobo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kebumen
- Sebelah Barat : Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banjarnegara memiliki luas wilayah ± 106.970,997 Ha atau sekitar 3,29% dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah (3,25 Ha). Berdasarkan bentuk tata alam dan penyebaran Geografi dapat digolongkan menjadi :

- *Bagian Utara*, yang terdiri dari daerah pegunungan dan relatif bergelombang dan curam, bagian ini meliputi wilayah Kecamatan Kalibening, Wanayasa, Karangobar, Pagentan, Pejawaran, Batur, Madukara, Banjarmangu, Punggelan dan Kecamatan Pandanarum.
- *Bagian Tengah*, yang terdiri dari wilayah dengan relatif datar, merupakan lembah Sungai Serayu yang subur mencakup sebagian wilayah Kecamatan Madukara, Banjarnegara, Bawang, Purwanegara, Mandiraja, Purwareja Klampok, Susukan, Rakit, dan Kecamatan Wanadadi.
- *Bagian Selatan*, terdiri dari wilayah dengan relatif curam, merupakan bagian dari Pegunungan Serayu Selatan. Bagian ini meliputi Kecamatan Sigaluh, sebagian Kecamatan Banjarnegara, Bawang, Purwanegara, Pagedongan, Mandiraja dan Kecamatan Susukan.

Berdasarkan ketinggian tempat di atas permukaan air laut, wilayah Kabupaten Banjarnegara dapat dibedakan :

- Kurang dari 100 M di atas permukaan laut, meliputi 9.82% dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, yaitu meliputi Kecamatan Purwareja Klampok, sebagian Kecamatan Susukan, Mandiraja, Purwanegara dan Kecamatan Bawang.
- Antara 100 - 500 M di atas permukaan laut, meliputi 37,04% dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, yaitu Kecamatan Wanadadi, Rakit, Punggelan, Madukara, dan sebagian Kecamatan Susukan, Mandiraja, Purwanegara, Bawang, Banjarmangu, dan Kecamatan Banjarnegara
- Antara 500 - 1000 M di atas permukaan laut, meliputi 28,74% dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, yaitu Kecamatan Sigaluh dan sebagian Kecamatan Banjarnegara, Pagedongan dan Kecamatan Banjarmangu.
- Lebih dari 1.000 M di atas permukaan laut, luasnya 24,40% dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara yang meliputi Kecamatan Karangobar, Wanayasa, Kalibening, Pandanarum, Pejawaran dan Kecamatan Batur.

2. Tata Ruang

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara sebagai bagian dari tata ruang Provinsi Jawa Tengah dan wilayah nasional merupakan satu kesatuan ruang wilayah NKRI, meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk di dalamnya bumi maupun berbagai sumber daya yang harus dikelola secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna secara berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial sesuai UUD 1945.

Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRWP) Kabupaten Banjarnegara dengan rentang waktu rencana selama 10 tahun serta rencana tata ruang penjabarannya, meskipun disadari bersama bahwa pengelolaan penataan ruang belum dapat berjalan secara optimal. Kondisi tersebut terjadi terutama karena rencana tata ruang yang merupakan matra ruang dari pembangunan daerah belum optimal dapat saling bersinergi dengan rencana pembangunan lainnya, daya dukung/daya tampung lingkungan terutama dalam keterkaitan dengan kerentanan terhadap bencana belum mendapat perhatian yang cukup, aspek keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan masih belum diutamakan dibandingkan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek dan kepentingan sektoral. Hal tersebut

ditambah dengan masih rendahnya peran serta dan pemahaman pelaku pembangunan dalam penataan ruang, perkembangan peraturan terkait serta tingginya dinamika perubahan pemanfaatan ruang yang berakibat pada alih fungsi lahan.

Melihat perkembangan perubahan tata guna lahan yang marak terjadi pada saat ini perlu menjadi perhatian kedepan terutama dengan berkurangnya tanah sawah dan hutan yang kedepan berpotensi akan semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur dan degradasi lingkungan.

Mendasarkan pada kondisi di atas sebagai titik tolak dasar kesinambungannya dan konsistensi terhadap pemanfaatan ruang kedepan, maka beberapa aspek penataan keruangan yang perlu mendapatkan perhatian untuk dua puluh tahun yang akan datang antara lain peningkatan dan pengembangan fungsi kawasan lindung, kawasan rawan bencana alam, kawasan budi daya, kawasan prioritas konservasi, kawasan pariwisata, kawasan cagar budaya Dieng, kawasan kerja sama antardaerah dan perbatasan antarkabupaten, dan pengembangan infrastruktur.

Dilihat dari sisi tata ruang, Kabupaten Banjarnegara terbagi menjadi kawasan lindung, kawasan permukiman, kawasan industri lahan pertanian produktif dan lahan kritis.

3. Pertanahan

Berdasarkan data tahun 2005 pembedaan tanah di Kabupaten Banjarnegara diurutkan dari penggunaan lahan yang terbesar adalah 46% untuk tegal dan kebun, 15% untuk bangunan dan pekarangan, 15% untuk hutan negara, 15% untuk lahan sawah, 4% untuk lainnya, 3% untuk hutan rakyat, kolam, tebat, empang dan 2% untuk perkebunan, sedangkan untuk jumlah tanah yang telah bersertifikat sejumlah 1.669 buah (2001) meningkat menjadi 3.115 (2005).

Kemiringan Tanah

Dari segi kemiringan tanah, Kabupaten Banjarnegara dapat dibedakan menjadi 3 wilayah, yaitu :

- Antara 0-15⁰ meliputi luas 24,61% dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara yang meliputi Kecamatan Susukan, Purwareja Klampok, Mandiraja, Purwanegara, Bawang, Rakit dan Kecamatan Wanadadi.
- Antara 15-40⁰ meliputi luas 45,04% dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara yang meliputi Kecamatan Madukara, Banjarmangu, Banjarnegara, Pagedongan, Punggelan dan Kecamatan Sigaluh.
- Lebih 40⁰ meliputi luas 40,35% dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara yang meliputi sebagian Kecamatan Pagentan, Kalibening, Karangkoar, Pandanarum, Wanayasa dan Kecamatan Batur.

Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Banjarnegara meliputi :

- Tanah Alluvial dengan assosiasinya kelabu, coklat dan hitam, sifatnya beraneka ragam. Produktivitas tanah rendah hingga tinggi dapat dipergunakan untuk pertanian dan permukiman. Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Batur, Karangkoar, Purwareja Klampok dan Wanadadi. Jenis tanaman yang dapat tumbuh pada tanah ini tergantung pada derajat keasaman (PH) tanah dari sedikit asam, netral sampai basa. Luas tanah meliputi 5,40% dari luas Kabupaten Banjarnegara.
- Tanah Losotol, berassosiasi dengan andosol, sifatnya agak asam hingga netral, warna beraneka ragam, kelabu, coklat, hitam dan coklat kemerah-merahan. Produktivitas tanah sedang hingga tinggi, dapat dipergunakan untuk pertanian, kebun campuran, hutan dan sayur-sayuran. Jenis tanah ini terdapat di kecamatan Susukan, Purwareja Klampok, Purwanegara, Wanadadi, Rakit, Bawang, Sigaluh, Madukara, Banjarnegara, Pagedongan, Wanayasa, Pejawaran dan Kecamatan Pagentan.
- Tanah Andosol, assosiasinya berwarna coklat, coklat kekuning-kuningan bersifat netral sampai asam. Produktivitas tanah sedang hingga tinggi, dapat dipergunakan untuk Tegalan, kebun campuran dan hutan. Jenis tanah tersebut terdapat di Kecamatan Kalibening, Pandanarum, Wanayasa, dan Kecamatan Batur seluas 14,50% dari luas Kabupaten Banjarnegara.

- Tanah Grumosol, assosiasinya dengan tanah mediteran, bersifat agak netral, warna kelabu hingga hitam sedang dapat digunakan untuk sawah dan tegalan. Jenis tanah ini meliputi Kecamatan Purwonegoro, Mandiraja, Kalibening, Pungelan, Karangobar, Pagentan, anjarnegara, Pagedongan yang luasnya meliputi 11,72% dari luas Kabupaten Banjarnegara.
- Tanah Orgasol, yaitu tanah bersifat asam, berwarna hitam. Terdiri dari sisa rumput/tumbuh-tumbuhan yang membusuk. Tanah tersebut terdapat di sekitar Telaga di Kecamatan Batur yang luasnya 0,50% dari luas Kabupaten Banjarnegara.
- Tanah Litosol, tanah beraneka sifat warnanya. Jenis tanah ini kurang baik untuk pertanian. Terdapat di Kecamatan Banjarnegara, Pagedingan dan Punggelan, meliputi luas 1,56% dari luas Kabupaten Banjarnegara.

Penggunaan Lahan

Kabupaten Banjarnegara memiliki luas wilayah $\pm 106.970,997$ Ha. Berdasarkan tata guna lahannya dirinci sebagai berikut :

a. Lahan Sawah	: 16.024 Ha
- Lahan Irigasi Teknis	: 6.768 Ha
- Lahan Irigasi ½ Teknis	: 710 Ha
- Lahan Irigasi Sederhana	: 2.158 Ha
- Lahan Irigasi Desa/Non PU	: 1.783 Ha
- Lahan Tadah Hujan	: 4.605 Ha
- Lebak/Polder, Lainnya	: - Ha
b. Lahan bukan sawah	: 90.947 Ha
- Bangunan/Pekarangan/Halaman	: 15.651 Ha
- Tegala/Kebun	: 50.151 Ha
- Kolam/Tebat/Empang	: 433 Ha
- Hutan Rakyat	: 1.903 Ha
- Hutan Negara	: 16.563 Ha
- Perkebunan (Negara/Swasta)	: 2.049 Ha
- Lainnya	: 4.197 Ha

Jika dibandingkan dengan data pada tahun 1995, maka terdapat konversi lahan dari lahan sawah menjadi lahan bukan sawah sebesar 578 Ha, dan perubahan ini

diperkirakan akan terus berjalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan munculnya industri-industri, bangunan perumahan dan bangunan pemerintahan dan sosial.

2.1.9 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sumberdaya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penompang system kehidupan. Peranan sumber daya alam dapat dilihat dari sumbangan sektor Pertambangan/Penggalian dan sektor Listrik, Gas & Air Minum terhadap PDRB Kabupaten Banjarnegara yang pada tahun 2003 mencapai 0,90 persen dan penyerapan tenaga kerja mencapai 1,07 persen. Namun, di lain pihak keberlanjutan atas tersediannya sering diabaikan sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumberdaya alam menipis. Dalam 20 tahun mendatang dimungkinkan terjadi kekurangan air khususnya di wilayah selatan Kabupaten Banjarnegara dan secara keseluruhan kemungkinan terjadi kurang terpenuhinya kebutuhan pangan secara lokal. Hal tersebut merupakan ancaman dan menjadi tantangan pembangunan daerah jangka panjang yang harus diantisipasi secara dini agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat.

Kabupaten Banjarnegara juga mempunyai berbagai sumberdaya air yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan rumah tangga, irigasi/pertanian, industri maupun untuk kebutuhan pembangkit tenaga listrik dan kebutuhan lainnya. Terdapat 3 sumber, yaitu : air hujan, air permukaan, dan air tanah.

Air tanah. Sebagai salah satu pensuplai sumberdaya air adalah curah hujan, yang di Kabupaten Banjarnegara termasuk kategori sedang, yang mampu menyediakan cadangan air sebesar 4.937.781.221 m³ per tahun.

Air Permukaan. Sumber air permukaan pada umumnya berasal dari sungai-sungai Serayu, Sungai Tulis, Sungai Serawu, sungai Pekacangan, Sungai Urang, Sungai Sapid an Sungai Gintung. Sungai-sungai besar dan anak-anak sungai tersebut secara keseluruhan merupakan satu kesatuan Wilayah Daerah aliran Sungai (DAS) Serayu. Di samping lain sungai-sungai sebagai sumber air di Kabupaten Banjarnegara juga terdapat sumber lain berupa telaga / waduk seperti :

- Telaga Berkembang

- Telaga Merdada dan
- Waduk Panglima Besar Soedirman.

AirTanah. Sebagai sumber air bersih yang terdiri dari air tanah dangkal, air tanah sedang/tekanan artesis dan air dalam. Diperkirakan dapat menyediakan cadangan air sebesar 17.925.120 m³ per tahun.

Dari data yang ada maka besarnya cadangan air yang tersedia di Kabupaten Banjarnegara adalah sebesar 7.785.802.912 m³ per tahun, yang terdiri dari :

- Curah Hujan : 3.088.249.883 m³
- Air Permukaan : 4.679.672.909 m³
- Air Tanah : 17.929.120 m³

2.2 TANTANGAN

Di dalam perjalanan perkembangannya banyak kemajuan yang telah dicapai akan tetapi juga masih banyak pula tantangan atau masalah ke depan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Untuk itu perlu upaya-upaya penanganan dalam pembangunan Daerah selama 20 tahun ke depan, baik bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), politik, keamanan dan ketertiban, hukum dan aparat, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.

2.2.1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Tantangan pembangunan pada bidang sosial budaya dan keagamaan meliputi sektor ketenagakerjaan tantangan yang dihadapi adalah menyeimbangkan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja dan ketersediaan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran. Penduduk atau sumber daya manusia merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan. Salah satu tantangan yang dihadapi Kabupaten Banjarnegara adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga belum mampu mendukung pelaksanaan pembangunan secara optimal.

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas sumber daya antara

lain mencakup ketersediaan aksesibilitas, pemerataan dan mutu pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan serta tingkat relevansi pendidikan yang saat ini kondisinya masih rendah. Ketersediaan tenaga pendidikan dan kesehatan juga masih menjadi tantangan dalam rangka meningkatkan layanan. Merebaknya berbagai penyakit menular termasuk HIV/AIDS, Flu Burung, Gizi Buruk serta kasus kekurangan energi dan protein masih memerlukan penanganan yang lebih optimal. Tidak kalah pentingnya adalah penguatan sumber daya manusia di dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Budaya baca bagi sebagian besar masyarakat masih perlu ditingkatkan, sehingga mampu mengikuti perkembangan informasi dan tidak ketinggalan dari dinamika masyarakat global.

Pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan masih dihadapkan pada rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan, minimnya fasilitas sarana dan prasarana untuk kegiatan pemuda dan olah raga.

Terkait dengan keberadaan penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara jumlahnya relatif banyak, hal ini yang menyebabkan Kabupaten Banjarnegara menjadi tertinggal. Salah satu indikatornya selain indikator Pendidikan dan indikator Kesehatan adalah aksesibilitas masyarakat menuju pusat pendidikan dan kesehatan yaitu jalan dan jembatan jumlahnya masih terbatas (belum keseluruhannya beraspal), selain itu juga pemukiman penduduk terutama di wilayah pedesaan masih belum memenuhi standar rumah sehat sederhana.

Di bidang kebudayaan, tantangan ke depan yang dihadapi adalah menipisnya nilai moral, budaya, dan agama, sebagai akibat dampak negatif perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, serta eksis dari ketimpangan kondisi sosial ekonomi serta pengaruh globalisasi. Tantangan lain di bidang sosial budaya yang tak dapat dikesampingkan adalah terpeliharanya kearifan lokal dalam peradaban, harkat, dan martabat manusia, serta penguatan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Pembangunan pemberdayaan perempuan masih dihadapkan pada ketimpangan keadilan gender di berbagai bidang, utamanya pada akses di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan ekonomi. Pada sisi lain rendahnya indeks pembangunan gender meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan

dan anak, eksploitasi, perdagangan orang dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, serta kurang terpenuhinya hak-hak dasar, kesejahteraan dan perlindungan anak ke depan juga masih menjadi tantangan.

2.2.2 Ekonomi

Pembangunan ekonomi Kabupaten Banjarnegara sampai saat ini telah menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan, namun masih belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan secara memadai. Oleh karena itu, tantangan pembangunan ekonomi pada dua puluh tahun ke depan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas yang mampu meningkatkan pendapatan perkapita serta pemerataan sehingga secara bertahap kesejahteraan masyarakat pada akhir periode pembangunan dapat mencapai tingkat kesejahteraan .

Pembangunan berbasis kewilayahan yang telah dilaksanakan selama ini telah dapat mendorong kerja sama pembangunan antardaerah secara sinergis, sehingga dapat mendorong daya saing wilayah. Tantangan pembangunan kewilayahan ke depan adalah meningkatnya kesenjangan pembangunan antar kecamatan akibat bervariasinya dan terbatasnya potensi sumber daya alam daerah, mengingat Kabupaten Banjarnegara memiliki topografi yang beragam, jadi pembangunannya menyesuaikan karakteristik daerah tersebut. Oleh karena itu perlu diupayakan pengembangan berbagai potensi daerah termasuk pengembangan sumber energi alternatif, seperti pembangunan Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLMTH), Selain itu tantangan dalam bidang ekonomi lainnya adalah mengantisipasi terjadinya perubahan karakteristik pembangunan ekonomi yang tidak memandang karakteristik lokal, seperti yang berorientasi agraris menjadi orientasi industri, hal ini perlu disikapi dengan arif dan bijak, sehingga tidak akan mengganggu keseimbangan ketahanan pangan. Pembangunan sektor jasa juga masih mengalami kendala seperti keterbatasan modal, dan pasar untuk memasarkan sektor-sektor jasa yang menjadi bidangnya.

Pada sisi lain, makin intensifnya pasar bebas/globalisasi menuntut peningkatan kualitas produk barang dan jasa secara lebih kompetitif. Untuk itu, dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produk-produk

lokal di pasar regional ataupun global, tantangan ke depan adalah meningkatkan kualitas dan produktivitas barang dan jasa secara bertahap dengan tetap mengacu pada Standar Mutu Nasional maupun Standar Mutu Internasional.

Meningkatnya jumlah penduduk, alih fungsi lahan, eksplorasi lahan secara berlebihan, dan terjadinya berbagai bencana alam dapat mengganggu ketahanan pangan wilayah dan masyarakat. Tantangan ke depan adalah mengantisipasi, mengendalikan, dan mengurangi secara bertahap permasalahan-permasalahan di atas, serta terus berupaya meningkatkan produktivitas hasil-hasil pertanian secara berkelanjutan.

Kemampuan SDM, finansial dan peralatan lokal belum mampu untuk melakukan eksplorasi baha tambang yang ada di Banjarnegara secara besar-besaran, maka peluang tersebut terbuka untuk pihak asing untuk melakukan eksplorasi namun dengan tidak meninggalkan konserfasi terhadap lingkungan dan pencemaran. Di samping itu membanjirnya produk-produk dari luar negeri yang murah di banding produk dalam negeri juga memberikan pukulan terhadap pengusaha kecil/ menengah domestik karena kalah bersaing terhadap murahnya harga produk barang/ jasa yang dihasilkan.

2.2.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Tantangan bagi Kabupaten Banjarnegara di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 20 tahun ke depan dan perlu untuk segera dibuat dasar atau landasan yang kuat untuk mengantisipasi kuatnya arus globalisasi dan moderenisasi, yang tidak mungkin di hindari, adalah dengan mempersiapkan manusia Banjarnegara yang memiliki kualitas dan kemampuan untuk mengaplikasikan dan mengoperasikan berbagai piranti dan perangkat teknologi, meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, dan memberikan kesempatan dan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat Banjarnegara tentang informasi teknologi termasuk pemanfaatannya untuk kepentingan bersama.

Bagi aparaturnya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara harus terus ditingkatkan kualitas dan kuantitas mutu pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi secara efisien dan seefektif mungkin untuk mendukung pelayanan prima, namun

kendala pendanaan dan kemampuan untuk pemanfaatan teknologi tersebut sangatlah besar mengingat teknologi baru biasanya membutuhkan dana mahal. Namun kendala tersebut dapat diatasi dengan menggandeng seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan Istitusi penelitian serta dunia perguruan tinggi untuk memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.4 Sarana dan Prasarana

Keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, dan pelayanan lainnya menyebabkan masyarakat Kabupaten Banjarnegara mengalami kesulitan untuk melakukan aktifitas ekonomi dan sosial.

Minimnya infrastruktur jalan, komunikasi dan transportasi yang tersedia menyebabkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sangat terbatas, selain itu , dari aspek ekonomi, kondisi yang demikian juga menyebabkan terbatasnya akses masyarakat terhadap pasar maupun pusat pertumbuhan ekonomi yang ada, sehingga peluang sedikitnya informasi pasar yang diperoleh masyarakat terpencil sangat kecil, hal ini sangat merugikan masyarakat.

Minimnya infrastruktur pendidikan, terutama distribusinya menyebabkan penduduk usia sekolah pada wilayah-wilayah kecamatan tertentu tidak dapat terlayani, terutama untuk pendidikan setingkat SMP dan SMU. Distribusi infrastruktur di tingkat SMP dan SMU menurut kecamatan menunjukkan ketimpangan yang cukup parah sebagai contoh untuk SMU,SMK dan MAN di Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Bawang, Kecamatan Sigaluh berjumlah 17 buah sekolah sedangkan di Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Kalibening dan Kecamatan Pandanarum hanya berjumlah 3 buah sekolah setingkat SMU,MAN dan SMK sehingga bagi anak-anak yang berdomisili jauh dari infrastruktur pendidikan yang ingin melanjutkan pendidikan /sekolahnya, akan terkendala oleh biaya transportasi. Selain itu jumlah sekolah kejuruan pada tingkat SLTA juga sangat sedikit sehingga permintaan tenaga kerja terampil berpendidikan tidak dapat dipenuhi secara baik.

Dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, dalam menunjang pelayanan kesehatan masyarakat, di Kabupaten Banjarnegara juga mengalami hal yang serupa yaitu minimnya distribusi pemerataan fasilitas kesehatan, sehingga

keterjangkauan masyarakat sangat rendah, sehingga untuk menanganai ataupun mengantisipasi terhadap suatu kasus penyakit menjadi terkendala, yang berakibat mahalnya biaya kesehatan, yaitu pada sisi transportasinya.

Untuk mengakses ke fasilitas-fasilitas tersebut diatas diperlukan adanya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah berusaha membuka simpul-simpul keterisolasian melalui pembangunan sarana jalan dan jembatan baik jalan Kabupaten maupun jalan desa. Dalam konteks pembangunan jalan desa, Pemerintah Daerah memberikan bantuan aspal kepada desa-desa sebagai stimulan. Dengan cara ini, program pembangunan jalan desa sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 telah berhasil membangun jalan desa sepanjang 177,614 Km. meski demikian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengakui bahwa masih banyak daerah sulit yang belum bisa terjangkau untuk dilakukan pengerasan dan pengaspalan jalan karena minimnya dana yang tersedia, oleh karena itu, penanganan infrastuktur jalan dan jembatan menuju daerah yang sulit masih sangat diperlukan terutama melalui program tahunan.

Pembangunan sarana air bersih sangat dibutuhkan mengingat dengan kondisi topografi kabupaten yang beragam, ada daerah yang ketersediaan akan air bersih mencukupi bahkan melimpah, namun ada daerah yang sulit memperoleh air bersih sehingga perlu difokuskan pembangunannya ke daerah-daerah tersebut. Selama ini telah dibangun infrastruktur sarana air bersih di tingkat pedesaan, namun dari yang telah dibangun tersebut masih dirasakan ada daerah tertentu , terutama di wilayah tipologi pengunungan selatan, sulit memperoleh air bersih karena tidak tersedianya potensi sumber-sumber air permukaan yang bisa dimanfaatkan untuk mencukupi air bersih, sedangkan inventarisasi atau pemetaan potensi sumber-sumber air baik permukaan maupun air bawah tanah belum tersedia sehingga layanan air bersih kepada masyarakat yang memerlukan air bersih belum dapat dipenuhi.

Pembangunan sarana irigasi masih terbatas pada pembangunan irigasi sederhana, sedangkan irigasi yang ada di Kabupaten Banjarnegara baik primer maupun sekunder adalah warisan dari Pemerintahan Belanda ataupun era orde baru yang kondisinya memerlukan perbaikan dan perawatannya yang memerlukan biaya yang sangat besar. Pembangunan daerah irigasi diprioritaskan kepada daerah yang memiliki potensi sumber

air karena irigasi sangat bergantung pada ketersediaan potensi air. Tidak semua wilayah di tipologi pegunungan utara di Kabupaten Banjarnegara dapat dibangun jaringan irigasi meski itu irigasi sederhana, dengan demikian hal ini akan berpengaruh kepada sektor pertanian maupun perikanan.

Pembangunan sarana prasarana perumahan dan permukiman pada kurun waktu dua puluh tahun ke depan ketersediaannya harus mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Memenuhi tuntutan kebutuhan hunian di perkotaan dan pedesaan guna mewujudkan perkotaan dan pedesaan yang bersih dan nyaman yang harus disesuaikan dan direncanakan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta untuk pembangunan kota harus berdasarkan Rencana Tata Ruang Kota sehingga laju pertumbuhan dan perkembangan pemukiman dapat di kendalikan.

2.2.5 Politik dan Tata Pemerintahan

Tantangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan di bidang politik dan tata pemerintahan adalah dengan semakin banyaknya jumlah partai politik yang ada dan berkecimpung di dalam dunia perpolitikan Indonesia, dikarenakan semangat untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat mereka masing-masing, di satu sisi akan memberikan keuntungan yang besar kepada masyarakat karena akan memberikan kesempatan dan akses yang seluas-luasnya dalam beraspirasi dan berdemokrasi yang semata-mata dilakukan untuk kepentingan masyarakat banyak dan kesejahteraan seluruh umat, namun apabila hal tersebut tidak di sikapi dan dimaknai oleh seluruh pelaku partai politik ataupun perorangan dalam politik secara arif dan bijaksana, maka dengan semakin banyaknya partai politik akan semakin memunculkan kerawanan akan konflik yang bakal terjadi terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah Baik Bupati ataupun Gubernur, pemelihan calon legislatif yang akan duduk di kursi DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi maupun DPR RI serta pemilihan Presiden, hal ini dikarenakan timbulnya kepentingan untuk berkuasa secara buta, yang akhirnya masyarakat juga yang akan bentrok dan tujuan berdemokrasi tidak tercapai.

Dengan adanya semangat Otonomi Daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah

Kabupaten Banjarnegara dituntut untuk dapat berkompetisi dan bersaing dengan Kabupaten/Kota yang lain dalam mengembangkan seluruh potensi baik Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Buatan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan menguatnya pelaksanaan desentralisasi, tuntutan terhadap kinerja pelayanan publik yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat serta pelaksanaan asas dan norma tata pemerintahan yang baik, menjadi tantangan di masa depan guna memenuhi tingkat kepuasan masyarakat.

Tantangan dalam pembangunan perdesaan dihadapkan pada tata pengelolaan pemerintahan desa yang partisipatif, sehingga memberikan akses bagi masyarakat perdesaan dalam proses pembangunan desa.

2.2.6 Keamanan dan Ketertiban

Tantangan bagi Kabupaten Banjarnegara 20 (dua puluh) tahun ke depan di bidang keamanan dan ketertiban adalah mengingat Kabupaten Banjarnegara adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI, maka isu keamanan global akan berpengaruh terhadap seluruh sendi kehidupan bermasyarakat di Banjarnegara, isu terorisme mengingat juga akan menjadikan wacana sekaligus antisipasi seluruh pemangku kepentingan agar dapat mengantisipasi segala kondisi dan permasalahan yang akan muncul, dengan kondisi Banjarnegara yang kondusif sekarang ini tidak memungkinkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat. Tingkat kriminalitas harus terus ditekan, sehingga muncul peran masyarakat bukan sebaliknya aparat yang semestinya memberikan perlindungan, malah bekerjasama dengan individu atau sekelompok orang untuk melakukan tindakan kriminal.

Selain itu untuk menciptakan aman dan tertib perlu dukungan dari semua pihak, termasuk aparat itu sendiri, isu HAM dan kekerasan dalam rumah tangga harus disikapi dan ditindak lanjuti oleh para penegak hukum dengan profesional, sehingga muncul kesadaran secara bersama-sama dari masyarakat untuk melaksanakan semua ketentuan dan aturan hukum, tidak seperti sekarang yang masih terkesan takut kepada hukum.

2.2.7 Hukum dan Aparatur

Tantangan yang dihadapi dalam bidang hukum adalah penegakan hukum

secara adil dan tidak diskriminatif. Di samping itu, peningkatan jaminan akan kepastian, rasa keadilan, dan perlindungan hukum, serta harmonisasi produk hukum daerah. Hal ini sejalan dengan semakin besarnya tuntutan untuk membentuk tata peraturan daerah yang baik disertai dengan peningkatan kinerja lembaga dan aparatur hukum serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan HAM.

Tantangan dalam bidang aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat ke depan adalah terciptanya aparatur pemerintah yang mampu bekerja secara transparan, akuntabel, dan kualitas prima untuk memenuhi kinerja pelayanan publik, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang makin maju dan demokratis.

2.2.8 Wilayah dan Tata Ruang

Tantangan di bidang Wilayah dan Tata Ruang yang akan dihadapi Kabupaten Banjarnegara 20 (dua puluh) tahun ke depan adalah keberadaan Kabupaten Banjarnegara itu sendiri yang secara geografis tidak menguntungkan, berada di jalur tengah dengan di apit oleh empat kabupaten, menjadi kendala yang selama ini menjadikan Kabupaten Banjarnegara sebagai daerah miskin, dengan topografi yang beragam ada daerah utara, daerah selatan dan daerah tengah menjadikan pembangunan kewilayahan perlu pemikiran yang lebih mendalam agar kebijakan yang dilaksanakan tidak sia-sia, hal ini akan membutuhkan komitmen dan biaya yang tidak sedikit. Pembangunan selama ini masih di mengarah pembangunan didaerah tengah yang kondisi topografinya datar, sehingga kemajuan di berbagai sektor belum dapat dirasakan secara merata di daerah bagian utara yang topografinya bergunung-gunung, beriklim basah namun rentan akan bencana, sebaliknya di daerah selatan yang topografi bergunung-gunung namun minim akan sumber daya air, sehingga relatif kering, butuh penanganan secara arif untuk menanggulangi dan mengantisipasi warisan alam tersebut.

Di bidang tata ruang dengan meningkatnya dinamika dan aktivitas penduduk sejalan dengan semakin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, pengaruh arus perdagangan bebas, dan penurunan kualitas sumber daya alam. Dalam kondisi seperti ini ruang akan menjadi komoditi yang sangat strategis. Untuk itu, pelaksanaan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan

merupakan tantangan ke depan yang harus dihadapi dan dipersiapkan bersama dengan seluruh *stakeholders*. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan ruang, maka kebutuhan akan lahan juga meningkat pula, sehingga tantangan yang dihadapi pada bidang pertanahan adalah peningkatan pelayanan administrasi pertanahan yang berpihak pada kepentingan masyarakat yang telah mulai dirintis saat ini melalui sistem manajemen pertanahan berbasis masyarakat.

Kerja sama sinergitas pengelolaan potensi merupakan tantangan pembangunan perwilayahan ke depan yang secara konsisten terus dilaksanakan. Hal tersebut mengingat semakin terbatasnya sumber daya alam dan adanya arus perdagangan bebas yang semakin kuat sehingga kawasan strategis perlu didorong dan diperkuat eksistensinya.

2.2.9 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Tantangan yang dihadapi Kabupaten Banjarnegara 20 (dua puluh) tahun ke depan sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah bagaimana dengan seluruh potensi sumber daya alam yang ada dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan seluruh masyarakat Kabupaten Banjarnegara dari kemiskinan dan ketertinggalan, namun faktor alam yaitu dengan daerah yang sangat rawan akan bencana alam yaitu tanah longsong yang sering terjadi terutama di bagian utara, akan menjadikan tantangan tersendiri bagi seluruh pemangku kepentingan agar dapat membuat suatu sistem model pembangunan yang dapat mengeliminir bencana alam tersebut, sistem peringatan dini terhadap bencana juga harus dipersiapkan dan diletakkan di daerah-daerah yang rawan bencana sehingga dapat mengeliminir korban, pengetahuan dan keterampilan warga masyarakat untuk mengantisipasi dan menghindari apabila terjadi bencana juga harus terus ditingkatkan.

Laju pertumbuhan perekonomian dan perdagangan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan bahan tambang, baik itu galian C, batu kali, batu alam, felspar sebagai bahan baku pembuatan keramik keberadaannya sangat melimpah di perut bumi Banjarnegara, namun bahan-bahan tambang tersebut adalah tidak terbarukan, dalam arti tidak dapat dibuat dan suatu saat akan habis apabila penggunaannya dan pengambilannya tanpa memperhitungkan unsur-unsur tersebut, hanya dengan

memperhatikan kepentingan ekonomi dan kebutuhan pasar diadakan eksplorasi dan eksploitasi secara besar-besaran, sehingga harus dapat diantisipasi sumber-sumber lain apabila sumber tersebut sudah tidak menghasilkan lagi. Efek dari penambangan tersebut juga harus diantisipasi, kerusakan alam yang ditimbulkan akan berakibat langsung maupun tidak langsung berjangka waktu pendek ataupun lama yang pada akhirnya akan bermuara pada bencana yang dirasakan oleh manusia Banjarnegara sendiri, sehingga perlu pengendalian agar seimbang antara kepentingan ekonomi dengan kelestarian lingkungan hidup.

2.3 MODAL DASAR

Modal dasar pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang berskala lokal, regional, maupun nasional yang secara riil maupun potensial dimiliki dan dapat didayagunakan untuk pembangunan Kabupaten Banjarnegara untuk mensejahterakan masyarakatnya dimana merupakan bagian integral dari kerangka pembangunan di Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional pada umumnya. Dalam konteks pembangunan di Kabupaten Banjarnegara, beberapa modal dasar untuk mendukung kemajuan yang diharapkan antara lain :

1. Kabupaten Banjarnegara secara geografis memiliki letak yang strategis, karena diapit oleh 6 (enam) Kabupaten meliputi : Kabupaten Purbalingga, Banyumas, Kebumen, Wonosobo, Batang dan Pekalongan. Wilayah pegunungan dengan kondisi tanah yang subur memiliki peran yang strategis dalam pengembangan perekonomian.
2. Jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara yang cukup besar khususnya pada usia muda, merupakan potensi sumber daya manusia yang dapat menjadi modal dasar pembangunan bilamana kualitasnya ditingkankan. Oleh karena itu kualitas SDM perlu terus ditingkatkan agar mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan, disamping itu juga merupakan tantangan yang kurang disikapi dengan semangat yang kuat dan kerja keras.
3. Kekayaan budaya antara lain kelembagaan lokal, sistem nilai, norma dan kepercayaan yang telah berakar dalam kehidupan masyarakat Banjarnegara sejak jaman prasejarah hingga saat ini merupakan modal dasar yang sangat penting dalam

melaksanakan pembangunan daerah.

Dengan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada budaya lokal akan meningkatkan ketahanan dan eksistensi masyarakat dalam mengantisipasi kemajuan dan pengaruh globalisasi tanpa harus tercabut dari akar budayanya.

4. Kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang beragam merupakan modal dasar pembangunan Kabupaten Banjarnegara termasuk di dalamnya plasma nutfah harus dapat dipergunakan dan dimanfaatkan secara wajar dan bertanggung jawab. Modal dasar sumber daya alam ini terdiri atas sektor sektor yang memberikan kontribusi tinggi bagi kemakmuran masyarakat. Sumber alam seperti sumber daya lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan harus dapat dipelihara dan dilestarikan secara berkelanjutan.
5. Berlakunya otonomi daerah sebagai salah satu bentuk perwujudan tuntutan reformasi telah membawa perubahan yang mendasar bagi demokratisasi di bidang politik, ekonomi. Perubahan tersebut membawa dampak kondisi pembangunan politik di Kabupaten Banjarnegara yang kondusif dan menjadi salah satu modal dasar pembangunan.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2005-2025

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Banjarnegara saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Banjarnegara, maka Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 adalah :

"BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN"

Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 ini mengarah pada pencapaian tujuan, cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan, dan kelestarian yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.

Kabupaten Banjarnegara diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

Maju, artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun nonfisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mampu mengelola

segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerja sama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antarwilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung kondusivitas daerah.

Berbasis artinya bahwa pembangunan daerah terkonsentrasi pada salah satu tujuan, sedangkan aspek-aspek yang lain tetap diperhatikan dan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut.

Pertanian, konsep pertanian dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pertanian merupakan konsentrasi selama 20 (dua puluh) tahun mendatang. Pertanian yang dimaksud adalah meliputi pertanian tanaman pangan seperti padi, palawija dan hortikultura yang meliputi sayur mayur dan buah-buahan. Di samping pertanian tanaman pangan juga bidang peternakan, perikanan dan perkebunan, yang kesemuanya diharapkan dapat memberikan kontribusi penuh dan besar yang dapat menopang pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai – nilai luhur budaya masyarakat.
2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan dan memperkuat perekonomian lokal khususnya pertanian, yang berorientasi pada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dengan berbasis pada potensi lokal sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkesinambungan dengan mekanisme pasar yang berlandaskan persaingan yang sehat. Penyediaan

sarana dan prasarana ekonomi regional yang didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.

3. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan yang ditandai dengan meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup, meningkatnya kualitas dan pengelolaan kekayaan keragaman jenis dan kekayaan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, meningkatnya kesadaran sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta mengurangi resiko bencana alam.
4. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good government and clean governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab yang ditandai dengan semakin meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan sistem dan iklim demokrasi, peningkatan kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan dan peningkatan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
5. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ditandai dengan meningkatnya kualitas tata air (air bersih, irigasi, bendung) yang mendukung terciptanya ketahanan pangan, meningkatnya jaringan infrastruktur jalan, transportasi dan komunikasi sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas factor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi, wisata dan mampu membuka isolasi wilayah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru, terpenuhinya perumahan yang layak huni yang dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya untuk mengatasi wilayah yang kumuh.
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai yang ditandai dengan menurunnya kuantitas dan kualitas penyandang sosial, meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat, terpenuhinya kesatuan dan persatuan serta kerukunan masyarakat, meningkatnya perlindungan dan pengayoman masyarakat

terhadap segala tindak kejahatan, menurunnya kasus kekerasan, berkurangnya tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin serta mantapnya situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh kepastian hukum dan penegakan HAM.

BAB IV
ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2005-2025

4.1 SASARAN POKOK PEMBANGUNAN

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Banjarnegara yang maju berbasis pertanian sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai ukuran tercapainya Kabupaten Banjarnegara yang maju berbasis pertanian, pembangunan Kabupaten Banjarnegara dalam kurun 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran pokok sebagai berikut.

4.1.1 Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai – nilai luhur budaya masyarakat, yang ditandai dengan :

1. Meningkatnya kualitas SDM, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (GDI).
2. Meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.
3. Meningkatnya akses, pemerataan, dan mutu pelayanan kesehatan.
4. Meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
5. Meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk miskin.
6. Mantapnya kearifan lokal yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian masyarakat.
7. Meningkat dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang.
8. Meningkatnya karakter masyarakat yang berbudaya yang mendasarkan

pada kearifan lokal dan jati diri.

9. Meningkatnya kesadaran dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari sehingga membentuk karakter masyarakat bermoral dan berakhlak mulia.

4.1.2 Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan dan memperkuat perekonomian lokal khususnya khususnya pertanian, yang ditandai dengan :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten-kabupaten yang maju di Indonesia.
2. Meningkatnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sektor pertanian, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata, didukung dengan sektor lain yang berdaya saing tinggi menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi pertanian yang berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian sekaligus mendorong peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan lebih bermutu.
3. Meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok dan dapat dipertahankan pada tingkat aman melalui swasembada pangan dan disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan di masyarakat melalui revitalisasi pertanian dalam arti luas.
4. Meningkatnya sektor pertanian kearah agribisnis dan agro industri serta agro wisata yang didukung dengan meningkatnya perdagangan dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
5. Meningkatnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber kekayaan daerah.

4.1.3 Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan, yang ditandai dengan :

1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang.
2. Meningkatnya keterpeliharaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah.
3. Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara, dan tanah sesuai baku mutu dan terlindunginya kesehatan masyarakat dari dampak akibat pencemaran.
4. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam.

4.1.4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good government and clean governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab, yang ditandai :

1. Meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik.
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
4. Meningkatnya perkembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, dan masyarakat yang mandiri.
5. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah.

6. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.
7. Meningkatnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

4.1.5 Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar, yang ditandai dengan :

1. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
2. Meningkatnya perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh.
3. Meningkatnya keterpenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatnya jaringan irigasi, bendung dalam rangka menciptakan ketahanan pangan.

4.1.6 Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai, yang ditandai dengan :

1. Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta berkurangnya tindak kekerasan berbasis gender dan anak tanpa diskriminasi.
2. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin.
3. Meningkatnya upaya perlindungan HAM dan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Meningkatnya kestabilan situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM dan terwujudnya kesetaraan gender.
5. Meningkatnya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat

Kabupaten Banjarnegara;

6. Meningkatnya upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat Kabupaten Banjarnegara;
7. Meningkatnya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat Kabupaten Banjarnegara dari segala tindak kejahatan.

4.2 ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025

Arah pembangunan Jangka Panjang selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun diarahkan pada :

4.2.1 Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai – nilai luhur budaya masyarakat

1. Peningkatan, pemerataan dan pengurangan kesenjangan yang terjadi antar wilayah, kelompok usia dan jenis kelamin serta perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan; peningkatan relevansi daya saing dan peningkatan pencitraan tata kelola pendidikan. Peningkatan kemampuan akademis, profesionalisme, dan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, serta pemerataan distribusi guru.
2. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas sebagai upaya pemenuhan standar nasional pendidikan dan pencapaian sekolah standar nasional bertaraf internasional, melalui pembangunan/penyediaan dan peningkatan fasilitas pendidikan.
3. Peningkatan dan pengembangan sekolah kejuruan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan menciptakan lapangan kerja mandiri.
4. Pengembangan pendidikan nonformal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan pencari kerja sesuai perkembangan iptek.
5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses,

pemerataan, dan mutu terhadap pelayanan kesehatan baik aspek promosi, pencegahan, dan penanggulangan berbagai penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta jaminan pemeliharaan jaminan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.

6. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penanganan masalah gizi, mutu tenaga kesehatan dan perbaikan manajemen kesehatan.
7. Pengembangan sikap dan perilaku pemuda yang beriman dan bertakwa, mandiri, inovatif, dan kreatif, serta peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda sebagai subjek pembangunan, melalui pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan.
8. Penciptaan dan Pengembangan budaya berolah raga bagi masyarakat, agar terwujud kehidupan yang sehat di samping mengembangkan secara simultan olah raga prestasi melalui pengembangan sarana prasarana olah raga yang memadai.
9. Peningkatan ketakwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama serta meningkatkan pemahaman nilai-nilai ajaran agama dan mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling percaya dan menciptakan harmonisasi antarkelompok umat beragama yang penuh toleransi dan tenggang rasa.

4.2.2 Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan dan memperkuat perekonomian lokal khususnya pertanian

1. Pengembangan perekonomian daerah yang berorientasi dan berdaya saing global dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi lokal khususnya pertanian yang memperhatikan sumber daya alam secara berkelanjutan dan membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi yang kokoh.
2. Pengembangan perekonomian daerah berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memerhatikan terjaminnya kesempatan berusaha dan

bekerja bagi seluruh masyarakat, mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah, dan sebagai bagian dari penanggulangan kemiskinan dan pengurangan jumlah penduduk miskin.

3. Pengembangan kelembagaan ekonomi melalui penciptaan regulasi dan perizinan yang efisien, efektif, dan nondiskriminatif, menjaga, mengembangkan, dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat, serta melindungi konsumen; mendorong pengembangan standarisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing; meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah, sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi dalam negeri.
4. Pengembangan jasa infrastruktur dan keuangan di tingkat perdesaan dengan pengembangan keprofesian, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang mampu menyediakan sumber pendanaan di pedesaan dalam pengembangan kegiatan perekonomian dan pengentasan kemiskinan di pedesaan.
5. Pengembangan sektor-sektor strategis yang didayagunakan untuk memperkuat perekonomian daerah. Sistem agribisnis dan agroindustri diperkuat sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.
6. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor pertanian agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi daerah. Hal ini merupakan faktor strategis karena berkenaan dengan pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan, dan penguatan ketahanan pangan.
7. Perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, kesejahteraan dan perlindungan serta kemandirian tenaga kerja yang berwawasan wirausaha (*entrepreneur*) sehingga mampu bersaing di era global.
8. Peningkatan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan tuntutan pasar kerja, serta pengembangan

dan pemerataan balai-balai latihan kerja daerah.

9. Penciptaan UKM berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, mandiri serta mampu menembus pasar global dengan mengembangkan kerja sama strategis dan sinergis antarpelaku usaha, mengembangkan rumpun industri, mempercepat alih teknologi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
10. Peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha perkoperasian.
11. Peningkatan investasi di daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi rakyat dan meningkatkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah karena meningkatnya kapasitas dan aktivitas perekonomian daerah. Pengembangan investasi dilakukan dengan mengembangkan iklim usaha yang kondusif, menjamin kepastian berusaha, dan peningkatan kualitas sistem pelayanan investasi, serta pemenuhan sarana prasarana pendukung investasi.
12. Pengembangan lembaga keuangan di daerah untuk memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi investasi di daerah. Setiap jenis investasi akan memperoleh sumber pendanaan yang sesuai dengan karakteristik jasa keuangan.
13. Peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah dengan mengembangkan produktivitas pertanian dalam negeri, yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat terutama pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, maupun harga yang terjangkau.
14. Pengembangan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan melalui PLTMH Mikro Hidro untuk kecukupan kebutuhan listrik masyarakat.
15. Peningkatkan produksi perikanan yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani ikan dengan tetap menjaga kelestarian dan pelarangan alat tangkap ikan yang merusak lingkungan.
16. Pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan produk-produk

pertanian dan industri, dan menjaga distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah pedesaan, dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

17. Penguatan basis industri yang mempunyai daya saing baik di pasar lokal maupun internasional, melalui pendekatan klaster, serta meningkatkan peran sektor industri kecil dan menengah terhadap struktur industri, sehingga terjadi keseimbangan peran antara industri besar dengan industri kecil dan menengah.
18. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di daerah, serta untuk meningkatkan dan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dari berbagai keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, proses rekrutmen dan pelatihan keterampilan bagi calon transmigran menjadi prioritas untuk menciptakan transmigran yang tangguh, mampu menciptakan peluang usaha mandiri dengan jiwa wirausaha.
19. Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat lokal di bidang kepariwisataan untuk memperluas kesempatan kerja dan mendorong kegiatan ekonomi daerah serta mendorong timbulnya daya saing antar produk pariwisata. Pengembangan kepariwisataan juga dapat memasyarakatkan keragaman budaya, alam dan keunikan lokal daerah masing-masing.

4.2.3 Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan

1. Pengembangan sistem pembangunan sesuai dengan keseimbangan ekosistem, dalam artian tidak menimbulkan dampak yang merusak lingkungan. Pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan daya dukungnya dan memerhatikan daya regenerasinya khusus untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*).

2. Peningkatan wawasan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang merupakan modal pembangunan daerah dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Dengan demikian, sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Karena itu, untuk mewujudkan visi Kabupaten Banjarnegara, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah.
3. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang dan diikuti dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Untuk itu diperlukan tata ruang wilayah yang mantap disertai penegakan hukum sebagai pedoman pemanfaatan SDA yang optimal dan lestari.
4. Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan dan peningkatan partisipasi masyarakat dunia usaha dan industri dalam memelihara lingkungan, melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup, dapat menciptakan SDM yang berkualitas, yaitu SDM yang peduli terhadap isu SDA dan lingkungan hidup, yang utamanya diarahkan pada generasi muda.
5. Pengembangan sistem pembangunan kehutanan yang diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan, dan peningkatan daya dukung sumber daya hutan dalam pembangunan berkelanjutan serta peningkatan daerah resapan air dalam rangka konservasi air bawah tanah (ABT) dengan peningkatan rehabilitasi peran dan fungsi hutan melalui upaya konservasi.

4.2.4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good government and clean governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.

1. Peningkatan pemahaman paradigma politik yang desentralisasi dan pendidikan politik sehingga tidak menimbulkan euforia politik sesaat.
2. Identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka mencapai kinerja pelayanan publik yang prima berbasis partisipasi masyarakat. Dengan demikian, pelayanan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan yang merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Di samping itu, perlu adanya pemberdayaan dan perwujudan aparatur pemerintah yang mumpuni dan bersih, serta ditunjang oleh sarana dan prasarana pelayanan secara memadai dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik
3. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan, dalam rangka mewujudkan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga dapat meningkatkan volume perputaran keuangan di daerah dan terwujudnya optimalisasi fungsi lembaga pengelolaan keuangan daerah.
4. Peningkatan penegakan hukum yang dilandasi prinsip-prinsip keadilan terutama dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan kualitas produk hukum daerah sesuai kewenangan yang dimiliki serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum yang dikeluarkan kabupaten atau kota, untuk menghindari lahirnya produk yang memberatkan masyarakat untuk mewujudkan peraturan perundangan daerah yang mampu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan.
5. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan HAM.
6. Peningkatan kerja sama antardaerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap daerah, menghilangkan ego pemerintah daerah yang berlebihan; serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik. Pembangunan kerja sama antardaerah melalui sistem jejaring antar daerah akan sangat bermanfaat

sebagai sarana berbagi pengalaman, berbagi keuntungan dari kerja sama, maupun berbagi tanggung jawab pembiayaan secara proporsional, baik dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana maupun dalam pembangunan lainnya.

7. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan melalui penyiapan landasan berupa institusi masyarakat yang memperkuat perkembangan masyarakat di masa mendatang dan memberdayakan masyarakat yang berbasis komunitas desa untuk mengatasi masalah yang ada dengan melaksanakan kegiatan yang dikelola secara demokratis, transparan, dan akuntabel.
8. Peningkatan pembangunan aparatur untuk mewujudkan sosok dan kinerja aparatur pemerintah yang profesional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mendorong pola pengembangan karir yang menuju pada pengembangan profesionalisme, pengembangan standar kompetensi aparatur, dan peningkatan kesejahteraan aparatur termasuk perangkat desa. Di samping itu, secara bertahap juga dilakukan perubahan terhadap mental dan budaya birokrasi agar cepat dan tanggap dalam merespon tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
9. Pengembangan kebijakan pemerintah yang disusun berdasarkan pada kajian dan analisis yang mendalam disertai dengan dukungan data dan informasi yang mutakhir, valid, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, pembangunan statistik akan dimulai dengan menata kewenangan dan kelembagaan statistik daerah, diikuti dengan pengembangan pusat data statistik daerah yang terintegrasi dengan pusat, *updating* secara ketat setiap data dan informasi yang berada pada tingkat sektoral sehingga bermanfaat bagi perumusan indikator pembangunan daerah yang terimplementasi secara berkelanjutan.
10. Peningkatan Penataan kelembagaan kearsipan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah, pembangunan sistem kearsipan daerah, pengembangan prasarana dan sarana pendukung kearsipan daerah, dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kearsipan.

11. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah yang memadai melalui pembangunan dan pengembangan beberapa Sistem Informasi Manajemen di masing-masing Satuan Kerja yang nantinya akan diintegrasikan melalui jaringan intranet maupun internet.
12. Peningkatan usaha memelihara kondisi keamanan ketertiban yang cukup kondusif di daerah dengan melakukan antisipasi terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban, dalam rangka mewujudkan sistem keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi keseluruhan warga masyarakat dari gangguan ketertiban dan keamanan.

4.2.5 Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar

1. Pengembangan sistem pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat yang diarahkan pada penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan yang mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah yang dapat meningkatkan pelayanan mobilitas barang dan jasa dalam mendukung pembangunan sektoral dan regional serta pemerataan hasil-hasil
2. Pengembangan sistem pembangunan sumber daya air yang diarahkan untuk mencapai keandalan ketersediaan air yang diwujudkan dengan kegiatan membangun waduk, waduk lapangan (embung) bendungan, pompa, jaringan drainase, pengendalian mutu air, serta pemanfaatan kembali air drainase; ditunjang oleh keandalan pengelolaan jaringan air yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi; kesemuanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, melalui kegiatan pengembangan sistem irigasi partisipatif guna mendorong kegiatan intensifikasi, diversifikasi, ekstensifikasi, dan rehabilitasi pertanian dan modernisasi usaha tani.
3. Pengembangan sistem pembangunan air minum yang diarahkan pada peningkatan akses masyarakat Kabupaten Banjarnegara terhadap air minum perpipaan melalui peningkatan kapasitas pelayanan air minum, peningkatan kinerja pengelola air minum, serta peningkatan kualitas

SDM pengelola air minum melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk pemenuhan air minum diantisipasi tingkat kebocoran baik teknis maupun nonteknis hingga mencapai ambang batas normal.

4. Pengembangan sistem pembangunan kelistrikan yang diarahkan pada pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik daerah dan peningkatan kemampuan pelayanannya. Peningkatan kemampuan kebutuhan listrik ini dapat dilakukan dengan mencari sumber-sumber baru di wilayah potensial untuk dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) termasuk penggunaan mikrohidro (pembangkit listrik mini) terutama di wilayah pedesaan. Di samping itu, pembangunan kelistrikan juga diarahkan dengan membangun jaringan distribusi listrik sampai pelosok pedesaan sehingga diharapkan terjadi peningkatan kemampuan jangkauan pelayanan kebutuhan listrik baik untuk kepentingan industri maupun untuk kepentingan rumah tangga dapat terwujud secara lebih merata.
5. Pengembangan sistem pembangunan perumahan yang diarahkan pada peningkatan penyediaan perumahan dan lahan bagi masyarakat berpendapatan rendah, beserta peningkatan pemenuhan kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana sehat. Dalam mendukung pemenuhan lingkungan perumahan yang sehat diberikan fasilitasi pembiayaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan, terutama pada kawasan kumuh perkotaan.
6. Pengembangan sistem penanganan persampahan dan drainase pada permukiman yang diarahkan pada peningkatan kesadaran seluruh pihak yang terlibat terhadap pentingnya peningkatan pengelolaan dan pelayanan persampahan dan drainase, serta memberikan ruang yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pelayanan persampahan, tidak hanya dalam bidang transportasinya, tetapi juga dalam bidang pengelolaan tempat pembuangan akhir TPA.
7. Pengembangan sistem pembangunan penataan ruang yang diarahkan pada pembangunan wilayah yang terpadu, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan dengan

memanfaatkan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan seimbang. Rencana pembangunan dijabarkan dan disinkronisasikan ke dalam rencana tata ruang yang konsisten, baik materi maupun jangka waktunya.

8. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih menekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi.
9. Pengembangan sistem pembangunan kota yang tetap menjaga keseimbangan pertumbuhannya . Upaya itu diperlukan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali,
10. Peningkatan pemahaman rencana tata ruang yang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan dalam rangka mengurangi kesenjangan antar desa.
11. Pengembangan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam rangka mengoptimalkan struktur dan pola pemanfaatan ruang melalui peningkatan (a) kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang, (b) kualitas rencana tata ruang, dan (c) efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

4.2.6 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai

1. Pengembangan sistem pembangunan kependudukan yang diarahkan pada pengendalian laju pertumbuhan dan persebaran penduduk serta mewujudkan keluarga sejahtera, sehingga tercipta kondisi kependudukan yang terkendali dan kesejahteraan keluarga yang meningkat. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dilakukan melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau,

informatif, bermutu, aman dan efektif serta perlindungan hak-hak reproduksi secara bertanggung jawab, bebas dari diskriminasi, tanpa paksaan dan kekerasan menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas, baik karena keharmonisan maupun karena didukung oleh tertatanya administrasi kependudukan.

2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan. Kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, tetapi juga untuk menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa secara keseluruhan.
3. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui dua cara. Pertama, mengurangi beban pengeluaran konsumsi kelompok miskin. Kedua, meningkatkan produktivitas masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatannya. Kedua cara dimaksud pada dasarnya adalah memenuhi hak-hak masyarakat miskin selaras dengan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) dan MDGs meliputi : a) Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin (pangan, sandang, perumahan, air bersih, pendidikan, kesehatan, kepemilikan); b) Peningkatan pendapatan; c) Peningkatan partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan; d) Perlindungan sosial dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, konflik, diskriminasi serta kerentanan lainnya seperti bencana; d) Perbaikan lingkungan hidup (sanitasi dan air bersih).
4. Pengembangan sistem pembangunan sosial sesuai dengan komitmen global *Millennium Development Goals* sebagai langkah menuju upaya penghapusan kemiskinan, dengan target pengurangan setengah angka kemiskinan pada tahun 2015 yang telah dicanangkan PBB. Sistem pembangunan sosial diarahkan pada penanganan kemiskinan, baik kemiskinan struktural maupun kemiskinan kultural dan penanganan masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Ini dilakukan melalui upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan, rehabilitasi, dan

pemberdayaan masyarakat dengan didukung oleh sistem perlindungan sosial, termasuk penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai, pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat sebagai wahana yang luas untuk pengembangan mekanisme pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dengan tidak merusak budaya daerah dan kearifan lokal.

5. Pengembangan sistem pembangunan budaya daerah yang diarahkan pada pengembangan seni dan budaya melalui pelestarian nilai-nilai budaya yang mengakar dari warisan leluhur, dan ditujukan untuk membentuk nilai-nilai kepribadian masyarakat yang bermartabat. Pelestarian seni dan budaya diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kegiatan seni budaya daerah serta meningkatkan jumlah peminat seni budaya daerah.
6. Pengembangan budaya inovatif yang berorientasi iptek dengan memerhatikan nilai-nilai kearifan lokal agar masyarakat menguasai iptek serta mampu bersaing di era persaingan global. Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek.
7. Pengembangan sistem pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang diarahkan pada memperkuat kelembagaan, pangarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan, sehingga keadilan gender terjamin dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik untuk memberikan lebih besar peran perempuan di berbagai bidang pembangunan dan menurunkan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan.
8. Pengembangan sistem keamanan dan ketertiban yang diwujudkan melalui keterpaduan upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjaga kerukunan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi wilayah, kondisi penduduk, dan kondisi sosial masyarakat Banjarnegara.
9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan

terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat sebagai upaya untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat.

4.3 TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Upaya perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan secara bertahap dalam kerangka pembangunan jangka menengah, yang diukur dengan parameter peningkatan kualitas manusia melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tahapan pembangunan jangka menengah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.3.1 RPJM Daerah Pertama (2005 - 2009)

Tahapan pembangunan pada tahap pertama Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan melalui RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 - 2011 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007. Dengan berlandaskan pada pencapaian hasil-hasil pembangunan periode sebelumnya, pembangunan daerah pada tahap ini untuk mendukung pencapaian visi : Tercapainya Pelayanan Prima demi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang sejahtera, mandiri dan berbudaya. Upaya pencapaian visi tersebut diimplementasikan ke dalam 6 misi pembangunan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang efisien, efektif dan bersih / bebas KKN dengan mengutamakan masyarakat.
2. Meningkatkan sumber pendanaan dan investasi pembangunan.
3. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas dan kecerdasan Sumber Daya Masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan.
5. Memulihkan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dari keterpurukan ekonomi nasional.
6. Menciptakan rasa aman dan tentram dalam suasana kehidupan yang demokratis dan agamis.

Dokumen RPJMD Kabupaten Banjarnegara merupakan Dokumen RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahap I dengan sasaran pokok yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjarnegara dengan indikator kinerja utama adalah:

(1) meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,54 dengan komponen pembentuknya, terdiri atas Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Melek Huruf (AMH), Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Purchasing Power Parity); (2) menurunnya jumlah penduduk miskin; (3) berkurangnya jumlah pengangguran terbuka; (4) terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; (5) bertambahnya nilai PDRB dan bergesernya struktur ekonomi ke arah sektor sekunder dan tersier; (6) meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi; dan (7) meningkatnya pendapatan per kapita.

Keberhasilan sampai dengan tahun 2009 mestinya tidak disampaikan dalam dokumen ini, tetapi pada evaluasi RPJMD Kabupaten Banjarnegara yang akan disampaikan pada tahun 2011 atau akhir masa jabatan.

Prioritas utama pada tahapan ini adalah peletakkan fondasi untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan; peningkatan kemampuan daya beli masyarakat; peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan dasar, terutama infrastruktur wilayah dan mitigasi bencana; serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pembangunan sektor pertanian pada 5 tahun tahap pertama diarahkan pada peningkatan produksi dan produktifitas pertanian secara umum, pencegahan dan pemberantasan hama penyakit. Pembangunan pertanian pada tahap ini dititikberatkan kepada pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan dan perkebunan khususnya pada pengembangan bibit unggul dan teknologi produksi.

Disamping itu juga dititikberatkan kepada peningkatan kualitas produk dan pengembangan pasar.

4.3.2 RPJM Daerah Kedua (2010 - 2014)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-1, maka RPJMD ke-2 ditujukan untuk merealisasikan visi pembangun daerah hingga

tahun 2025 menurut dokumen RPJPD, yaitu Banjarnegara maju berbasis pertanian. Pada tahapan ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan sebesar 77,27 pada tahun 2014. Prioritas pembangunan pada tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut: Urusan Pendidikan. Pembangunan pendidikan diprioritaskan untuk peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH).

Melalui Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun. Upaya yang dilakukan untuk mendukung target tersebut melalui pembagian peran (Role Sharing) pendanaan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam rangka rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru SD/MI dan SMP/MTs, serta bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Urusan Kesehatan. Pembangunan kesehatan pada periode ini diprioritaskan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH), penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, melalui peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan, peningkatan balita gizi baik dan yang diimunisasi lengkap, peningkatan cakupan sanitasi dasar, peningkatan pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan angka kesembuhan penderita penyakit tertentu, penyusunan rancangan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan, dan peningkatan manajemen kesehatan yang akuntabel.

Urusan Pekerjaan Umum. Pada periode ini pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur wilayah, antara lain: pembangunan jaringan infrastruktur transportasi yang mantap dan handal serta terintegrasi, disertai dengan bukaan akses jalan baru ke wilayah Utara yang berbatasan dengan Pekalongan dan Batang, ke wilayah Selatan yang berbatasan dengan Kebumen, terbukanya akses jalan ke sentra-sentra produksi, baik pertanian, obyek wisata, pertambangan dan daerah terisolir, serta peningkatan rasio aksesibilitas jalan terhadap luas daerah.

Selain sarana transportasi, dilakukan upaya : perintisan pembangunan kolam dan embung untuk pemenuhan kecukupan air bagi aktivitas ekonomi masyarakat, peningkatan rasio pelayanan jaringan irigasi terhadap luas areal irigasi, peningkatan cakupan layanan air bersih di perdesaan dan perkotaan, peningkatan cakupan layanan persampahan, terutama di wilayah perkotaan, peningkatan cakupan layanan penerangan jalan umum pada ruas jalan kabupaten di setiap wilayah kecamatan.

Urusan Penataan Ruang. Penyelenggaraan penataan ruang diprioritaskan pada peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah, kota dan kawasan serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan secara berjangka dan penegakan peraturan atau ketentuan teknis pemanfaatannya dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang; pelaksanaan rencana pengembangan kawasan budidaya dan kawasan nonbudidaya atau wilayah konservasi melalui kesepakatan kerjasama sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku; pencapaian rencana pemanfaatan ruang yang serasi dengan ekosistemnya serta mampu mewadahi perkembangan wilayah dan aktifitas perekonomian masyarakat; pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan kaidah pengelolaan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan; serta tersedianya rencana tata ruang secara detail di setiap kecamatan dan kawasan cepat tumbuh.

Urusan Perencanaan Pembangunan. Pada tahap ini diprioritaskan pada terwujudnya perencanaan pembangunan daerah secara berjangka meliputi jangka panjang, menengah dan tahunan serta rencana pembangunan daerah menurut urusan pemerintahan bagi kemajuan daerah; serta peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan pengawasan pembangunan daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan diarahkan untuk peningkatan nilai tambah PDRB, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan per Kapita, serta mulai bergesernya struktur ekonomi ke sektor tersier.

Urusan Perhubungan. Pembangunan Perhubungan diprioritaskan Pada upaya penambahan jangkauan wilayah pelayanan moda transportasi.

Urusan Lingkungan Hidup. Pembangunan lingkungan hidup diprioritaskan pada optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup melalui kelayakan AMDAL, UKL/UPL dan RKL/RPL yang bersertifikat dalam kegiatan usaha tersedianya akses informasi terhadap lingkungan hidup.peningkatan jumlah kelompok masyarakat dan organisasi masyarakat yang peduli lingkungan hidup, tersedianya peraturan daerah tentang pengaturan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta bertambahnya revegetasi lahan kritis.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk peningkatan

indeks pembangunan gender, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender serta rasio perempuan pada pemerintahan daerah dan DPRD serta jabatan strategis lainnya.

Urusan Sosial, diprioritaskan pada terpenuhinya pelayanan sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, fasilitasi untuk meningkatkan pelayanan sosial kemasyarakatan. Selain itu, termasuk juga bantuan dan syiar-syiar keagamaan serta aspek sosial lainnya., terciptanya kerukunan hidup antar dan inter umat beragama serta sikap kesalehan sosial umat beragama, serta terpenuhinya sarana dan prasarana ibadah yang merata di setiap wilayah sesuai dengan kebutuhan umat beragama.

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilakukan melalui optimalisasi sumber daya produktif dengan peningkatan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha; serta bangkitnya sentra-sentra industri, koperasi dan UKM/IKM sesuai dengan keunggulan masing-masing wilayah.

Urusan Penanaman Modal, diprioritaskan pada upaya-upaya yang mendorong tumbuhnya investasi di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Urusan Kebudayaan, diprioritaskan pada terpenuhinya jumlah sarana, kelembagaan kebudayaan dan lingkungan seni, budaya lokal, kekhasan Kabupaten Banjarnegara; tercapainya pelestarian benda-benda kepurbakalaan, situs-situs dan benda-benda kepurbakalaan; peningkatan keunggulan daya tarik wisata melalui pengembangan produk wisata yang unik dan tradisional; adanya penghargaan terhadap prestasi masyarakat atas pencapaiannya di bidang kesenian dan olah raga.

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga. Pembangunan kepemudaan diupayakan melalui peningkatan kualitas pemuda sebagai individu dan dalam organisasi kepemudaan. Sedangkan pembangunan bidang olah raga diarahkan pada terpenuhinya sarana olah raga sehingga dapat meningkatkan prestasi olah raga.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; peningkatan kualitas pelayanan dasar, perizinan dan pelayanan publik yang lebih baik (better), lebih cepat (faster) dengan biaya wajar menurut peraturan yang berlaku (cheaper) dalam lingkup kewenangan Kabupaten Banjarnegara serta memenuhi kepuasan pelanggan;

peningkatan kapasitas keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan disertai dengan pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan taat pada peraturan yang berlaku; peningkatan tertib pengelolaan aset dan barang daerah serta pendayagunaannya untuk kemajuan daerah; keterbukaan informasi dan komunikasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik melalui media cetak, elektronik dan media teknologi terkini lainnya sesuai dengan perkembangan IPTEK; terbangunnya hukum dan tata peraturan daerah sebagai landasan penyelenggaraan otonomi daerah dan penegakkan hukum di daerah; tercapainya peningkatan kapasitas pelayanan kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan; terlaksananya fasilitasi untuk peningkatan kapasitas pelayanan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan desa maupun usaha-usaha ekonomi pedesaan; tercapainya tata kelola pemerintahan umum dan bina wilayah serta fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan antara masyarakat dan pihak-pihak yang bersengketa sesuai ketentuan yang berlaku; peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah dan berbagai sumber dana pembangunan; terlaksananya fasilitasi untuk mendorong kemajuan ekonomi dan sektor-sektor unggulan Kabupaten Banjarnegara; terwujudnya organisasi perangkat daerah yang ramping struktur tetapi kaya fungsi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; peningkatan profesionalisme aparatur, baik dalam kompetensi teknis dan substantif menurut tupoksinya maupun untuk pelayanan kepada masyarakat disertai dengan perbaikan kesejahteraan aparatur; peningkatan kuantitas dan kualitas auditor/Pejabat Pengawas Pemerintah (P3); peningkatan kesejahteraan auditor/Pejabat Pengawas Pemerintah (P3) mendorong peningkatan kinerja aparatur; mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; pengembangan SIMWASDA (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Daerah); telah dilimpahkan; terlaksananya fasilitasi untuk peningkatan kapasitas pelayanan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan desa maupun usaha-usaha ekonomi pedesaan; tercapainya tata kelola pemerintahan umum dan bina wilayah serta fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan antara masyarakat dan pihak-pihak yang bersengketa sesuai ketentuan yang berlaku; peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah dan berbagai sumber dana pembangunan; terlaksananya fasilitasi untuk mendorong kemajuan ekonomi dan sektor-sektor unggulan Kabupaten terwujudnya

organisasi perangkat daerah yang ramping struktur tetapi kaya fungsi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; peningkatan profesionalisme aparatur, baik dalam kompetensi teknis dan substantif menurut tupoksinya maupun untuk pelayanan kepada masyarakat disertai dengan perbaikan kesejahteraan aparatur; peningkatan kuantitas dan kualitas auditor/Pejabat Pengawas Pemerintah (P3); peningkatan kesejahteraan auditor/Pejabat Pengawas Pemenintah (P3); mendorong peningkatan kinerja aparatur; mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; pengembangan SIMWASDA (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Daerah);terlaksananya reformasi birokrasi di daerah secara menyeluruh sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan pada terwujudnya pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa dan potensi ekonomi desa, antara lain melalui peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap teknologi tepat guna, dan teknologi terkini lainnya, serta adanya penghargaan terhadap prestasi masyarakat atas pencapaiannya di bidang ilmu pengetahuan dan penelitian.

Urusan Kearsipan, diprioritaskan pada tercapainya tata pengelolaan kearsipan daerah yang lebih maju di setiap SKPD hingga kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai dengan perkembangan IPTEK; terbangunnya sarana dan prasarana layanan perpustakaan daerah untuk meningkatkan minat dan budaya baca pada masyarakat dan pelajar di Kabupaten Banjarnegara peningkatan kualitas dan kuantitas perpustakaan desa/kelurahan di Kabupaten Banjarnegara.

Urusan Komunikasi dan Informatika. Diprioritaskan pada peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap teknologi informasi melalui peningkatan jangkauan layanan telekomunikasi di setiap kecamatan serta peningkatan rasio pemanfaatan sarana komunikasi maupun telematika. Selain itu, dilakukan upaya penguasaan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang dilandasi oleh nilai-nilai Iman dan Takwa (IMTAQ).

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, diprioritaskan pada peningkatan rasio pemanfaatan potensi sumber daya air, energi dan listrik.

Prioritas utama pada tahapan ini adalah penguatan dan pemantapan pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju dengan

mengembangkan dan memperkuat perekonomian lokal, khususnya pertanian yang ditujukan pada pengembangan dan perluasan tanaman khususnya tanaman hortikultura, pengembangan perikanan dan peternakan disamping itu juga diarahkan peningkatan kualitas produk kearah produk yang kompetitif, komprehensif dan kooperatif.

Pada tahapan ini sektor-sektor pertanian juga diarahkan pada revitalisasi industri hasil-hasil pertanian kearah industri menengah dengan tetap berorientasi kepada kegiatan padat karya. Disamping itu juga dititikberatkan pada pemanfaatan limbah hasil pertanian, untuk pengembangan peternakan, perikanan dan energi listrik.

4.3.3 RPJM Daerah Ketiga (2015 - 2019)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-2, maka RPJMD ke-3 ditujukan untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah melalui pengembangan dan percepatan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang/urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Kabupaten Banjarnegara menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian daerah berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang berlandaskan pada nilai-nilai agama, moral dan kearifan lokal, pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan Bertanggung jawab. Pada tahapan ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan sebesar 80 pada tahun 2019.

Urusan Pendidikan. Pembangunan pendidikan diprioritaskan untuk peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) melalui Perintisan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 (dua belas) Tahun. Upaya yang dilakukan untuk mendukung antara lain yaitu pengembangan pendidikan satu atap (sembilan tahun), peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan bantuan beasiswa bagi siswa dan keluarga tidak mampu.

Urusan Kesehatan. Pembangunan kesehatan diprioritaskan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH), penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, melalui peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan, peningkatan balita gizi baik dan yang diimunisasi lengkap, peningkatan cakupan

sanitasi dasar, pemngkatan pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan angka kesembuhan penderita penyakit tertentu, penyusunan rancangan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan, dan peningkatan manajemen kesehatan yang akuntabel, serta penuntasan jumlah penduduk miskin yang menjadi program jaminan pemeliharaan kesehatan.

Urusan Pekerjaan Umum. Pembangunan diprioritaskan pada percepatan pembangunan infrastruktur wilayah, yang diindikasikan oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi, ketersediaan jaringan irigasi, meningkatnya ketersediaan air bersih dan sanitasi, penambahan ruang terbuka hijau dan taman-taman kota di setiap wilayah kecamatan.

Urusan Penataan Ruang. Pembangunan Penataan Ruang diprioritaskan melalui upaya yang mendukung semakin terpenuhinya rencana tata ruang secara detail untuk kota dan kawasan serta daerah yang tumbuh dengan pesat; dan semakin terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan kaidah pengelolaan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Urusan Perencanaan Pembangunan, diprioritaskan pada semakin mantapnya peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan pengawasan pembangunan daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Urusan Perhubungan. Pembangunan Perhubungan diprioritaskan pada upaya penambahan jangkauan wilayah pelayanan moda transportasi.

Urusan Lingkungan Hidup, diprioritaskan pada pemantapan pengelolaan lingkungan hidup melalui kelayakan AMDAL, UKL/UPL dan RKL/RPL yang bersertifikat dalam kegiatan usaha dan mulai terpenuhinya baku mutu lingkungan yang berlaku; serta cakupan revegetasi lahan kritis telah menjangkau separoh dan luas lahan kritis yang ada.

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil. Pembangunan Kependudukan dan Catatan Sipil diprioritaskan pada upaya semakin mantapnya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di bawah laju Provinsi Jawa Tengah.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembangunan bidang Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi,

pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.

Urusan Sosial, diprioritaskan pada berkurangnya secara signifikan jumlah pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah.

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilakukan melalui optimalisasi sumber daya produktif dengan peningkatan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha; serta bangkitnya sentra-sentra industri, koperasi dan UKM/IKM sesuai dengan keunggulan masing-masing wilayah sentra unggulan baru di setiap wilayah.

Urusan Kebudayaan. Dalam Pembangunan bidang kebudayaan diprioritaskan pada pelestarian nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Banjarnegara Upaya yang dilakukan antara lain menanamkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat terutama pada kalangan generasi muda dalam peran sertanya untuk pembangunan

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga. Pembangunan kepemudaan diupayakan melalui peningkatan kualitas pemuda sebagai individu dan dalam organisasi kepemudaan. Sedangkan pembangunan bidang olah raga diarahkan pada terpenuhinya sarana olah raga sehingga dapat meningkatkan prestasi olah raga.

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, diprioritaskan pada semakin mantapnya persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan agama; semakin mantapnya kondisi politik lokal yang demokratis melalui penguatan kelembagaan politik yang ada; semakin mantapnya teknologi dan alat deteksi dini terhadap bencana gempa, banjir dan tanah longsor; serta semakin mantapnya kemampuan aparat, anggota masyarakat dan kelompok masyarakat terampil dalam menangani bahaya bencana alam, pencegahan bencana alam maupun mitigasi bencana serta meningkatnya perlindungan masyarakat dan penanggulangan/penanganan korban bencana alam maupun korban bencana sosial.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, diprioritaskan pada pemantapan kapasitas Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; semakin mantapnya kualitas pelayanan dasar, perizinan dan pelayanan publik yang lebih baik (better), lebih cepat (faster) dengan biaya wajar menurut peraturan yang berlaku (cheaper) dalam lingkup kewenangan Kabupaten serta memenuhi kepuasan pelanggan; pemantapan reformasi birokrasi mulai berkembang ke arah pelayanan publik dengan dukungan teknologi e-government dan teknologi informasi yang terkini, serta pemantapan kapasitas inspektorat Kabupaten Banjarnegara;

Urusan Kearsipan. Pembangunan Kearsipan diprioritaskan pada tercapainya tata pengelolaan kearsipan daerah yang lebih maju hingga pemerintahan desa sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi; penuntasan pembangunan sarana dan prasarana layanan perpustakaan daerah untuk meningkatkan minat dan budaya baca pada masyarakat dan pelajar Kabupaten Banjarnegara dan pengembangan perpustakaan tingkat SKPD, kecamatan hingga kelurahan dan desa.

Urusan Komunikasi dan Informatika. Pembangunan Komunikasi dan Informatika diprioritaskan pada peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap teknologi informasi melalui upaya perintisan jangkauan layanan telekomunikasi di setiap desa/kelurahan.

Urusan Pertanian. Pembangunan Pertanian diprioritaskan pada terjaminnya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, terutama beras dan mulai terpenuhinya kebutuhan komoditas pangan lainnya.

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada tahap ini diprioritaskan pada penyediaan energi bagi masyarakat, meningkatnya upaya konservasi dan penghematan energi serta dimulainya pengembangan energi alternatif.

Prioritas utama pada tahapan ini adalah pengembangan dan percepatan pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju dengan menitikberatkan pada sektor pertanian yang berbasis teknologi dengan tetap menjaga kualitas dan kuantitas produk hasil olahan, serta mempertahankan daya saing khususnya dalam menembus pasar regional dan nasional.

4.3.4 RPJM Daerah Keempat (2020 - 2024)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, maka RPJMD ke-4 ditujukan untuk optimalisasi pembangunan daerah di seluruh bidang/urusan pemerintahan dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan tetap mempertimbangkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan reformasi birokrasi yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada RPJMD ke-4 ini, tahapan dan prioritasnya semakin dioptimalkan pencapaiannya. Pada tahapan ini status pembangunan manusia dapat mencapai 80 (IPM=80) diproyeksikan terwujud pada tahun 2019 dan di akhir tahapan akan terwujud IPM sebesar 81,25

Prioritas pembangunan pada tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Urusan Pendidikan. Pembangunan pendidikan diprioritaskan untuk peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) melalui Pemantapan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 (dun belas) Tahun, serta munculnya sekolah-sekolah unggulan di Kabupaten Banjarnegara. Urusan Kesehatan. Pembangunan kesehatan diprioritaskan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH), penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, melalui pemngkatan persalinan oleh tenaga kesehatan, peningkatan balita gizi baik dan yang diimunisasi lengkap, peningkatan cakupan sanitasi dasar, peningkatan pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan angka kesembuhan penderita penyakit tertentu, penyusunan rancangan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan, dan peningkatan manajemen kesehatan yang akuntabel, serta perintisan jumlah penduduk miskin beserta anggota masyarakat lainnya untuk memasuki program jaminan pemeliharaan kesehatan.

Urusan Pekerjaan Umum, diprioritaskan pada mantapnya penambahnya ruang terbuka hijau dan taman-taman kota di setiap wilayah kecamatan.

Urusan Penataan Ruang. Pembangunan Penataan Ruang diprioritaskan pada terpenuhinya seluruh rencana tata ruang secara detail untuk kota dan kawasan serta daerah yang tumbuh dengan pesat; serta terkendalinya dengan optimal pemanfaatan

ruang sesuai dengan kaidah pengelolaan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Selain itu ,perencanaan pembangunan diarahkan pada upaya yang mendukung semakin mantapnya kenaikan nilai tambah PDRB dan struktur ekonomi telah berada dalam sector tersier dengan laju pertumbuhan ekonomi yang berada diatas angka inflasi regional dan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah serta pendapatan perkapita dan upah minimum kabupaten serta upah minimum regional mampu memenuhi kebutuhan minimum :

Urusan Perhubungan. Pembangunan Perhubungan diprioritaskan pada upaya penambahan jangkauan wilayah pelayanan moda transportasi.

Urusan Lingkungan Hidup. Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup diprioritaskan pada optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup melalui kelayakan AMDL,UKL/UPL dan RKL/RPL yang bersertifikat dalam kegiatan usaha dan mulai terpenuhinya baku mutu lingkungan yang berlaku : serta semakin optimalnya cakupan reforestasi lahan kritis dan telah menjangkau sebagian besar dari luas lahan kritis yang ada.

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, diprioritaskan pada upaya semakin mantapnya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di bawah laju Provinsi Jawa Tengah.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.Pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak diarahkan untuk peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi,pendidikan dan kesehatan ,peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.

Urusan Sosial, diprioritaskan pada berkurangnya secara signifikan jumlah pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah,serta pendapatan perkapita dan upah minimum regional mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Urusan Penanaman Modal,diprioritaskan pada semakin mantapnya tambahan jumlah maupun laju investasi di wilayah Kabupaten Banjarnegara,dan terus berkembangnya sentra –sentra unggulan yang baru tumbuh di setiap wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Urusan Kebudayaan. Dalam Pembangunan urusan kebudayaan diprioritaskan pada pelestarian nilai- nilai tradisional dan kearifan local masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Upaya yang di lakukan antara lain mengembangkan nilai – nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat yang dapat dijadikan faktor penyeimbang terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pembangunan urusan kepemudaan diarahkan pada penyiapan kemandirian pemuda dalam mensejahterakan dirinya dan masyarakat disekitarnya tanpa banyak tergantung pada pihak lain. Adapun pengembangan keolahragaan dilakukan melalui perwujudan Kabupaten Banjarnegara sebagai Kabupaten yang mampu mencetak atlit berprestasi pada efen Provinsi dan Nasional.

Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri diprioritaskan untuk optimalisasi persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan agama, optimalisasi kondisi politik lokal yang demokratis melalui penguatan kelembagaan politik yang ada ; optimalisasi tehknologi dan alat deteksi dini terhadap bencana gempa, banjir dan tanah longsor ; serta optimalisasi kemampuan aparat, anggota masyarakat dan kelompok masyarakat terampil dalam menangani bahaya bencana alam, pencengghahan bencana alam maupun mitigasi bencana serta meningkatnya perlindungan masyarakat dan penanggulangan/penanganan korban bencana alam maupun korban bencana sosial.

Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat desa, kepegawaian dan persandian, diprioritaskan pada optimalisasi kapasitas pemerintahan Kabupaten Banjarnegara dan DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ; optimalisasi kualitas pelayanan dasar, perijinan dan pelayanan publik yang lebih baik (better), lebih cepat (faster) dengan biaya wajar menurut peraturan yang berlaku (cheaper) dalam lingkungan kewenangan Kabupaten Banjarnegara serta memenuhi kepuasan pelanggan ; optimalisasi reformasi birokrasi ke arah pelayanan publik dengan dukungan tehnologi e–goverment dan tehnologi informasi yang terkini untuk aspek pelayanan perijinan investasi dan perijinan lain.

Urusan Kearsipan Pembangunan kearsipan diprioritaskan pada terciptanya tata pengolahan kearsipan yang terintergrasi (Intergrated system) antara manual dan

elektronik pada tingkat SKPD dan Kecamatan ; serta perintisan pengembangan perpustakaan Desa / Kelurahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Urusan Komunikasi dan Informatika Pembangunan komunikasi dan informatika diprioritaskan pada pemantapan aksesibilitas masyarakat terhadap teknologi informasi melalui upaya peningkatan jangkauan layanan telekomunikasi di setiap Desa / Kelurahan.

Urusan Pertanian, diprioritaskan pada terjaminnya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, terutama beras dan mulai terpenuhinya kebutuhan komoditas pangan lainnya.

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Pada tahap ini, diharapkan semakin mantapnya pranata pengelolaan energi dalam upaya kemandirian energi regional.

Prioritas utama pada tahap ini adalah optimalisasi pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju dengan menitikberatkan pada sektor pertanian kearah industri-industri hasil pertanian, kearah standarisasi nasional maupun internasional, pengembangan kualitas produk untuk meningkatkan daya saing dalam upaya menembus pasar global.

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005–2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang.

Meskipun dalam perkembangannya telah terjadi pergantian kepemimpinan dari Bupati sekarang kepada Bupati yang baru nantinya, RPJPD ini akan menjadi pedoman bagi calon Bupati dan Wakil Bupati selama periode 20 tahun kedepan dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas serta akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara yang berdimensi waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara yang berdimensi tahunan.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Banjarnegara dalam mewujudkan visi “Banjarnegara yang Maju Berbasis Pertanian” perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Banjarnegara; serta (5) dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah.

BUPATI BANJARNEGARA

DJASRI

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 3 TAHUN
2009 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
(RPJP) DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN 2005-2025

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATENBANJARNEGARA TAHUN 2005-2025

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Banjarnegara saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Banjarnegara, maka Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 adalah :

“BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN”

Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 ini mengarah pada pencapaian tujuan, cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan, dan kelestarian yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.

Kabupaten Banjarnegara diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

Maju, artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun nonfisik didukung oleh sumber

daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mampu mengelola segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerja sama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antarwilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung kondusivitas daerah.

Berbasis artinya bahwa pembangunan daerah terkonsentrasi pada salah satu tujuan, sedangkan aspek-aspek yang lain tetap diperhatikan dan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut.

Pertanian, konsep pertanian dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pertanian merupakan konsentrasi selama 20 (dua puluh) tahun mendatang. Pertanian yang dimaksud adalah meliputi pertanian tanaman pangan seperti padi, palawija dan hortikultura yang meliputi sayur mayur dan buah-buahan. Di samping pertanian tanaman pangan juga bidang peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, yang kesemuanya diharapkan dapat memberikan kontribusi penuh dan besar yang dapat menopang pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, meningkatnya akses, pemerataan, dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk miskin, mantapnya kearifan lokal yang tercermin dalam meningkatnya

peradaban, harkat, dan martabat manusia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian masyarakat, meningkat dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang, meningkatnya karakter masyarakat yang berbudaya yang mendasarkan pada kearifan lokal dan jati diri, serta meningkatnya kesadaran dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari sehingga membentuk karakter masyarakat bermoral dan berakhlak mulia.

2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten-kabupaten yang maju di Indonesia, meningkatnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif (Sektor pertanian, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata didukung dengan sektor lain) yang berdaya saing tinggi menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi pertanian yang berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian sekaligus mendorong peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan lebih bermutu, meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok dan dapat dipertahankan pada tingkat aman melalui swasembada pangan dan disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan di masyarakat melalui revitalisasi pertanian dalam arti luas, meningkatnya sektor pertanian ke arah agribisnis dan agroindustri serta agrowisata yang didukung dengan meningkatnya perdagangan dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber kekayaan daerah, meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang, meningkatnya keterpeliharaan kekayaan keragaman jenis dan

kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah, meningkatnya kualitas sumber daya air, udara, dan tanah sesuai baku mutu dan terlindunginya kesehatan masyarakat dari dampak akibat pencemaran, meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam, menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta berkurangnya tindak kekerasan berbasis gender dan anak tanpa diskriminasi, menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin, meningkatnya upaya perlindungan HAM dan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, meningkatnya kestabilan situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM dan terwujudnya kesetaraan gender, meningkatnya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Kabupaten Banjarnegara, meningkatnya upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat, serta meningkatnya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat dari segala tindak kejahatan.

3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik, meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, meningkatnya perkembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, dan masyarakat yang mandiri, Meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, serta meningkatnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada

tingkat lokal, nasional, dan internasional.

4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur wilayah dan yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru, meningkatnya perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh, meningkatnya keterpenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatnya jaringan irigasi, bendung dalam rangka menciptakan ketahanan pangan.

BAB IV

ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2005-2025

4.1 SASARAN POKOK PEMBANGUNAN

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Banjarnegara yang maju berbasis pertanian sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai ukuran tercapainya Kabupaten Banjarnegara yang maju berbasis pertanian, pembangunan Kabupaten Banjarnegara dalam kurun 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran pokok sebagai berikut.

4.1.1 Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat, yang ditandai dengan :

1. Meningkatnya kualitas SDM, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (GDI).
2. Meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.
3. Meningkatnya akses, pemerataan, dan mutu pelayanan kesehatan.
4. Meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
5. Meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk miskin.
6. Mantapnya kearifan lokal yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian masyarakat.
7. Meningkat dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang.
8. Meningkatnya karakter masyarakat yang berbudaya yang mendasarkan pada kearifan lokal dan jati diri.
9. Meningkatnya kesadaran dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari sehingga membentuk karakter masyarakat bermoral dan berakhlak mulia.

4.1.2 Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam

pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai, yang ditandai dengan:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten-kabupaten yang maju di Indonesia.
2. Meningkatnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sektor pertanian, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata, didukung dengan sektor lain yang berdaya saing tinggi menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi pertanian yang berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian sekaligus mendorong peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan lebih bermutu.
3. Meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok dan dapat dipertahankan pada tingkat aman melalui swasembada pangan dan disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan di masyarakat melalui revitalisasi pertanian dalam arti luas.
4. Meningkatnya sektor pertanian kearah agribisnis dan agroindustri serta agrowisata yang didukung dengan meningkatnya perdagangan dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
5. Meningkatnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber kekayaan daerah.
6. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang.
7. Meningkatnya keterpeliharaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah.
8. Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara, dan tanah sesuai baku mutu dan terlindunginya kesehatan masyarakat dari dampak akibat pencemaran.
9. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam.

10. Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta berkurangnya tindak kekerasan berbasis gender dan anak tanpa diskriminasi.
11. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin.
12. Meningkatnya upaya perlindungan HAM dan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
13. Meningkatnya kestabilan situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM dan terwujudnya kesetaraan gender.
14. Meningkatnya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Kabupaten Banjarnegara;
15. Meningkatnya upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat Kabupaten Banjarnegara;
16. Meningkatnya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat Kabupaten Banjarnegara dari segala tindak kejahatan.

4.1.3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab, yang ditandai dengan:

1. Meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik.
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
4. Meningkatnya perkembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, dan masyarakat yang mandiri.
5. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah.
6. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.
7. Meningkatnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan

dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

4.1.4 Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar, yang ditandai dengan :

1. Meningkatnya infrastruktur wilayah dan yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
2. Meningkatnya perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh.
3. Meningkatnya keterpenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatnya jaringan irigasi, bendung dalam rangka menciptakan ketahanan pangan.

4.2 ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025

Arah pembangunan Jangka Panjang selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun diarahkan pada :

4.2.1 Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai - nilai luhur agama dan budaya masyarakat

1. Peningkatan, pemerataan dan pengurangan kesenjangan yang terjadi antar wilayah, kelompok usia dan jenis kelamin serta perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan; peningkatan relevansi daya saing dan peningkatan pencitraan tata kelola pendidikan. Peningkatan kemampuan akademis, profesionalisme, dan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, serta pemerataan distribusi guru.
2. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas sebagai upaya pemenuhan standar nasional pendidikan dan pencapaian sekolah standar nasional bertaraf internasional, melalui

- pembangunan/penyediaan dan peningkatan fasilitas pendidikan.
3. Peningkatan dan pengembangan sekolah kejuruan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan menciptakan lapangan kerja mandiri.
 4. Pengembangan pendidikan nonformal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan pencari kerja sesuai perkembangan iptek.
 5. Pembentukan SDM yang berkualitas dan berkompeten di bidang pertanian dan industri, melek teknologi, dan berdaya saing melalui pelatihan dan penyuluhan.
 6. Meningkatkan perhatian dan kesadaran masyarakat bahwa pertanian merupakan sektor yang mempunyai potensi dan peluang yang luas untuk dikembangkan lebih lanjut melalui penyiapan tenaga produksi yang professional, pengolah hasil pertanian, distributor, penelitian dan pengembangan pertanian.
 7. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses, pemerataan, dan mutu terhadap pelayanan kesehatan baik aspek promosi, pencegahan, dan penanggulangan berbagai penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta jaminan pemeliharaan jaminan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.
 8. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penanganan masalah gizi, mutu tenaga kesehatan dan perbaikan manajemen kesehatan.
 9. Pengembangan sikap dan perilaku pemuda yang beriman dan bertakwa, mandiri, inovatif, dan kreatif, serta peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda sebagai subjek pembangunan, melalui pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan.
 10. Penciptaan dan Pengembangan budaya berolah raga bagi masyarakat, agar terwujud kehidupan yang sehat di samping mengembangkan secara simultan olah raga prestasi melalui pengembangan sarana prasarana olah raga yang memadai.
 11. Peningkatan ketakwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama serta meningkatkan pemahaman nilai-nilai ajaran agama dan mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling percaya dan menciptakan harmonisasi antarkelompok umat beragama yang penuh toleransi dan tenggang rasa.

4.2.2 Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai.

1. Pengembangan perekonomian daerah yang berorientasi dan berdaya saing global dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi lokal khususnya pertanian yang memperhatikan sumber daya alam secara berkelanjutan dan membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi yang kokoh.
2. Pengembangan perekonomian daerah berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memerhatikan terjaminnya kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat, mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah, dan sebagai bagian dari penanggulangan kemiskinan dan pengurangan jumlah penduduk miskin.
3. Pengembangan kelembagaan ekonomi melalui penciptaan regulasi dan perizinan yang efisien, efektif, dan nondiskriminatif, menjaga, mengembangkan, dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat, serta melindungi konsumen; mendorong pengembangan standarisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing; meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah, sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi dalam negeri.
4. Pengembangan jasa infrastruktur dan keuangan di tingkat perdesaan dengan pengembangan keprofesian, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang mampu menyediakan sumber pendanaan di pedesaan dalam pengembangan kegiatan perekonomian dan pengentasan kemiskinan di pedesaan.
5. Pengembangan sektor-sektor strategis yang didayagunakan untuk memperkuat perekonomian daerah. Sistem agribisnis dan agroindustri diperkuat sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.
6. Pengembangan kegiatan pertanian yang terintegrasi antara jenis usaha tani dengan pembangunan industri yang mengolah komoditas pertanian, seperti industri pengolahan makanan, industri pengolahan minuman,

industri pengolahan serat (kayu, kulit, karet, sutera, jerami), industri jasa boga, industri farmasi dan bahan kecantikan, dan lain-lain beserta kegiatan perdagangannya.

7. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor pertanian agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi daerah. Hal ini merupakan faktor strategis karena berkenaan dengan pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan, dan penguatan ketahanan pangan.
8. Perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, kesejahteraan dan perlindungan serta kemandirian tenaga kerja yang berwawasan wirausaha (*entrepreneur*) sehingga mampu bersaing di era global.
9. Peningkatan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan tuntutan pasar kerja, serta pengembangan dan pemerataan balai-balai latihan kerja daerah.
10. Penciptaan UKM berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, mandiri serta mampu menembus pasar global dengan mengembangkan kerja sama strategis dan sinergis antarpelaku usaha, mengembangkan rumpun industri, mempercepat alih teknologi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
11. Peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha perkoperasian.
12. Peningkatan investasi di daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi rakyat dan meningkatkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah karena meningkatnya kapasitas dan aktivitas perekonomian daerah. Pengembangan investasi dilakukan dengan mengembangkan iklim usaha yang kondusif, menjamin kepastian berusaha, dan peningkatan kualitas sistem pelayanan investasi, serta pemenuhan sarana prasarana pendukung investasi.
13. Pengembangan lembaga keuangan di daerah untuk memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi investasi di daerah. Setiap jenis investasi akan memperoleh sumber pendanaan yang sesuai dengan karakteristik jasa keuangan.
14. Peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah dengan mengembangkan produktivitas pertanian dalam negeri, yang

- mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat terutama pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, maupun harga yang terjangkau.
15. Pengembangan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan melalui PLTMH Mikro Hidro untuk kecukupan kebutuhan listrik masyarakat.
 16. Peningkatkan produksi perikanan yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani ikan dengan tetap menjaga kelestarian dan pelarangan penangkapan ikan yang merusak lingkungan.
 17. Pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan produk-produk pertanian dan industri, dan menjaga distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah pedesaan, dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
 18. Penguatan basis industri yang mempunyai daya saing baik di pasar lokal maupun internasional, melalui pendekatan klaster, serta meningkatkan peran sektor industri kecil dan menengah terhadap struktur industri, sehingga terjadi keseimbangan peran antara industri besar dengan industri kecil dan menengah.
 19. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di daerah, serta untuk meningkatkan dan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dari berbagai keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, proses rekrutmen dan pelatihan keterampilan bagi calon transmigran menjadi prioritas untuk menciptakan transmigran yang tangguh, mampu menciptakan peluang usaha mandiri dengan jiwa wirausaha.
 20. Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat lokal di bidang kepariwisataan untuk memperluas kesempatan kerja dan mendorong kegiatan ekonomi daerah serta mendorong timbulnya daya saing antar produk pariwisata. Pengembangan kepariwisataan juga dapat memasyarakatkan keragaman budaya, alam dan keunikan lokal daerah masing-masing.
 21. Pengembangan sistem pembangunan sesuai dengan keseimbangan ekosistem, dalam artian tidak menimbulkan dampak yang merusak lingkungan. Pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan daya dukungnya dan memerhatikan daya regenerasinya khusus untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*).
 22. Peningkatan wawasan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang

merupakan modal pembangunan daerah dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Dengan demikian, sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Karena itu, untuk mewujudkan visi Kabupaten Banjarnegara, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah.

23. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang dan diikuti dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Untuk itu diperlukan tata ruang wilayah yang mantap disertai penegakan hukum sebagai pedoman pemanfaatan SDA yang optimal dan lestari.
24. Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan dan peningkatan partisipasi masyarakat dunia usaha dan industri dalam memelihara lingkungan, melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup, dapat menciptakan SDM yang berkualitas, yaitu SDM yang peduli terhadap isu SDA dan lingkungan hidup, yang utamanya diarahkan pada generasi muda.
25. Pengembangan sistem pembangunan kehutanan yang diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan, dan peningkatan daya dukung sumber daya hutan dalam pembangunan berkelanjutan serta peningkatan daerah resapan air dalam rangka konservasi air bawah tanah (ABT) dengan peningkatan rehabilitasi peran dan fungsi hutan melalui upaya konservasi.
26. Pengembangan sistem pembangunan kependudukan yang diarahkan pada pengendalian laju pertumbuhan dan persebaran penduduk serta mewujudkan keluarga sejahtera, sehingga tercipta kondisi kependudukan yang terkendali dan kesejahteraan keluarga yang meningkat. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dilakukan melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, informatif, bermutu, aman dan efektif serta perlindungan hak-hak reproduksi secara bertanggung jawab, bebas dari diskriminasi, tanpa paksaan dan kekerasan menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas, baik karena keharmonisan maupun karena didukung oleh tertatanya administrasi

kependudukan.

27. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan. Kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, tetapi juga untuk menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa secara keseluruhan.
28. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui dua cara. Pertama, mengurangi beban pengeluaran konsumsi kelompok miskin. Kedua, meningkatkan produktivitas masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatannya. Kedua cara dimaksud pada dasarnya adalah memenuhi hak-hak masyarakat miskin selaras dengan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) dan MDGs meliputi :
 - a) Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin (pangan, sandang, perumahan, air bersih, pendidikan, kesehatan, kepemilikan);
 - b) Peningkatan pendapatan;
 - c) Peningkatan partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan;
 - d) Perlindungan sosial dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, konflik, diskriminasi serta kerentanan lainnya seperti bencana;
 - d) Perbaikan lingkungan hidup (sanitasi dan air bersih).
29. Pengembangan sistem pembangunan sosial sesuai dengan komitmen global *Millennium Development Goals* sebagai langkah menuju upaya penghapusan kemiskinan, dengan target pengurangan setengah angka kemiskinan pada tahun 2015 yang telah dicanangkan PBB. Sistem pembangunan sosial diarahkan pada penanganan kemiskinan, baik kemiskinan struktural maupun kemiskinan kultural dan penanganan masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Ini dilakukan melalui upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat dengan didukung oleh sistem perlindungan sosial, termasuk penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai, pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat sebagai wahana yang luas untuk pengembangan mekanisme pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dengan tidak merusak budaya daerah dan kearifan lokal.
30. Pengembangan sistem pembangunan budaya daerah yang diarahkan pada pengembangan seni dan budaya melalui pelestarian nilai-nilai budaya yang mengakar dari warisan leluhur, dan ditujukan untuk

membentuk nilai-nilai kepribadian masyarakat yang bermartabat. Pelestarian seni dan budaya diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kegiatan seni budaya daerah serta meningkatkan jumlah peminat seni budaya daerah.

31. Pengembangan budaya inovatif yang berorientasi iptek dengan memerhatikan nilai-nilai kearifan lokal agar masyarakat menguasai iptek serta mampu bersaing di era persaingan global. Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, pembelajaran masyarakat, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek.
32. Pengembangan sistem pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang diarahkan pada memperkuat kelembagaan, pangerusutamaan gender dan anak dalam pembangunan, sehingga keadilan gender terjamin dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik untuk memberikan lebih besar peran perempuan di berbagai bidang pembangunan dan menurunkan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan.
33. Pengembangan sistem keamanan dan ketertiban yang diwujudkan melalui keterpaduan upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjaga kerukunan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan dengan memerhatikan kondisi wilayah, kondisi penduduk, dan kondisi sosial masyarakat Banjarnegara.
34. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat sebagai upaya untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat.

4.2.3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.

1. Peningkatan pemahaman paradigma politik yang desentralisasi dan pendidikan politik sehingga tidak menimbulkan euforia politik sesaat.
2. Identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi dari pemerintah dan lembaga swadaya

masyarakat dalam rangka mencapai kinerja pelayanan publik yang prima berbasis partisipasi masyarakat. Dengan demikian, pelayanan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan yang merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Di samping itu, perlu adanya pemberdayaan dan perwujudan aparatur pemerintah yang mumpuni dan bersih, serta ditunjang oleh sarana dan prasarana pelayanan secara memadai dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik

3. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan, dalam rangka mewujudkan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga dapat meningkatkan volume perputaran keuangan di daerah dan terwujudnya optimalisasi fungsi lembaga pengelolaan keuangan daerah.
4. Peningkatan penegakan hukum yang dilandasi prinsip-prinsip keadilan terutama dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan kualitas produk hukum daerah sesuai kewenangan yang dimiliki serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum yang memberatkan masyarakat untuk mewujudkan peraturan perundangan daerah yang mampu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan.
5. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan HAM.
6. Peningkatan kerja sama antardaerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif daerah dan menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik. Pembangunan kerjasama antardaerah melalui sistem jejaring antar daerah akan sangat bermanfaat sebagai sarana berbagi pengalaman, berbagi keuntungan dari kerja sama, maupun berbagi tanggung jawab pembiayaan secara proporsional, baik dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana maupun dalam pembangunan lainnya.
7. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan melalui penyiapan landasan berupa institusi masyarakat yang memperkuat perkembangan masyarakat di masa mendatang dan memberdayakan masyarakat yang berbasis komunitas desa untuk mengatasi masalah yang ada dengan melaksanakan kegiatan yang dikelola secara demokratis, transparan, dan akuntabel.
8. Peningkatan pembangunan aparatur untuk mewujudkan sosok dan

kinerja aparatur pemerintah yang profesional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mendorong pola pengembangan karir yang menuju pada pengembangan profesionalisme, pengembangan standar kompetensi aparatur, dan peningkatan kesejahteraan aparatur termasuk perangkat desa. Di samping itu, secara bertahap juga dilakukan perubahan terhadap mental dan budaya birokrasi agar cepat dan tanggap dalam merespon tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

9. Pengembangan kebijakan pemerintah yang disusun berdasarkan pada kajian dan analisis yang mendalam disertai dengan dukungan data dan informasi yang mutakhir, valid, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, pembangunan statistik akan dimulai dengan menata kewenangan dan kelembagaan statistik daerah, diikuti dengan pengembangan pusat data statistik daerah yang terintegrasi dengan pusat, *updating* secara ketat setiap data dan informasi yang berada pada tingkat sektoral sehingga bermanfaat bagi perumusan indikator pembangunan daerah yang terimplementasi secara berkelanjutan.
10. Perumusan kebijakan pemerintah yang mendukung masuknya arus investasi. Kebijakan pemerintah harus bisa menjadi 'gerbang' bagi investasi pertanian, baik investasi domestik maupun investasi asing.
11. Penyediaan akses informasi yang memudahkan petani untuk mengetahui perkembangan harga dan keadaan pasar secara umum.
12. Pemantapan sistem kelembagaan daerah, termasuk sistem lembaga keuangan dan pendanaan yang memberikan kredit pada kegiatan pertanian.
13. Peningkatan penataan kelembagaan kearsipan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah, pembangunan sistem kearsipan daerah, pengembangan prasarana dan sarana pendukung kearsipan daerah, dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kearsipan.
14. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah yang memadai melalui pembangunan dan pengembangan beberapa Sistem Informasi Manajemen di masing-masing Satuan Kerja yang nantinya akan diintegrasikan melalui jaringan intranet maupun internet.
15. Peningkatan usaha memelihara kondisi keamanan ketertiban yang cukup kondusif di daerah dengan melakukan antisipasi terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban, dalam rangka mewujudkan sistem keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi keseluruhan warga masyarakat dari gangguan ketertiban

dan keamanan.

4.2.4 Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar

1. Pengembangan sistem pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat yang diarahkan pada penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan yang mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah yang dapat meningkatkan pelayanan mobilitas barang dan jasa dalam mendukung pembangunan sektoral dan regional serta pemerataan hasil-hasil pembangunan
2. Optimalisasi sarana transportasi, komunikasi, dan informasi guna mencapai pola perekonomian yang terintegrasi dan mendukung satu sama lain.
3. Pengembangan sistem pembangunan sumber daya air yang diarahkan untuk mencapai keandalan ketersediaan air yang diwujudkan dengan kegiatan membangun waduk, waduk lapangan (embung) bendungan, pompa, jaringan drainase, pengendalian mutu air, serta pemanfaatan kembali air drainase; ditunjang oleh keandalan pengelolaan jaringan air yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi; kesemuanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, melalui kegiatan pengembangan sistem irigasi partisipatif guna mendorong kegiatan intensifikasi, diversifikasi, ekstensifikasi, dan rehabilitasi pertanian dan modernisasi usaha tani.
4. Pengembangan sistem pembangunan air minum yang diarahkan pada peningkatan akses masyarakat Kabupaten Banjarnegara terhadap air minum perpipaan melalui peningkatan kapasitas pelayanan air minum, peningkatan kinerja pengelola air minum, serta peningkatan kualitas SDM pengelola air minum melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk pemenuhan air minum diantisipasi tingkat kebocoran baik teknis maupun nonteknis hingga mencapai ambang batas normal.
5. Pengembangan sistem pembangunan kelistrikan yang diarahkan pada pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik daerah dan peningkatan kemampuan pelayanannya. Peningkatan kemampuan kebutuhan listrik ini dapat dilakukan dengan mencari sumber-sumber baru di wilayah potensial untuk dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) termasuk penggunaan mikrohidro (pembangkit listrik mini) terutama di wilayah pedesaan. Di samping itu, pembangunan kelistrikan juga diarahkan dengan membangun jaringan distribusi listrik sampai pelosok

pedesaan sehingga diharapkan terjadi peningkatan kemampuan jangkauan pelayanan kebutuhan listrik baik untuk kepentingan industri maupun untuk kepentingan rumah tangga dapat terwujud secara lebih merata.

6. Pengembangan sistem pembangunan perumahan yang diarahkan pada peningkatan penyediaan perumahan dan lahan bagi masyarakat berpendapatan rendah, beserta peningkatan pemenuhan kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana sehat. Dalam mendukung pemenuhan lingkungan perumahan yang sehat diberikan fasilitasi pembiayaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan, terutama pada kawasan kumuh perkotaan.
7. Pengembangan sistem penanganan persampahan dan drainase pada permukiman yang diarahkan pada peningkatan kesadaran seluruh pihak yang terlibat terhadap pentingnya peningkatan pengelolaan dan pelayanan persampahan dan drainase, serta memberikan ruang yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pelayanan persampahan, tidak hanya dalam bidang transportasinya, tetapi juga dalam bidang pengelolaan tempat pembuangan akhir TPA.
8. Pengembangan sistem pembangunan penataan ruang yang diarahkan pada pembangunan wilayah yang terpadu, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan seimbang. Rencana pembangunan dijabarkan dan disinkronisasikan ke dalam rencana tata ruang yang konsisten, baik materi maupun jangka waktunya.
9. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih menekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi.
10. Pengembangan sistem pembangunan kota yang tetap menjaga keseimbangan pertumbuhannya. Upaya itu diperlukan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali,
11. Peningkatan pemahaman rencana tata ruang yang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor,

lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan dalam rangka mengurangi kesenjangan antar desa.

12. Pengembangan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam rangka mengoptimalkan struktur dan pola pemanfaatan ruang melalui peningkatan (a) kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang, (b) kualitas rencana tata ruang, dan (c) efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

4.3 TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Upaya perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan secara bertahap dalam kerangka pembangunan jangka menengah, yang diukur dengan parameter peningkatan kualitas manusia melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tahapan pembangunan jangka menengah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.3.1 RPJM Daerah Pertama (2005 – 2009)

Pada RPJMD Pertama, pembangunan di Kabupaten Banjarnegara berorientasi pada kelanjutan pencapaian target pembangunan dalam Renstra Kabupaten Banjarnegara tahun 2005 – 2009 yang diarahkan pada pemerataan akses pelayanan dasar, peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi rakyat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan, serta pengelolaan sumber daya alam yang mencakup tahapan sebagai berikut :

4.3.1.1 Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai – nilai luhur agama dan budaya masyarakat, dengan fokus pada :

1. Peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dengan menitikberatkan pada pendidikan dasar dan peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dengan perkembangan Iptek yang didukung oleh sarana/prasarana yang memadai.
2. Pengembangan lembaga pelatihan dan kursus keterampilan dalam mendukung peningkatan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan bagi pemuda.
3. Pengembangan perpustakaan sebagai sarana penyebaran informasi,

ilmu pengetahuan, hasil penelitian, dan penemuan lainnya kepada masyarakat.

4. Peningkatan pemerataan, jangkauan, dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan yang didukung oleh persebaran sarana prasarana, tenaga kesehatan yang memadai dan berkualitas, serta mampu menjangkau masyarakat miskin.
5. Peningkatan pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui peningkatan fasilitasi program KB dan transmigrasi.
6. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan iptek yang berbasis pada peningkatan jejaring penelitian yang mampu mendorong berkembangnya teknologi tepat guna pada berbagai bidang.
7. Peningkatan kepedulian pada etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam rangka mewujudkan ketahanan dalam dinamika pergaulan nasional, regional, dan internasional.
8. Peningkatan kepedulian terhadap nilai-nilai budaya lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat Banjarnegara.
9. Pengembangan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan melalui pemeliharaan kerukunan hubungan antar umat beragama.

4.3.1.2 Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar, memperhatikan kelestarian lingkungan, serta pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai, dengan fokus pada :

1. Peningkatan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing.
2. Peningkatan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor dan memiliki daya saing.
3. Peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berorientasi pada sistem agribisnis guna mempertahankan swasembada pangan.
4. Peningkatan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan, dan sarana-

- prasarana pendukung.
5. Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan kritis secara terpadu berbasis ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) serta pengembalian fungsi kawasan lindung.
 6. Peningkatan inventarisasi dan identifikasi keanekaragaman hayati dalam rangka penyusunan profil.
 7. Pengembangan sistem pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.
 8. Peningkatan sosialisasi dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana.
 9. Peningkatan kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanganan penduduk usia lanjut melalui peningkatan partisipasi sosial dan kesetiakawanan sosial masyarakat.
 10. Pengembangan pemberdayaan perempuan melalui kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila.
 11. Peningkatan investasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.
 12. Peningkatan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan kepastian hukum.
 13. Peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat untuk memahami prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan hukum dan HAM.
 14. Peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban Banjarnegara yang diwujudkan melalui keterpaduan upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjaga kerukunan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan dengan memerhatikan kondisi wilayah, penduduk, dan sosial masyarakat Banjarnegara dengan tetap memerhatikan penegakan hukum dan HAM.
 15. Pengembangan upaya untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat diantaranya melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya

perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat Banjarnegara .

4.3.1.3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut :

1. Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Peningkatan kualitas aparatur melalui peningkatan kesadaran akan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik.
3. Pengembangan sistem pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai dengan kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar.
4. Pengembangan proses demokratisasi, politik, dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan partisipasi dan pendidikan politik rakyat serta profesionalisme aparat dan penegak hukum
5. Pengembangan sistem perencanaan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
6. Pengembangan kerja sama dan kemitraan strategis antarpelaku pembangunan daerah secara partisipatif.

4.3.1.4 Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan penyediaan fasilitas umum berupa prasarana dan sarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan baru, pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan yang sudah ada, dan pelebaran jalan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah.
2. Pemerataan ketersediaan rumah dan prasarana dasar permukimannya (air bersih, sanitasi, dan persampahan), terutama bagi masyarakat RTM di perkotaan maupun perdesaan.
3. Pengembangan fungsi prasarana dan sarana sumberdaya air dan irigasi guna mendukung aktivitas produksi, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan, melalui konservasi sumber-sumber air, pendayagunaan irigasi, air baku, drainase, industri, serta pengendalian bahaya kekeringan.
4. Pembangunan dan penerapan penatagunaan pertanahan mendasarkan pada RTRW dan peningkatan cakupan pelayanan administrasi pertanahan.

5. Pengembangan pembangunan penataan ruang melalui peningkatan efektivitas dan peran RTRW Kabupaten sebagai matra ruang pembangunan daerah; peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan ruang, dan pembangunan kelembagaan dan penerapan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Pengembangan sistem dan sarana-prasarana telekomunikasi yang mampu mendukung pertumbuhan perekonomian daerah melalui Peningkatan cakupan layanan dan kemudahan akses bagi masyarakat luas.
7. Peningkatan rasio elektrifikasi melalui perluasan cakupan layanan energi listrik bagi masyarakat perdesaan, serta pemenuhan energi listrik untuk industri yang ada melalui perluasan jaringan distribusi.
8. Peningkatan pemerataan pembangunan wilayah yang mendasarkan karakteristik potensi dan kesesuaian dengan RTRW melalui peningkatan kerja sama pembangunan kawasan strategis; peningkatan fungsi perkotaan; percepatan pembangunan perdesaan; dan percepatan pembangunan infrastruktur wilayah.

4.3.2 RPJM Daerah Kedua (2010 – 2014)

Pada RPJMD Kedua, berlandaskan pada pelaksanaan pencapaian RPJMD Pertama, pembangunan Kabupaten Banjarnegara tahap selanjutnya diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi rakyat, peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif serta kualitas dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam rangka mencapai tujuan akhir maka pada tahap ini pembangunan diselenggarakan untuk mencapai daerah agribisnis dan agrowisata, yang mencakup tahapan sebagai berikut:

4.3.2.1 Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai – nilai luhur agama dan budaya masyarakat, dengan fokus pada :

1. Peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dengan menitik beratkan pada pendidikan menengah dan peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta pangsa pasar kerja dan didukung oleh sarana/prasarana yang memadai.
2. Peningkatan mutu lembaga pelatihan dan kursus keterampilan dalam mendukung pengembangan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan bagi pemuda.

3. Peningkatan pelayanan perpustakaan sebagai sarana penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, hasil penelitian, dan penemuan lainnya kepada masyarakat sampai ke pedesaan.
4. Penyiapan SDM yang mendukung proses industrialisasi di bidang pertanian untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas.
5. Pemberian penyuluhan kepada petani, mulai dari penerapan teknologi pra dan pasca panen, pengelolaan manajerial, hingga kerjasama dengan mitra usaha.
6. Meningkatkan perhatian dan kesadaran masyarakat bahwa pertanian merupakan sektor yang mempunyai potensi dan peluang yang luas untuk dikembangkan lebih lanjut.
7. Peningkatan pemerataan, jangkauan, dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan, melalui pengembangan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan, serta terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

8. Pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui peningkatan fasilitasi program KB dan transmigrasi.
9. Peningkatan dan penerapan hasil penelitian dan pengembangan iptek yang mampu mendorong berkembangnya teknologi madya di berbagai bidang.
10. Peningkatan kesadaran penerapan etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam rangka mewujudkan ketahanan dalam dinamika pergaulan nasional, regional, dan internasional.
11. Peningkatan kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai budaya lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat Banjarnegara.
12. Peningkatan pengamalan, penghayatan ajaran agama / kepercayaan melalui pemeliharaan kerukunan hubungan antarumat beragama.

4.3.2.2 Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar, memperhatikan kelestarian lingkungan, serta pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai, dengan berfokus pada:

1. Pengembangan peran UMKM yang berorientasi ekspor melalui Pengembangan infrastruktur pendukung dan penguatan kelembagaan dalam mendorong daya saing UMKM.
2. Pengembangan struktur perekonomian daerah yang berbasis potensi dan produk unggulan melalui sinergi sektor hulu dan hilir.
3. Pengembangan produk pertanian, perikanan, dan kehutanan yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agrowisata didukung sarana dan prasarana yang memadai guna menjamin swasembada pangan dan ketahanan pangan serta pengembangan pariwisata.
4. Pengembangan diversifikasi produk, peningkatan kinerja kelembagaan dan sarana-prasarana pendukung sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.
5. Optimalisasi hasil-hasil pertanian untuk menuju swasembada untuk beberapa komoditas terpilih.
6. Pengembangan sumber daya pertanian yang berdasarkan pada pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.
7. Mengembangkan sumberdaya alam yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif menjadi komoditas yang mempunyai keunggulan kompetitif.

8. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui penguatan kelembagaan dalam rangka rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung.
9. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati yang berbasis masyarakat dalam rangka perlindungan sumber daya genetik.
10. Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan berbasis masyarakat dan penegakan hukum lingkungan.
11. Pengembangan dan penerapan teknologi sederhana dalam rangka pengurangan risiko bencana.
12. Pengembangan profesionalitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanganan penduduk usia lanjut melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelaksana.
13. Peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila.
14. Pengembangan investasi dan akses pasar untuk mendorong akselerasi kinerja ekonomi daerah dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.
15. Pengembangan kapasitas kelembagaan hukum dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan dan kepastian hukum.
16. Pengembangan budaya masyarakat dalam memahami prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan hukum dan HAM.
17. Peningkatan peran serta masyarakat untuk mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban melalui program/ kegiatan yang mengutamakan keterpaduan aparat dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menjaga kerukunan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan tetap memperhatikan penegakan hukum dan HAM.
18. Peningkatan kualitas upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat.

4.3.2.3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung

jawab, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Peningkatan kualitas dan sistem budaya kerja aparatur yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
4. Peningkatan proses demokratisasi politik dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan kualitas kelembagaan politik serta akuntabilitas aparat dan penegak hukum.
5. Peningkatan kualitas dan implementasi sistem perencanaan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara sinergis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
6. Peningkatan kerja sama dan kemitraan strategis pada sektor-sektor unggulan daerah yang mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah.
7. Perumusan kebijakan pemerintah yang mendukung masuknya arus investasi. Kebijakan pemerintah harus bisa menjadi 'gerbang' bagi investasi pertanian, baik investasi domestik maupun investasi asing. Kebijakan pemerintah hendaknya juga mampu menciptakan iklim investasi dan persaingan yang sehat di daerah, sehingga investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Banjarnegara.
8. Terbukanya pasar yang lebih luas untuk kegiatan pemasaran produk pertanian Banjarnegara dan seluruh hasil turunan dari produk pertanian.
9. Pemantapan sistem kelembagaan daerah, termasuk sistem lembaga keuangan dan pendanaan yang memberikan kredit pada kegiatan pertanian.

4.3.2.4 Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut :

1. Pengembangan jaringan transportasi melalui peningkatan keterpaduan sistem transportasi antarwilayah yang mengutamakan pelayanan transportasi yang terjangkau.
2. Peningkatan ketersediaan rumah serta prasarana dasar

permukimannya bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan secara merata, efisien, dan efektif.

3. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi guna mendukung aktivitas produksi yang berdaya saing, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan, didukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.
4. Pengembangan cakupan dan penerapan penatagunaan pertanahan yang mendasarkan pada RTRW dan peningkatan cakupan serta kualitas pelayanan administrasi pertanahan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal serta pemanfaatan dan pengendalian pertanahan secara merata dan berkeadilan.
5. Peningkatan kualitas penataan ruang melalui peningkatan penerapan RTRW Kabupaten Banjarnegara dalam pembangunan daerah; peningkatan dan konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukungnya dan penerapan pengendalian pemanfaatan ruang, terutama pada kawasan lindung dan sawah lestari didukung kelembagaan serta peran serta masyarakat.
6. Peningkatan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan telekomunikasi melalui pengembangan kelembagaan maupun peraturan-peraturannya terkait dengan keamanan, kerahasiaan, privasi, dan integritas informasi, serta peningkatan peran penyelenggaraan telekomunikasi yang menunjang penyelenggaraan telematika melalui optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan prasarana pos dan telekomunikasi serta prasarana nontelekomunikasi.
7. Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat melalui perbaikan jaringan distribusi dan penelitian untuk pemanfaatan sumber listrik alternatif yang aman dan ramah lingkungan serta perluasan dan peningkatan ketersediaan energi listrik.
8. Peningkatan keserasian pembangunan antarwilayah kecamatan yang mendasarkan pada karakteristik potensi melalui peningkatan kualitas kerja sama pembangunan kawasan strategis; peningkatan peran dan fungsi perkotaan; peningkatan pembangunan perdesaan, dan peningkatan cakupan dan sistem infrastruktur wilayah.
9. Penyediaan sarana produksi bagi pertanian, seperti industri dan perdagangan agrokimia (pupuk organik, pupuk anorganik dll), industri agrotomotif (mesin dan peralatan), dan industri benih/bibit
10. Penyediaan sarana transportasi, pemenuhan infrastruktur pokok seperti jalan dan jembatan untuk daerah terpencil, lembaga keuangan, dan

kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan agribisnis dan agrowisata

4.3.3 RPJM Daerah Ketiga (2015 - 2019)

Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, serta sebagai kelanjutan dari RPJMD Pertama dan RPJMD Kedua, RPJMD Ketiga diarahkan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang. Hasil ini terutama yang menekankan pada pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat Banjarnegara yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas, infrastruktur wilayah yang makin berkualitas, dan kondusivitas wilayah yang makin mantap serta kemampuan ilmu dan teknologi yang makin meningkat. Dalam rangka mencapai tujuan akhir maka pada tahap ini pembangunan diselenggarakan untuk mencapai daerah agroindustri, mencakup tahapan sebagai berikut :

4.3.3.1 Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai - nilai luhur agama dan budaya masyarakat, dengan fokus pada :

1. Peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu, didukung oleh tenaga pendidik yang berkompetensi, serta peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sesuai dengan perkembangan Iptek dan kebutuhan pasar kerja serta fasilitasi pendidikan tinggi.
2. Penguatan peranan pemuda dalam pembangunan yang didukung dengan peningkatan kreativitas, keterampilan, seni budaya, dan olah raga, serta kewirausahaan.
3. Pembentukan SDM yang berkualitas dan berkompeten di bidang pertanian dan industri, memahami teknologi, dan berdaya saing melalui pelatihan dan penyuluhan.
4. Pengembangan riset dan study mengenai pertanian di Banjarnegara.
5. Membangun pusat pengkajian dan percobaan teknologi agribisnis, termasuk inovasi tepat guna untuk teknologi pertanian dan produk olahannya.
6. Peningkatan pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi yang dapat berfungsi untuk mencerdaskan masyarakat.
7. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan /rujukan melalui penguatan profesionalisme

dan kompetensi tenaga kesehatan, serta terwujudnya sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

8. Penguatan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui KB dan transmigrasi mandiri.
9. Penguatan kualitas SDM dan lembaga riset yang mampu menghasilkan aplikasi iptek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas, termasuk industri.
10. Penguatan budaya masyarakat guna membentuk karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan nasional, regional, dan internasional.
11. Penguatan aktualisasi nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam rangka peningkatan kualitas jati diri yang berbasis modal sosial yang makin berkembang.
12. Penguatan penghayatan dan pengamalan ajaran agama /kepercayaan melalui pemeliharaan kerukunan hubungan antarumat beragama.

4.3.3.2 Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar, memperhatikan kelestarian lingkungan, serta pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai, dengan berfokus pada:

1. Penguatan UMKM yang berorientasi ekspor melalui pengembangan akses pasar dalam mendorong daya saing UMKM.
2. Penguatan struktur perekonomian daerah yang berbasis produk unggulan yang komparatif dan kompetitif dalam rangka mendorong peningkatan kualitas produk melalui pemanfaatan kemajuan iptek.
3. Penguatan kelembagaan agribisnis guna menjamin ketersediaan pangan dalam rangka pemantapan swasembada pangan dan ekspor.
4. Penguatan sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata guna menghasilkan produk yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif.
5. Mempertahankan swasembada untuk komoditas pilihan dengan tetap memperhatikan kualitas pelestarian lingkungan serta pengembangan pasar.
6. Pengembangan kegiatan pertanian yang terintegrasi antara jenis usaha tani dengan pembangunan industri yang mengolah komoditas pertanian, seperti industri pengolahan makanan, industri pengolahan minuman, industri pengolahan serat (kayu, kulit, karet, sutera, jerami), industri jasa boga, industri farmasi dan bahan kecantikan, dan lain-lain beserta kegiatan perdagangannya
7. Penerapan industri yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Hal ini akan meminimalisasi *idle capacity* dan berujung pada pola perekonomian yang efisien
8. Penguatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya.
9. Pengembangan pemanfaatan kekayaan keanekaragaman hayati dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
10. Penguatan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan pemantapan penegakan hukum lingkungan.

11. Peningkatan fungsi kelembagaan dan sistem dalam rangka pengurangan risiko bencana.
12. Penguatan sistem dan kelembagaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan kepekaan dan respon kelembagaan.
13. Penguatan pemberdayaan perempuan melalui kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila.
14. Penguatan akses pasar baik domestik maupun global untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang dinamis dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.
15. Penguatan sistem penegakan hukum yang sinergis, adil, dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
16. Penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM.
17. Penguatan peran serta masyarakat untuk mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban melalui program/ kegiatan yang mengutamakan keterpaduan aparat dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menjaga kerukunan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan tetap memperhatikan penegakan hukum dan HAM.
18. Penguatan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat.

4.3.3.3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut :

1. Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Penguatan sistem budaya kerja aparatur yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik.
3. Penguatan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pengangguran.

4. Penguatan sistem demokrasi, politik, dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan kesadaran politik serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip keadilan dan HAM.
5. Penguatan sistem perencanaan dan optimalisasi sumber daya pembangunan yang didukung oleh kemitraan dengan masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan daerah.
6. Penguatan kelembagaan lokal yang berbasis jati diri Banjarnegara dalam rangka kerja sama dan kemitraan strategis pada sektor-sektor unggulan daerah yang mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah.
7. Perumusan kebijakan pemerintah yang mendukung masuknya arus investasi. Kebijakan pemerintah harus bisa menjadi 'gerbang' bagi investasi pertanian, baik investasi domestik maupun investasi asing.
8. Terbukanya pasar yang lebih luas untuk kegiatan pemasaran produk pertanian Banjarnegara dan seluruh hasil turunan dari produk pertanian.
9. Pemantapan sistem kelembagaan daerah, termasuk sistem lembaga keuangan dan pendanaan yang memberikan kredit pada kegiatan pertanian.

4.3.3.4 Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan manajemen transportasi melalui peningkatan keterpaduan antar dan intermoda yang mendukung efisiensi penyelenggaraan transportasi.
2. Peningkatan kualitas rumah serta prasarana dasar permukimannya bagi masyarakat, serta pengembangannya untuk menunjang perekonomian daerah.
3. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pengelolaan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi yang handal, guna mendukung aktivitas produksi yang berdayasaing, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan.
4. Peningkatan penatagunaan pertanahan yang mendasarkan pada RTRW, pelayanan administrasi pertanahan berbasis desa, serta peningkatan pemanfaatan dan pengendalian pertanahan, untuk menunjang perekonomian daerah.

5. Peningkatan kualitas penataan ruang melalui pengembangan penerapan perencanaan tata ruang; percepatan dan pengembangan pemanfaatan ruang dan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menunjang perekonomian daerah dan lingkungan hidup yang didukung kelembagaan yang optimal serta peningkatan peran serta masyarakat.
6. Penguatan sistem penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri namun tetap menjaga keutuhan sistem yang ada melalui pemanfaatan konsep teknologi netral dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika yang mampu mendukung pengembangan industri konten dan aplikasinya sebagai penciptaan nilai tambah informasi.
7. Pemantapan sistem pelayanan secara konsisten melalui perbaikan dan sistem operasi dan pemeliharaan jaringan sistem distribusi yang sesuai dengan standar nasional.
8. Penguatan pemerataan dan keserasian pembangunan antar wilayah kecamatan untuk menunjang perekonomian daerah melalui optimalisasi dan pengembangan kerja sama pembangunan kawasan strategis; pemantapan peran dan fungsi perkotaan; peningkatan peran dan fungsi perdesaan, dan pemantapan cakupan dan sistem infrastruktur wilayah.
9. Optimalisasi sarana transportasi, komunikasi, dan informasi guna mencapai pola perekonomian yang terintegrasi dan mendukung satu sama lain.

4.3.4 RPJM Daerah Keempat (2020 – 2024)

Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, serta sebagai kelanjutan dari RPJMD Pertama, RPJMD Kedua dan RPJMD Ketiga yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Banjarnegara yang maju berbasis pertanian melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Banjarnegara yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam rangka mencapai tujuan akhir maka pada tahap ini pembangunan diselenggarakan untuk mencapai daerah agropolitan, mencakup tahapan sebagai berikut :

4.3.4.1 Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta

menghargai dan menerapkan nilai – nilai luhur agama dan budaya masyarakat, dengan fokus pada :

1. Pemantapan pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan tenaga pendidik yang berkompetensi, serta kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sesuai dengan iptek, jenjang pendidikan lebih tinggi, dan pangsa pasar kerja.
2. Pemantapan peranan pemuda dalam pembangunan yang didukung oleh peningkatan kreativitas, keterampilan, seni budaya, dan olahraga, serta kewirausahaan yang berbasis pada penggunaan dan pemanfaatan teknologi.
3. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi pada sektor industri dan pertanian.
4. Pengembangan riset yang mengarah pada penciptaan teknologi baru.
5. Pemantapan pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi yang dapat berfungsi untuk mencerdaskan masyarakat.
6. Pemantapan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan yang prima dengan mendayagunakan tenaga kesehatan yang profesional, serta didukung oleh sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang andal.
7. Pemantapan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui KB dan transmigrasi mandiri.
8. Pemantapan penguasaan iptek di berbagai bidang secara kompetitif dalam mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
9. Pemantapan karakter masyarakat yang mempunyai jati diri yang tangguh, bermoral, dan mampu bersaing dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan nasional, regional, dan internasional.
10. Pelestarian nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam rangka memperkuat jati diri dalam pergaulan nasional maupun internasional.
11. Pemantapan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama disertai pembinaan dan pemeliharaan kerukunan hubungan antarumat beragama.

4.3.4.2 Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar, memperhatikan kelestarian lingkungan, serta pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai, dengan fokus pada:

1. Pemantapan UMKM yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif di pasar global yang berbasis teknologi informasi.
2. Pemantapan struktur perekonomian yang didukung oleh produk-produk unggulan yang mempunyai nilai ekonomi strategis, berkualitas, serta mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif di pasar global.
3. Pemantapan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis guna menjamin ketahanan dan swasembada pangan, serta peningkatan nilai tambah produk ekspor.
4. Pemantapan kualitas dan pemasaran produk pada sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.
5. Meningkatkan keragaman kegiatan perekonomian kawasan agropolitan dan wilayah penyangganya.
6. Pembangunan industri yang terarah sesuai dengan kluster dan potensi di daerah yang bersangkutan, serta memperhatikan tata wilayah untuk mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dan teratur.
7. Pemantapan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis kelembagaan masyarakat dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi dalam menopang kehidupan.
8. Pelestarian sumber daya genetik berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9. Pemantapan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas daya tampung dan daya dukung lingkungan.
10. Pemantapan fungsi kelembagaan dan sistem pengurangan risiko bencana.
11. Pemantapan sistem dan kelembagaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
12. Pemantapan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila.
13. Pemantapan kondisi perekonomian daerah yang berkelanjutan dalam rangka memperluas kesempatan kerja, pengurangan dan pengentasan kemiskinan.
14. Pemantapan budaya penegakan hukum guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum.
15. Pemantapan sistem dan pelestarian tata pengelolaan kehidupan bermasyarakat yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip

dasar hukum dan HAM.

16. Pemantapan kondisi keamanan dan ketertiban melalui program/kegiatan yang mengutamakan keterpaduan aparat dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menjaga kerukunan sosial dalam kehidupan masyarakat serta melibatkan masyarakat sebagai salah satu unsur utama dalam membangun pertahanan negara dengan tetap memperhatikan penegakan hukum dan HAM.
17. Pemantapan perlindungan terhadap masyarakat, penghargaan yang tinggi terhadap penegakan hukum dan peradilan untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban.

4.3.4.3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut :

1. Pemantapan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pemantapan sistem budaya kerja aparatur yang berkualitas, profesional, bersih, beretika, dan berwibawa dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik.
3. Pemantapan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
4. Pemantapan sistem demokrasi, politik, dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan kedewasaan politik rakyat serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip transparansi, keadilan, dan HAM.
5. Pemantapan sistem perencanaan yang implementatif dan berkualitas yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara sinergis.
6. Pemantapan kerja sama dan kemitraan strategis pada seluruh sektor pembangunan dengan tetap berbasis jati diri budaya masyarakat Banjarnegara dalam mengantisipasi kemajuan dan pengaruh globalisasi.

7. Semakin terbukanya peluang investasi domestik atau investasi asing untuk masuk ke daerah melalui perbaikan iklim investasi dan kebijakan yang mendukung dengan adanya kemunculan kutub-kutub pertumbuhan yang mampu menjadi motor penggerak perekonomian.
8. Terwujudnya perekonomian daerah yang mandiri dan saling mendukung satu sama lain serta sistem kelembagaan yang mantap dan terintegrasi.
9. Memperluas kerja sama dengan institusi nasional atau internasional yang akan mendukung perkembangan industri pertanian.
10. Terwujudnya keterkaitan kegiatan ekonomi antar wilayah perkotaan dan perdesaan dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang saling menguntungkan, sehingga terjadi keseimbangan pertumbuhan antara perdesaan dan perkotaan.

4.3.4.4 Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut :

1. Pemantapan sistem transportasi yang berorientasi pada keamanan dan kenyamanan serta pemenuhan kebutuhan transportasi massal yang andal.
2. Pemenuhan kebutuhan rumah dan permukimannya yang berkualitas dalam menunjang perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan hidup .
3. Pemantapan prasarana dan sarana sumberdaya air dan irigasi untuk mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing, dan terpenuhinya secara mantap kebutuhan prasarana dasar perdesaan dan perkotaan, dalam rangka peningkatan kemandirian, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Pemantapan penatagunaan pertanahan, administrasi, dan hukum; pemanfaatan dan pengendalian pertanahan untuk menunjang perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
5. Pemantapan sistem penataan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pemantapan penerapan perencanaan tata ruang; pemantapan dan pengembangan pemanfaatan ruang; dan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menunjang perekonomian daerah, pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
6. Pemantapan sistem manajemen penyelenggaraan telekomunikasi dan telematika yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang berstandar internasional baik dari aspek kelembagaan, organisasi, maupun regulasinya.
7. Pemantapan pasokan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat luas

(rumah tangga dan industri) secara konsisten melalui peningkatan sistem dan pemantapan manajemen operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi secara terpadu.

8. Pemantapan pemerataan dan keserasian pembangunan wilayah kecamatan untuk meningkatkan daya saing dalam menunjang perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan hidup melalui pemantapan pembangunan kawasan strategis, keserasian peran, dan fungsi perkotaan dan perdesaan, serta ketersediaan infrastruktur wilayah yang andal.
9. Penciptaan Tata Ruang sesuai dengan hirarki perencanaan (RTRW-Kabupaten) sebagai daerah pertanian yang memperhatikan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd

SUTEDJO SLAMET UTOMO